



BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 390 / VII / 2024

TENTANG

PENETAPAN ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menyusun Arsitektur SPBE;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 68 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 68);

#### MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

KESATU : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :

- a. Domain Arsitektur Proses Bisnis;
- b. Domain Arsitektur Data dan Informasi;
- c. Domain Arsitektur Layanan;
- d. Domain Arsitektur Aplikasi;
- e. Domain Arsitektur Infrastruktur; dan
- f. Domain Arsitektur Keamanan.

KETIGA : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menghasilkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 1 Juli 2024

Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten di Pangkajene Sidenreng;
3. Kepala Bagian Hukum di Pangkajene Sidenreng.

A small, stylized handwritten mark or signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadi kunci penting dalam lancarnya proses pelayanan dalam pemerintahan, baik dalam layanan publik maupun administrasi pemerintahan. Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) menekankan pentingnya TIK untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Kab. Sidenreng Rappang sebagai salah satu daerah yang ada di Sulawesi Selatan memiliki berbagai potensi yang dapat dioptimalisasi pemanfaatannya dengan menggunakan TIK sebagai pendukung layanan pemerintahan.

Kabupaten Sidenreng Rappang telah menerapkan beberapa sistem aplikasi yang mendukung pelayanan bagi masyarakat. Namun, aplikasi-aplikasi ini, masih perlu ditingkatkan dan diintegrasikan satu dengan yang lainnya agar dapat meningkatkan pelaksanaan proses bisnis di setiap OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang dalam rangka memenuhi RPJMD tahun 2021-2026. Dari hasil observasi dan hasil analisis dokumen RPJMD tersebut didapatkan hasil yaitu:

1. Sistem Informasi yang ada, akan dikembangkan berdasarkan pada strategi yang telah berjalan dan disesuaikan kebutuhannya dengan RPJMD tahun 2021- 2026. Aplikasi-aplikasi ini perlu dilakukan pengintegrasian sehingga memungkinkan mekanisme berbagi pakai data dalam pelaksanaan layanan dan proses bisnis.
2. Untuk memaksimalkan pemanfaatan ini, maka diperlukan arsitektur yang mendukung. Arsitektur yang dibangun ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022. Mengacu pada kedua kebijakan tersebut, domain arsitektur yang disusun mencakup arsitektur Layanan, Proses Bisnis, Data dan Informasi, Aplikasi, Infrastruktur TIK, dan Keamanan TIK. Selanjutnya, muatan peta rencana SPBE mencakup Tata Kelola, Manajemen SPBE, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur TIK, Keamanan TIK, dan Audit TIK.

Proses berjalannya SPBE ini harus dipantau pencapaiannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi Kab. Sidenreng Rappang untuk menguatkan peran Tim Koordinasi SPBE untuk mengarahkan dan mengawasi kesesuaian Arsitektur dan jalannya implementasi Peta Rencana, dan didukung oleh pegawai yang memiliki kemampuan yang baik dalam pengelolaan TIK.

## DAFTAR ISI

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....                          | i  |
| DAFTAR ISI.....                                    | ii |
| DAFTAR GAMBAR.....                                 | iv |
| DAFTAR TABEL.....                                  | v  |
| 1. Pendahuluan .....                               | 1  |
| 1.1. Latar Belakang.....                           | 1  |
| 1.2. Tujuan dan Sasaran .....                      | 2  |
| 1.3. Acuan Regulasi .....                          | 2  |
| 1.4. Pendekatan dan Kerangka Kerja .....           | 3  |
| 1.4.1. Kerangka Kerja Arsitektur SPBE .....        | 4  |
| 1.4.2. Indeks SPBE.....                            | 5  |
| 1.5. Sistematika Dokumen.....                      | 7  |
| 2. Profil Kabupaten Sidenreng Rappang.....         | 9  |
| 2.1. Visi, Misi, dan Tujuan .....                  | 9  |
| 2.2. Organisasi Perangkat Daerah.....              | 11 |
| 3. Kondisi Berjalan .....                          | 14 |
| 3.1. Layanan .....                                 | 14 |
| 3.2. Proses Bisnis.....                            | 19 |
| 3.3. Data dan Informasi .....                      | 22 |
| 3.4. Aplikasi .....                                | 23 |
| 3.5. Infrastruktur TIK.....                        | 47 |
| 3.5.1. Dukungan Infrastruktur Internet .....       | 47 |
| 3.5.2. Penyediaan Jaringan .....                   | 48 |
| 3.5.3. Jaringan Intra .....                        | 49 |
| 3.5.4. Sistem Penghubung Layanan .....             | 49 |
| 3.6. Keamanan TIK .....                            | 49 |
| 3.7. Pengelolaan dan Organisasi TIK .....          | 50 |
| 3.7.1. Domain Kebijakan Internal SPBE .....        | 51 |
| 3.7.2. Domain Tata Kelola SPBE .....               | 51 |
| 3.7.3. Domain Manajemen SPBE .....                 | 52 |
| 3.7.4. Domain Layanan .....                        | 52 |
| 4. Strategi Pengembangan SPBE .....                | 53 |
| 4.1. Strategi TIK berdasarkan Strategi RPJMD ..... | 53 |

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.2. Penguatan Layanan SPBE dalam rangka Pengembangan Layanan Publik... | 57  |
| 5. Target Arsitektur .....                                              | 59  |
| 5.1. Layanan .....                                                      | 60  |
| 5.1.1. Prinsip-prinsip Layanan.....                                     | 60  |
| 5.1.2. Target Arsitektur Layanan .....                                  | 61  |
| 5.2. Proses Bisnis.....                                                 | 65  |
| 5.2.1. Prinsip-prinsip Proses Bisnis .....                              | 65  |
| 5.2.2. Target Arsitektur Proses Bisnis .....                            | 65  |
| 5.3. Data dan Informasi .....                                           | 70  |
| 5.3.1. Prinsip-prinsip Data dan Informasi .....                         | 70  |
| 5.3.2. Target Arsitektur Data dan Informasi.....                        | 70  |
| 5.4. Aplikasi .....                                                     | 76  |
| 5.4.1. Prinsip-prinsip Aplikasi .....                                   | 76  |
| 5.4.2. Target Arsitektur Aplikasi .....                                 | 77  |
| 5.5. Infrastruktur TIK.....                                             | 79  |
| 5.5.1. Prinsip-prinsip Infrastruktur TIK .....                          | 79  |
| 5.5.2. Target Arsitektur Infrastruktur TIK.....                         | 80  |
| 5.5.3. Fasilitas/Pusat Komputasi .....                                  | 82  |
| 5.5.4. Sistem Integrasi: Topologi Jaringan.....                         | 85  |
| 5.5.5. Sistem Integrasi: Sistem Penghubung Layanan (SPL).....           | 87  |
| 5.5.6. Platform .....                                                   | 87  |
| 5.6. Keamanan TIK.....                                                  | 88  |
| 5.6.1. Prinsip-prinsip Keamanan TIK.....                                | 88  |
| 5.6.2. Target Arsitektur Keamanan TIK .....                             | 88  |
| 5.7. Tata Kelola dan Organisasi TIK .....                               | 90  |
| 5.7.1. Prinsip-prinsip Tata Kelola TIK.....                             | 90  |
| 5.7.2. Penerapan Manajemen SPBE .....                                   | 92  |
| 5.7.3. Pelaksanaan Audit TIK.....                                       | 94  |
| 5.7.4. Rekomendasi Koordinasi Pengelolaan TIK .....                     | 94  |
| 5.7.5. Rekomendasi Fungsi Pengelola TIK pada OPD .....                  | 96  |
| 5.7.6. Rekomendasi Peningkatan Kapasitas SPBE.....                      | 97  |
| 6. Peta Rencana .....                                                   | 99  |
| 7. Penutup .....                                                        | 110 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                             |                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Gambar 1. Kerangka Kerja Arsitektur SPBE .....              | 5                                   |
| Gambar 2. Indeks SPBE .....                                 | 6                                   |
| Gambar 3 Bobot dan Predikat Penilaian Indeks SPBE.....      | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Gambar 4. Peta Proses Bisnis Urusan Pemerintahan.....       | 20                                  |
| Gambar 5. Peta Proses Bisnis Pemda Sidenreng Rappang.....   | 21                                  |
| Gambar 6. Data dan Informasi yang didapatkan .....          | 22                                  |
| Gambar 7. Kondisi Internet .....                            | 48                                  |
| Gambar 8. Topologi Jaringan .....                           | 49                                  |
| Gambar 9. Nilai Domain Kebijakan SPBE.....                  | 51                                  |
| Gambar 10. Nilai Domain Tata Kelola SPBE .....              | 51                                  |
| Gambar 11. Nilai Domain Manajemen SPBE.....                 | 52                                  |
| Gambar 12. Nilai Domain Layanan SPBE.....                   | 52                                  |
| Gambar 13. Target Arsitektur Data.....                      | 71                                  |
| Gambar 14. Target Arsitektur Aplikasi .....                 | 77                                  |
| Gambar 15. Arsitektur Cloud.....                            | 83                                  |
| Gambar 16. Acuan Topologi Jaringan Utama .....              | 85                                  |
| Gambar 17. Target Topologi Jaringan.....                    | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Gambar 18. Topologi Keamanan TIK.....                       | 90                                  |
| Gambar 19. Tim Koordinasi SPBE .....                        | 95                                  |
| Gambar 20. Rekomendasi Penempatan Fungsi TIK Pada OPD ..... | 96                                  |

## DAFTAR TABEL

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Target Prioritas Arsitekrut Layanan..... | 61 |
| Tabel 2. Target Prioritas Arsitektur Data.....    | 71 |
| Tabel 3. Target Arsitektur Keamanan TIK.....      | 89 |
| Tabel 4. Rekomendasi Peningkatan Kapasitas.....   | 98 |

# 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era milenium ini telah dirasakan oleh seluruh khalayak. Bahkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sudah menjadi bagian paling penting dan tidak terpisahkan dalam sendi-sendi kehidupan, termasuk bagi masyarakat Indonesia, sampai ke pelosok daerah, yang telah melek TIK. Urat nadi kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini, sangat bergantung kepada keberadaan TIK. Hal tersebut menuntut organisasi pemerintahan untuk mengimbangi fenomena ini agar mampu menyediakan akses, fasilitas dan sarana-prasarana pelayanan publik berbasis TIK.

## 1.1. Latar Belakang

Di awal perumusan pelayanan publik berbasis TIK, maka mengemukalah wawasan *e-Government*, yaitu penggunaan dan pemanfaatan TIK oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warga masyarakat, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Pemanfaatan TIK ini masih sebatas pada hal yang mendasar, yaitu akses, fasilitas dan sarana-prasarana pelayanan publik berbasis TIK yang berdiri sendiri-sendiri sesuai lingkup fungsi, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam masa itu, belum ada satu pun payung hukum yang dapat dijadikan rujukan atau pedoman bagaimana menerapkan *e-Government* ini di organisasi pemerintahan. Untuk itulah kemudian Pemerintah Pusat merumuskan payung hukum yang dapat dijadikan rujukan yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Kemudian dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, berkesinambungan serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya maka dipandang perlu memberikan kepastian hukum dan pedoman untuk meningkatkan pengelolaan dan keterpaduan kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan SPBE.

## **1.2. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya Arsitektur SPBE sebagai pedoman untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SPBE. Dengan demikian, SPBE dapat dilaksanakan secara sistematis, terpadu, terarah dan komprehensif, disertai dengan terciptanya interoperabilitas, baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkup Pemda Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan OPD Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, maupun dengan Pemerintah Pusat, untuk mengeliminasi sekat-sekat, serta membentuk jaringan sistem informasi manajemen/aplikasi dan proses kerja yang memungkinkan OPD bekerja secara terpadu untuk menghindari duplikasi kerja, duplikasi data, dan ketidaktepatan data serta menyederhanakan akses ke semua Informasi dan layanan publik yang harus disediakan.

Sasaran tersedianya Arsitektur SPBE Kabupaten Sidenreng Rappang adalah:

- Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
- Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
- Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
- Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia SPBE.

## **1.3. Acuan Regulasi**

Acuan regulasi penyusunan Arsitektur SPBE Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain:

- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 38 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

- UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government
- PP No. 71 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik
- PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
- Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
- Perpres No. 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019
- Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
- Permen PANRB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Pedoman Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Surat Edaran Menteri PANRB No. 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

#### **1.4. Pendekatan dan Kerangka Kerja**

Metodologi penyusunan arsitektur SPBE perlu disertai dengan ekstensi/perluasan pendekatan yang diperlukan untuk memastikan bahwa

solusi yang disusun dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan perkembangan dan pemanfaatan SPBE di Kabupaten Sidenreng Rappang. Arsitektur SPBE harus mengacu pada rencana strategis organisasi (dalam hal ini RPJMD) sehingga tercipta keselarasan antara fungsi organisasi dengan inisiatif TIK. Arsitektur SPBE juga harus sesuai (*comply*) dengan regulasi, peraturan maupun kebijakan terkait rencana strategis Pemda Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dengan diterbitkannya Perpres 95/2018, Permen PANRB 59/2020, SE Menteri PANRB 18/2022, dan, Perpres 132/2022 maka Pemerintah telah memiliki acuan formal terkait arsitektur SPBE dan tata kelolanya, yaitu kerangka kerja arsitektur SPBE dan Indeks SPBE. Oleh karena itu, penyusunan dokumen arsitektur SPBE ini mengikuti kerangka kerja arsitektur SPBE dan indeks SPBE tersebut.

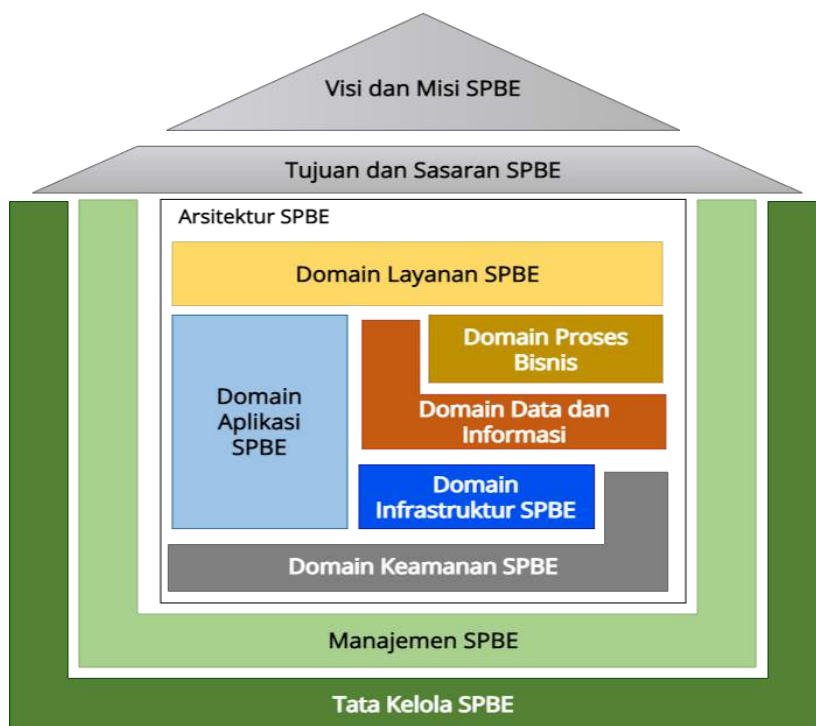
#### 1.4.1. Kerangka Kerja Arsitektur SPBE

Kerangka kerja SPBE sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, merupakan kerangka kerja yang digunakan dalam pelaksanaan tata kelola SPBE dan manajemen SPBE. Tata kelola SPBE diterapkan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.

Salah satu unsur SPBE dalam kerangka kerja tersebut di atas adalah Arsitektur SPBE Nasional, yang memberikan keterpaduan dari seluruh Domain Arsitektur SPBE Nasional yang terdiri dari enam domain, yaitu:

- domain arsitektur proses bisnis;
- domain arsitektur data dan informasi;
- domain arsitektur infrastruktur SPBE;
- domain arsitektur Aplikasi SPBE;
- domain arsitektur keamanan SPBE; dan
- domain arsitektur layanan SPBE.

Gambaran keterpaduan seluruh unsur-unsur SPBE di atas dapat diwujudkan dalam sebuah kerangka kerja Arsitektur SPBE. Arsitektur SPBE menggambarkan keterpaduan proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE, Aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE. Kerangka Kerja Arsitektur SPBE digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Kerja Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE memiliki pola yang dapat menghasilkan layanan digital pemerintah terintegrasi untuk mewujudkan visi dan misi SPBE, dimulai dengan melakukan identifikasi layanan pemerintah terintegrasi dari domain proses bisnis, domain data dan informasi, serta domain layanan SPBE, yang selanjutnya akan didukung oleh aspek teknologi informasi dan komunikasi melalui domain Aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE.

#### 1.4.2. Indeks SPBE

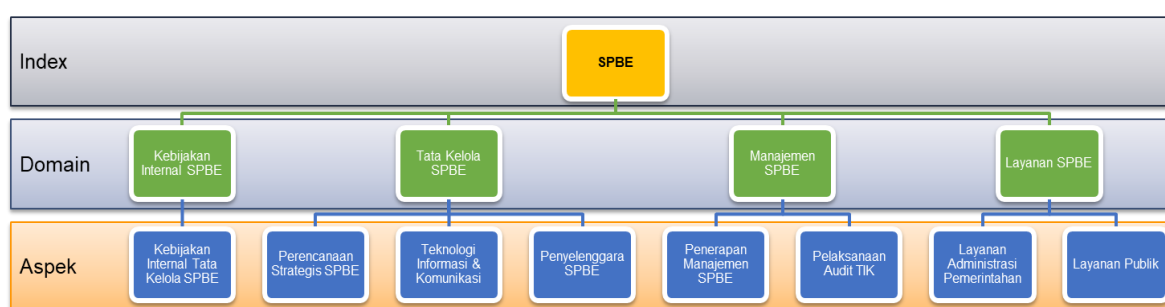
Penerapan TIK dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) perlu dievaluasi secara teratur dan terencana. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan risiko TIK, manfaat, dan keselarasan.

Sejak tahun 2018, penilaian kematangan Indeks SPBE telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) setiap tahunnya sebagai bagian dari penilaian reformasi birokrasi (RB). Mulai tahun 2021, instrumen utama yang digunakan untuk melakukan evaluasi kematangan Indeks SPBE berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB (PMPANRB) No. 59 tahun 2020 tentang Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Keputusan

Menteri PANRB (KMPANRB) No. 962 tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kedua kebijakan ini merupakan perubahan dari kebijakan penilaian sebelumnya, yaitu dari tiga domain, menjadi empat domain, yaitu dengan adanya penambahan domain manajemen.

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.

Sesuai PMPANRB 59/2020, penilaian indeks SPBE terdiri dari empat domain, delapan aspek, dan 47 indikator. Indeks SPBE digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Indeks SPBE

Selanjutnya, masing-masing domain dan aspek diberikan bobot penilaian sebagaimana gambar berikut:

Tabel 1. Bobot dan Predikat Penilaian Indeks SPBE

| Domain dan Aspek Penilaian                                      | Jumlah Indikator (47) | Bobot (100%) |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Domain 1– Kebijakan Internal Terkait SPBE                       | 10                    | 13%          |
| Aspek 1– Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE                    |                       |              |
| Domain 2 – Tata Kelola SPBE                                     | 10                    | 25%          |
| Aspek 2 – Perencanaan Strategis SPBE                            |                       | 10%          |
| Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi                    |                       | 10%          |
| Aspek 4 – Penyelenggara SPBE                                    |                       | 5%           |
| Domain 3 – Manajemen SPBE                                       | 11                    | 16.5%        |
| Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE                              |                       | 12%          |
| Aspek 6 – Audit TIK                                             |                       | 4.5%         |
| Domain 4 – Layanan SPBE                                         | 16                    | 45.5%        |
| Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik |                       | 27.5%        |
| Aspek 8 – Layanan Pengaduan Pelayanan Publik                    |                       | 18%          |

| Nilai Indeks | Predikat    |
|--------------|-------------|
| 4,2 – 5,0    | Memuaskan   |
| 3,5 - < 4,2  | Sangat Baik |
| 2,6 - < 3,5  | Baik        |
| 1,8 - < 2,6  | Cukup       |
| < 1,8        | Kurang      |

Hasil pembobotan dan penilaian akhir menghasilkan nilai indeks yang menunjukkan predikat tertentu sebagaimana gambar tersebut di atas.

### **1.5. Sistematika Dokumen**

Dokumen ini secara sistematis disusun dalam beberapa bab, yaitu:

- 1) Pendahuluan. Berisi latar belakang, maksud dan tujuan, metodologi penyusunan, dan sistematika dokumen.
- 2) Profil Kabupaten Sidenreng Rappang. Berisi gambaran umum mengenai Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 3) Kondisi Berjalan. Berisi ringkasan hasil assessment kondisi berjalan lingkungan TIK di lingkungan Pemda Kabupaten Sidenreng Rappang, yang terdiri dari gambaran proses bisnis, sistem informasi yang ada, kondisi infrastruktur TIK, dan pola pengelolaan TIK berjalan.
- 4) Strategi Pengembangan SPBE. Menguraikan bagaimana hubungan antara strategi TIK dengan strategi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 5) Target Arsitektur. Berisi gambaran:
  - a) Layanan. Berisikan target layanan yang akan dikembangkan oleh Pemda Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun ke depan.
  - b) Proses bisnis utama dan administratif Pemda Kabupaten Sidenreng Rappang yang dilihat dari sudut pandang strategis dan taktis operasional serta gambaran awal pola-pola solusi TIK dalam mendukung proses bisnis.
  - c) Arsitektur data dan informasi yang menguraikan bagaimana bentuk arsitektur data dan informasi yang akan dikembangkan selama lima tahun ke depan.
  - d) Arsitektur aplikasi dan daftar portofolio aplikasi yang harus ada untuk mendukung strategi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.
  - e) Infrastruktur TIK. Berisi rumusan arsitektur dan portofolio layanan infrastruktur TIK Kabupaten Sidenreng Rappang di masa depan dalam mendukung arsitektur informasi/ arsitektur aplikasi yang telah dirancang.
  - f) Keamanan TIK. Berisi acuan pola dan teknologi keamanan yang ditargetkan untuk mengamankan aliran informasi dan aplikasi yang menjadi pengolahnya.

- g) Organisasi dan Pengelolaan TIK. Berisi rumusan organisasi dan pengelolaan TIK yang direkomendasikan untuk Pemda Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka menjamin terlaksananya dan keberlangsungan pengelolaan sumber daya TIK berdasarkan dengan arsitektur SI dan TIK yang telah dirancang.
- 6) Penutup. Berisi kesimpulan dan saran agar dokumen Rencana Induk TIK ini dapat bermanfaat bagi pengelolaan Teknologi Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

## **2. Profil Kabupaten Sidenreng Rappang**

Kabupaten Sidenreng Rappang atau lebih dikenal dengan Kabupaten Sidrap merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak antara 3°43'-4°09' Lintang Selatan dan 119°41'-120°10' Bujur Timur. Adapun Kabupaten sekitar yang berbatasan langsung antara lain: Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang di sebelah utara, Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo sebelah timur, Kabupaten Pinrang dan Kota Pare-Pare sebelah Barat dan Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng di sebelah Selatan, Luas wilayah Kabupaten Sidrap tercatat 1.883,25 Km persegi. Kondisi topografi sebagian besar wilayah berupa dataran rendah sehingga membuat daerah ini sangat cocok bagi pengembangan sektor pertanian khususnya tanaman padi.

Secara administratif Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap menaungi 11 kecamatan, yang terdiri dari 68 desa dan 38 kelurahan. Dengan kata lain, tidak terjadi pemekaran wilayah. Kabupaten Sidrap memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup besar dengan jumlah penduduk 332.623 jiwa (November 2018), terdiri dari 165.402 laki-laki dan 167.221 wanita (rasio 98,9). Kepadatan penduduk mencapai 175 orang/km<sup>2</sup>. Laju Pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2017 dapat ditekan hanya dikisaran rata-rata 1,07% per tahun. Garis kemiskinan pada tahun 2017 berada pada batas Rp 276.558 sehingga persentase penduduk miskin di Sidrap hanya tercatat 5,32%.

### **2.1. Visi, Misi, dan Tujuan**

Visi merupakan kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Dalam perspektif RPJMD, visi berarti kondisi yang hendak diwujudkan hingga lima tahun yang akan datang. Rumusan visi ini merupakan gambaran ideal yang diimpikan sekaligus menunjukkan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal tersebut (gap expectation), sehingga diharapkan mampu menyelaraskan setiap langkah dari para pemangku kepentingan (stakeholder) Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mewujudkan mimpi bersama, yaitu masyarakat yang sejahtera.

Dengan berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2005-2025 pada tahapan keempat, memperhatikan Perubahan RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2018- 2023, memperhatikan RPJM Nasional tahun 2020-2024, serta merujuk pada tujuan Nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan memperhatikan tingkat kemajuan pembangunan yang telah dicapai hingga saat ini, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 adalah:

**“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”**

Rumusan visi tersebut mencakup lima pokok visi, yakni “Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju”, dengan Masyarakat yang Religius, Aman, Adil, dan Sejahtera. Kelima pokok visi tersebut yang menjadi fokus gerakan pembangunan bagi semua unsur untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

| Misi                                                                                                                            | Tujuan                                                    | Sasaran                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat</b> | Meningkatkan kualitas SDM yang inklusif dan berdaya saing | 1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan          |
|                                                                                                                                 |                                                           | 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                   |
|                                                                                                                                 |                                                           | 3. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan        |
| <b>Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat</b>                     | Meningkatkan pendapatan masyarakat                        | 4. Meningkatnya produktivitas sektorsektor perekonomian daerah |
|                                                                                                                                 |                                                           | 5. Menurunnya tingkat kemiskinan                               |
|                                                                                                                                 |                                                           | 6. Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan                |
| <b>Mengembangkan kerjasama investasi</b>                                                                                        | Meningkatkan Penyerapan Tenaga kerja                      | 7. Meningkatnya pertumbuhan                                    |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>daerah dan penyediaan lapangan kerja baru</b>                                                                                                                           |                                                                                                             | investasi dan daya saing daerah                                            |
| <b>Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan</b>                                                                                  | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan                                           | 8. Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur daerah yang berkualitas         |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                             | 9. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup                                  |
| <b>Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance</b> | Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik                          | 10. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah                   |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                             | 11. Meningkatnya kualitas pelayanan publik                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                             | 12. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik |
| <b>Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (smart village), sehat dan mandiri</b>                                                          | Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa                                                   | 13. Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri                                      |
|                                                                                                                                                                            | Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban serta Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius Dan Berbudaya | 14. Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat                        |

## 2.2. Organisasi Perangkat Daerah

Secara total terdapat 54 organisasi perangkat daerah (OPD) yang terdiri dari 29 OPD, 12 Kecamatan, dan 13 UPT. Daftar OPD di Kabupaten Sidenreng Rappang dipetakan dengan urusan dan jenis urusannya, sesuai dengan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut.

| No | Nama Organisasi Perangkat Daerah                                     | Urusan                                                  | Jenis Urusan                     |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | Sekretariat Daerah                                                   | Pemerintahan Umum                                       | Wajib                            |
| 2  | Sekretariat DPRD                                                     | Pemerintahan Umum                                       | Wajib                            |
| 3  | Inspektorat Kabupaten                                                | Pemerintahan Umum                                       | Wajib                            |
| 4  | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah    | Pemerintahan Umum                                       | Wajib                            |
| 5  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia               | Pemerintahan Umum                                       | Wajib                            |
| 6  | Badan Keuangan dan Aset Daerah                                       | Pemerintahan Umum                                       | Wajib                            |
| 7  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                    | Pemerintahan Umum                                       | Wajib                            |
| 8  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                  | Pemerintahan Umum                                       | Wajib                            |
| 9  | Badan Pendapatan Daerah                                              | Pemerintahan Umum                                       | Wajib                            |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak | Pemberdayaan Masyarakat Desa                            | Wajib Non Pelayanan Dasar        |
| 11 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan                                      | Pendidikan, Kebudayaan                                  | Wajib, Wajib Non Pelayanan Dasar |
| 12 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana        | Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana | Wajib, Wajib Non Pelayanan Dasar |
| 13 | Dinas Komunikasi dan Informatika                                     | Komunikasi dan Informatika                              | Wajib Non Pelayanan Dasar        |
| 14 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu               | Penanaman Modal                                         | Wajib Non Pelayanan Dasar        |
| 15 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                              | Kependudukan dan Pencatatan Sipil                       | Wajib Non Pelayanan Dasar        |
| 16 | Dinas Peternakan dan Perikanan                                       | Kelautan dan Perikanan                                  | Pilihan                          |

|    |                                                                      |                                                                |                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 17 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Wajib Non Pelayanan Dasar          |
| 18 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air                                    | Pekerjaan Umum                                                 | Wajib Non Pelayanan Dasar          |
| 19 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan dan Perumahan Rakyat       | Pekerjaan Umum                                                 | Wajib Non Pelayanan Dasar          |
| 20 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran                     | Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat     | Wajib                              |
| 21 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                                  | Perdagangan dan Perindustrian                                  | Pilihan                            |
| 22 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata                            | Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata                               | Wajib Non Pelayanan Dasar          |
| 23 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan  | Tanaman Pangan, Pertanian                                      | Wajib Non Pelayanan Dasar, Pilihan |
| 24 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                     | Perpustakaan, Kearsipan                                        | Wajib Non Pelayanan Dasar          |
| 25 | Dinas Lingkungan Hidup                                               | Lingkungan Hidup                                               | Wajib Non Pelayanan Dasar          |
| 26 | Dinas Perhubungan                                                    | Perhubungan                                                    | Wajib Non Pelayanan Dasar          |
| 27 | Dinas Sosial                                                         | Sosial                                                         | Wajib                              |
| 28 | Kantor RSUD Nene Mallomo                                             | Kesehatan                                                      | Wajib                              |
| 29 | Kantor RSUD Arifin Nu`Mang                                           | Kesehatan                                                      | Wajib                              |
| 30 | Kecamatan Maritengngae                                               | Pemerintahan Umum                                              | Wajib                              |
| 31 | Kecamatan Panca Rijang                                               | Pemerintahan Umum                                              | Wajib                              |
| 32 | Kecamatan Baranti                                                    | Pemerintahan Umum                                              | Wajib                              |
| 33 | Kecamatan Kulo                                                       | Pemerintahan Umum                                              | Wajib                              |

|    |                            |                   |       |
|----|----------------------------|-------------------|-------|
| 34 | Kecamatan Watang Pulu      | Pemerintahan Umum | Wajib |
| 35 | Kecamatan Panca Lautang    | Pemerintahan Umum | Wajib |
| 36 | Kecamatan Tellu Limpoe     | Pemerintahan Umum | Wajib |
| 37 | Kecamatan Watang Sidenreng | Pemerintahan Umum | Wajib |
| 38 | Kecamatan Dua Pitue        | Pemerintahan Umum | Wajib |
| 39 | Kecamatan Pitu Riawa       | Pemerintahan Umum | Wajib |
| 40 | Kecamatan Pitu Riase       | Pemerintahan Umum | Wajib |

### 3. Kondisi Berjalan

Pemda Kabupaten Sidenreng Rappang dengan dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), telah melakukan kegiatan *assessment* kondisi TIK tahun 2022. Tujuan dari *assessment* ini adalah untuk mengetahui kondisi yang sedang berjalan di lingkungan Pemda Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil dari kegiatan *assessment* TIK memberikan gambaran umum layanan, proses bisnis, data yang mengalir, portofolio aplikasi, dukungan infrastruktur TIK, penerapan keamanan TIK, dan pola pengelolaan TIK yang berjalan.

#### 3.1. Layanan

Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Secara umum terdapat dua jenis layanan, yaitu layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik. Berikut ini adalah layanan yang diselenggarakan oleh Pemda Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai dengan hasil survei yang telah dilakukan ke seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemda Kabupaten Sidenreng Rappang.

| ID | Nama Layanan                                          | Deskripsi Layanan                                                                                         | OPD/Unit Pelaksana                                     | Target Pengguna Layanan |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | Layanan Administrasi Kependudukan                     | Validasi dan Verifikasi Administrasi (KK, Permohonan KTP, Ket. Pindah Penduduk, Surat Keterangan lainnya) | Kecamatan                                              | Masyarakat              |
| 2  | Layanan Arsip Statis                                  | Melakukan Akuisisi Arsip dari Perangkat Daerah, Menginventarisir Arsip dan membuat Quide Arsip            | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                       | Seluruh OPD             |
| 3  | Layanan informasi barang terkena pajak                | Sistem yang mengelola data Wajib Pajak dan Objek Pajak                                                    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                         | Wajib Pajak             |
| 4  | Layanan informasi penanaman modal                     | Layanan berbantuan bagi pelaku usaha yang mengalami kendala pada pelaporan LKPM secara Online             | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Pelaku Usaha            |
| 5  | Layanan informasi produk hukum Kab. Sidenreng Rappang | Layanan yang menyediakan data produk-produk hukum perangkat desa yang dapat diakses secara online         | SETDA Bagian Hukum                                     | Masyarakat              |
| 6  | Layanan informasi umum                                | Menyampaikan Berita, Konten Media dan informasi kegiatan tentang Dinas terkait                            | Semua OPD                                              | Masyarakat              |
| 7  | Layanan kepegawaian                                   | Layanan internal kepegawaian, misalkan pengajuan cuti, dll.                                               | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | ASN                     |
| 8  | Layanan kepegawaian                                   | Informasi Kepegawaian                                                                                     | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA              | ASN                     |

| <b>ID</b> | <b>Nama Layanan</b>                                                                                | <b>Deskripsi Layanan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>OPD/Unit Pelaksana</b>               | <b>Target Pengguna Layanan</b> |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>9</b>  | Layanan kolaborasi pelaporan data kependudukan terkait kematian dan penerbitan sertifikat kematian | Grup WA Untuk Pelayanan Akta Kematian di Desa / Kelurahan se-Kab. Sidenreng Rappang                                                                                                                                                                                                                                                           | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Masyarakat                     |
| <b>10</b> | Layanan Pelaporan bencana daerah                                                                   | Ketika ada bencana, anggota grup dapat melaporkan kejadian                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH     | Internal                       |
| <b>11</b> | Layanan pembuatan laporan kinerja organisasi pemerintahan                                          | layanan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur sipil negara dan pengintegrasian informasi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal , dan capaian kinerja, dilaksanakan melalui penyelenggaraan, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara online di lingkungan Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang | Inspektorat                             | Seluruh OPD                    |
| <b>12</b> | Layanan Pemeriksaan SPPL dan Pemberian Rekomendasi terkait UKL-UPL                                 | Memberikan Layanan Pemeriksa SPPL, dan Rekomendasi UKLUPL kepada Badan Usaha                                                                                                                                                                                                                                                                  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                  | Badan Usaha                    |
| <b>13</b> | Layanan pemerintah pusat terkait dengan jaminan sosial                                             | SIKS-NG adalah aplikasi Data Kemiskinan yang dikelola oleh Pusdatin Kemensos                                                                                                                                                                                                                                                                  | DINAS SOSIAL                            | Masyarakat                     |

| ID | Nama Layanan                                                                               | Deskripsi Layanan                                                                                                                                                                                                                | OPD/Unit Pelaksana                                                 | Target Pengguna Layanan  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 14 | Layanan pencarian kerja untuk masyarakat Kab. Sidenreng Rappang                            | Sistem ini mempermudah dalam pencarian lowongan pekerjaan, pengurusan kartu pekerja, serta memberikan informasi seputar keberadaan industri kecil menengah dan perusahaan industri yang berada di wilayah Kab. Sidenreng Rappang | DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI | Masyarakat               |
| 15 | Layanan pendaftaran pasien rawat jalan                                                     | Aplikasi yang digunakan untuk masyarakat melakukan pendaftaran                                                                                                                                                                   | RSUD                                                               | Masyarakat               |
| 16 | Layanan Pengadaan Barang dan Jasa                                                          | Sarana/Layanan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing.                                                                                                                                                                 | SETDA Bagian Pengadaan Barang dan Jasa                             | Pelaku Usaha, Masyarakat |
| 17 | Layanan Penilaian Kinerja Penyedia Barang dan Jasa                                         | Sarana/Layanan untuk Menilai Kinerja Penyedia.                                                                                                                                                                                   | SETDA Bagian Pengadaan Barang dan Jasa                             | Pelaku Usaha, Masyarakat |
| 18 | Layanan pengawasan kinerja Organisasi dalam lingkungan pemerintahan Kab. Sidenreng Rappang | Aplikasi untuk monitoring dan evaluasi realisasi fisik dan keuangan                                                                                                                                                              | Inspektorat                                                        | Seluruh OPD              |
| 19 | Layanan penyediaan informasi terkait pembangunan daerah                                    | Membantu penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah, penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi pembangunan daerah secara elektronik yang pelaksanaannya oleh pemerintah daerah secara nasional.                   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  | Seluruh OPD, Masyarakat  |

| ID | Nama Layanan                                                                              | Deskripsi Layanan                                                                                                                                                                                                                   | OPD/Unit Pelaksana                                                | Target Pengguna Layanan          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 20 | Layanan penyediaan informasi terkait pembangunan daerah                                   | System yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengelola data pembangunan daerah                                                                                                                                          | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                 | Bakesbangpol                     |
| 21 | Layanan Perencanaan yang diberikan kepada OPD yang ada di lingkung Kab. Sidenreng Rappang | Membantu Pihak Bappeda dan SKPD dalam merumuskan rencana kerja sesuai dengan usulan yang ada dalam dokumen hasil Musrenbang. Membantu Bappeda dan SKPD dalam menyusun Indikator Kinerja yang terukur, sistematis dan berkelanjutan. | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Seluruh OPD                      |
| 22 | Layanan perizinan pembangunan gedung                                                      | Pengurusan Izin Bangunan Gedung                                                                                                                                                                                                     | DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT    | Masyarakat                       |
| 23 | Layanan Perpustakaan                                                                      | Untuk Peminjaman masih menggunakan Cara Konvensional yaitu meninggalkan KTP untuk meminjam buku sedangkan untuk baca di tempat hanya mengisi buku tamu                                                                              | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                                  | Masyarakat, Anggota Perpustakaan |
| 24 | Layanan supervisi pengawasan Kependidikan                                                 | Untuk memudahkan pengawas dalam proses supervisi dan pelayanan                                                                                                                                                                      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                   | Pengawas                         |
| 25 | Layanan terkait pengadaan barang dan jasa                                                 | Sarana/Layanan untuk Mengumumkan RUP.                                                                                                                                                                                               | SETDA Bagian Pengadaan Barang dan Jasa                            | Masyarakat                       |
| 26 | Layanan verifikasi dokumen pembuatan kartu keluarga                                       | Memverifikasi dokumen pembuatan akta sebelum dokumen di proses oleh instansi yang menangani tentang pencatatan Sipil                                                                                                                | Kecamatan                                                         | Masyarakat                       |

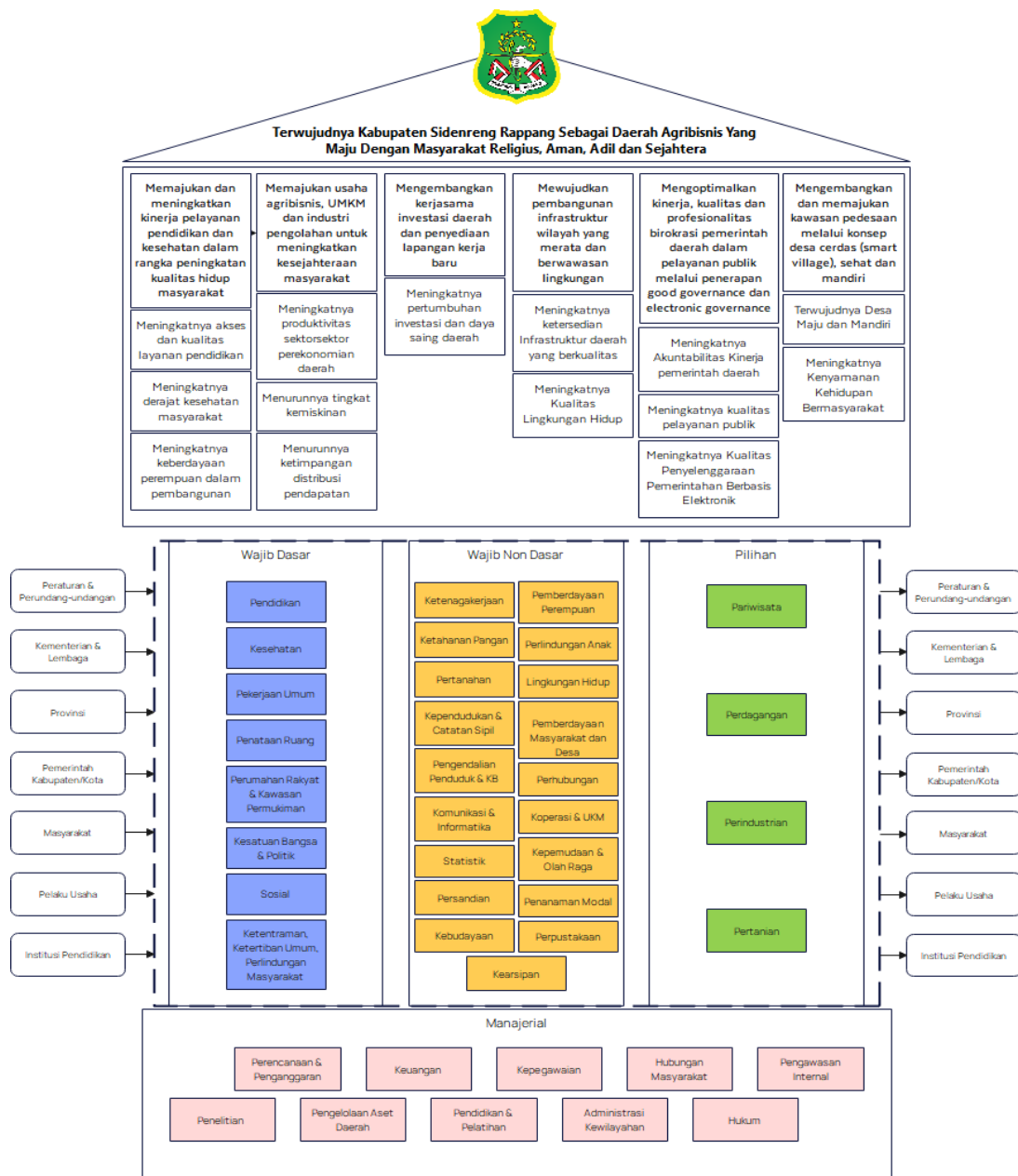
| ID | Nama Layanan                               | Deskripsi Layanan                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OPD/Unit Pelaksana               | Target Pengguna Layanan |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 27 | Layanan verifikasi dokumen pindah domisili | Memverifikasi surat pindah domisili yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan atau Desa                                                                                                                                                                                                                     | Kecamatan                        | Masyarakat              |
| 28 | OSS ( <i>Online Single Submission</i> )    | Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau <i>Online Single Submission</i> (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Masyarakat              |
| 29 | Pelayanan UKM                              | Pelayanan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan ke Masyarakat                                                                                                                                                                                                   | Puskesmas                        | Masyarakat              |

### 3.2. Proses Bisnis

Proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau menghasilkan suatu produk atau layanan tertentu.

Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut.

Secara umum, proses bisnis dalam pemerintahan daerah, sesuai dengan UU No. 23 tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah, terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan manajerial. Setiap proses bisnis yang ada dalam ketiga kelompok urusan tersebut menunjang tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang telah dicanangkan dalam RPJMD. Proses- proses bisnis yang dicakup oleh Pemda Kabupaten Sidenreng Rappang digambarkan sebagai berikut.



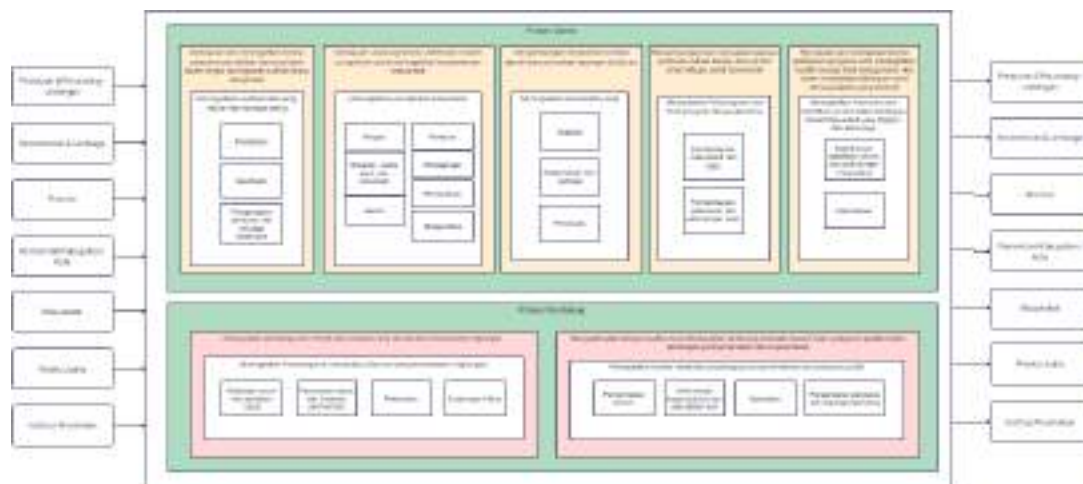
Gambar 3. Peta Proses Bisnis Urusan Pemerintahan

Sebagaimana gambar tersebut, terdapat sebanyak 43 proses bisnis yang terdiri dari 8 proses bisnis pada urusan wajib dasar, 19 proses bisnis pada urusan wajib non-dasar, 4 proses bisnis pada urusan pilihan, dan 12 proses bisnis pada urusan manajerial.

Dalam pengelompokan seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah ada 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1) Pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi.
- 2) Pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan di dalam instansi pemerintah.
- 3) Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut, maka gambaran peta proses bisnis Pemda Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagaimana pada gambar berikut.



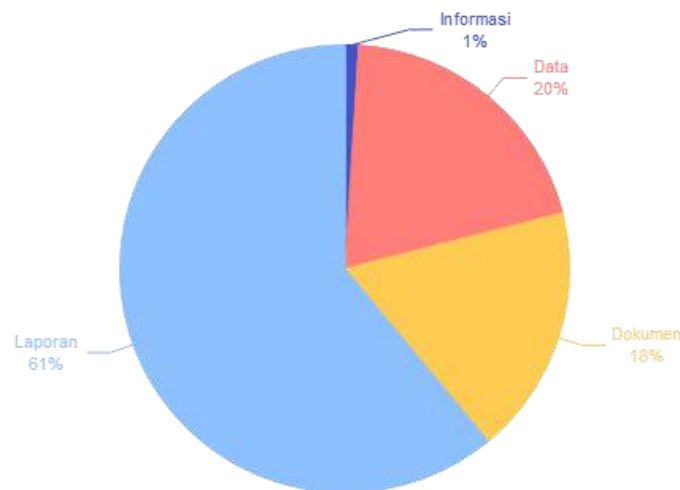
Gambar 4. Peta Proses Bisnis Pemda Sidenreng Rappang

Terlihat pada gambar di atas, proses-proses bisnis utama yang terdapat pada pilar (Gambar 3 1) yang dipetakan pada visi dan misi Kab. Sidenreng Rappang. Beberapa proses bisnis utama terlihat berperan pada beberapa tujuan. Contohnya, proses bisnis kependudukan dan catatan sipil berperan dalam tujuan ketiga dan tujuan ketujuh, dan proses bisnis ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat berperan dalam tiga tujuan, yaitu pada tujuan kedua, kelima, dan ketujuh. Hal

tersebut menunjukkan bahwa aliran data dan informasi yang sama diperlukan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tersebut. Selengkapnya metadata arsitektur proses bisnis di Kab. Sidenreng Rappang disajikan pada Lampiran 2.

### 3.3. Data dan Informasi

Hasil survei terhadap ke-29 OPD yang ada di Pemda Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa pemanfaatan data antar OPD belum secara optimal dilakukan. Hasil survei atas data dan informasi ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 5. Data dan Informasi yang didapatkan

Sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar tersebut, terlihat bahwa data yang non-structured, yaitu laporan adalah yang terbanyak disampaikan oleh OPD yaitu sebanyak 61% dan dokumen sebanyak 18%. Sementara data yang bersifat structured hanya sekitar 21%. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan OPD berfokus pada penyelesaian laporan dan dokumen dan belum secara optimal memanfaatkan data dan informasi yang seharusnya diampu oleh OPD lainnya. Selengkapnya metadata arsitektur data dan informasi di Pemda Sidenreng Rappang disajikan pada Lampiran 3.

### 3.4. Aplikasi

Aplikasi saat ini menjadi bagian dari sebagian besar layanan pemerintahan. Aplikasi menjadi alat bantu yang diharapkan meningkatkan efisiensi operasional suatu layanan. Berikut ini adalah daftar aplikasi yang digunakan oleh OPD di lingkungan Pemda Sidenreng Rappang.

| No. | Aplikasi                                       | Fungsi                                                                                                                                  | Pengelola Utama                                                    |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1   | Isikhnas                                       | Melakukan Vaksinasi kepada Hewan agar tercegah dari penyakit                                                                            | Dinas Peternakan dan Perikanan                                     |
| 2   | Identik PKH                                    | Pemasangan eartag pada hewan                                                                                                            | Dinas Peternakan dan Perikanan                                     |
| 3   | Bima krisna                                    | Aplikasi Sarana dan Prasarana                                                                                                           | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan |
| 4   | LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)     | Aplikasi pengaduan pengadaan barang dan jasa untuk petani                                                                               | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan |
| 5   | SIRUP (Sistem Informasi Reformasi Birokrasi)   | aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan |
| 6   | ArcGIS                                         | aplikasi yang digunakan untuk mengolah dan menampilkan peta-peta ke dalam bentuk 3D                                                     | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan |
| 7   | e-Reporting (Elektronik Reporting)             | Aplikasi Pelaporan dan Realisasi Kegiatan secara Elektronik (e-REPORTING)                                                               | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan |
| 8   | e-Proposal (Elektronik Proposal)               | sebuah aplikasi berbasis elektronik yang digunakan untuk mengajukan, mengelola, dan mengevaluasi proposal proyek atau program           | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan |
| 9   | e-Monev (Electronic Monitoring and Evaluation) | aplikasi yang mendukung pelaksanaan PP nomor 39 tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi                                            | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan |

| No. | Aplikasi                                                   | Fungsi                                                                                                                                                                               | Pengelola Utama                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     |                                                            | Pelaksanaan Rencana Pembangunan.                                                                                                                                                     |                                                                    |
| 10  | MPO (Manajemen Pelaporan Organisasi)                       | Aplikasi pelaporan online yang menampung pelaporan pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah (banpem) lingkup Ditjen PSP                                                               | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan |
| 11  | SIMULUHTANI (Sistem Informasi Manajemen Lahan Usaha Tani)  | aplikasi berisikan data Kelembagaan Penyuluhan, Ketenagaan Penyuluhan dan Kelembagaan Petani.                                                                                        | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan |
| 12  | e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)   | aplikasi yang digunakan kelompok tani dalam menyusun Rencana definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan pendampingan dari Penyuluh Pertanian di lokasi masing-masing                 | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan |
| 13  | INLIS(Integrated Library System)                           | perangkat lunak aplikasi otomasi perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpustnas sejak tahun 2011.                                                                       | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                   |
| 14  | SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) | aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik                                                               | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                   |
| 15  | e-Kinerja                                                  | Mempermudah melakukan penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP) para ASN secara elektronik;<br>Mempermudah melakukan penilaian prestasi kerja para ASN secara elektronik setiap tahun | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                   |
| 16  | Siroleg (Sistem Informasi Rokok Ilegal)                    | Aplikasi pendataan informasi tentang rokok ilegal                                                                                                                                    | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran                   |

| No. | Aplikasi                                                      | Fungsi                                                                                                                                                                                        | Pengelola Utama                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 17  | SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi)    | aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik                                                                        | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| 18  | SP2N (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) | layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik              | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| 19  | SIMDA (Sistem Informasi Manajemen barang milik daerah)        | sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya pengelolaan barang milik daerah termasuk masalah penggajian pegawai                                          | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| 20  | SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah)                    | merupakan salah satu tools penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan | Dinas Perhubungan                                |
| 21  | SIPBJ (Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa)            | Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa berbasis aplikasi yang dikelola oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah                                                           | Dinas Perhubungan                                |
| 22  | ARIP (Aplikasi Rekonsiliasi Iuran Pemda)                      | aplikasi bantu berbasis web untuk menghitung iuran JKN segmen Pekerja Penerima Upah                                                                                                           | Dinas Perhubungan                                |

| No. | Aplikasi                                                   | Fungsi                                                                                                                                                                                         | Pengelola Utama                     |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|     |                                                            | Pegawai Negeri (PPU PN) Daerah                                                                                                                                                                 |                                     |
| 23  | SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) | aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik                                                                         | Dinas Perhubungan                   |
| 24  | Sistem Informasi Pemeriksaan kendaraan bermotor            | Merupakan Sistem yang dibangun untuk menangani pendataan pembayaran pengujian kendaraan bermotor dalam aplikasi tersebut dapat menghitung otomatis Estimasi Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor | Dinas Perhubungan                   |
| 25  | OSS(Online Single Submission)                              | sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                     | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 26  | Si-Dagang                                                  | Merupakan sistem yang dibangun untuk menampilkan harga-harga di pasaran                                                                                                                        | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 27  | SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional)                | mekanisme untuk mempermudah dan mempercepat proses penyampaian data yang berasal dari dunia usaha kepada pemerintah                                                                            | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 28  | PTSP Halal (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)                  | memberikan layanan sertifikasi halal secara terintegrasi, efisien, dan terpadu kepada pelaku usaha yang menginginkan sertifikasi halal untuk produk atau jasanya                               | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 29  | DJIP HAKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)       | memfasilitasi proses terkait dengan                                                                                                                                                            | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |

| No. | Aplikasi                                           | Fungsi                                                                                                                                                                                        | Pengelola Utama                                                      |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                    | pengelolaan hak kekayaan intelektual, seperti paten, merek dagang, desain industri, hak cipta, dan perlindungan lainnya terhadap karya atau inovasi                                           |                                                                      |
| 30  | OSS(Online Single Submission)                      | sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                    | Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu               |
| 31  | SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) | merupakan portal perizinan penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Layak Fungsi, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung.                                                   | Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu               |
| 32  | SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah)         | merupakan salah satu tools penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan | Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu               |
| 33  | SiSkudes (Sistem Keuangan Desa)                    | merupakan aplikasi sederhana yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.                               | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak |

| No. | Aplikasi                               | Fungsi                                                                                                                                                                  | Pengelola Utama                                                      |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 34  | Konsolidasi APBD Desa tingkat pusat    | Merupakan sistem pelaporan mengenai APBD Desa                                                                                                                           | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak |
| 35  | Teman Desa                             | aplikasi yang dikembangkan untuk dapat menerima dan menyajikan Informasi Keuangan Daerah yang dikirim dari aplikasi pengelolaan keuangan daerah ke Pusat.               | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak |
| 36  | Sipades (Sistem Pengelolaan Aset Desa) | aplikasi perencanaan administrasi aset desa berbasis sistem informasi mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, penatausahaan sampai dengan penyajian laporan.           | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak |
| 37  | SGDS                                   | berguna untuk melakukan pembaharuan data IDM (Indeks Desa Membangun) dalam skala mikro, sehingga mampu menyajikan informasi yang lebih detail dan menyeluruh            | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak |
| 38  | IDM (Indeks Desa Membangun)            | Menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa;; Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.                                                           | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak |
| 39  | Prodeskel (Program Desa Kelurahan)     | memudahkan mengetahui karakteristik desa/kelurahan, mengukur status kemajuan desa/kelurahan (swadaya, swakarya, dan swasembada) dapat digunakan sebagai bahan kebijakan | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak |

| No. | Aplikasi                                   | Fungsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pengelola Utama                                                     |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 40  | Siap Kerja                                 | ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan, baik di pusat maupun di daerah.                                                                                                                                                           | Dinas Koperasi, UKM, ketenagakerjaan dan transmigrasi               |
| 41  | Karir Hub                                  | salah satu Layanan ketenagakerjaan pada Portal <a href="http://kemnaker.go.id">kemnaker.go.id</a> yang berhubungan dengan informasi lowongan pekerjaan. Layanan ini mempertemukan antara pemberi kerja perusahaan atau pemberi kerja individu dengan pencari kerja baik dalam negeri maupun luar negeri. | Dinas Koperasi, UKM, ketenagakerjaan dan transmigrasi               |
| 42  | ODS (Online Data Sistem)                   | sistem untuk pendataan koperasi agar data koperasi lebih akurat. Sesuai dengan Juknis PPKL bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi PPKL adalah melaksanakan pendataan koperasi/updating data/melengkapi data ODS Koperasi.                                                                               | Dinas Koperasi, UKM, ketenagakerjaan dan transmigrasi               |
| 43  | SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) | merupakan salah satu tools penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan                                                                                                            | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata ruang, Pertanahan dan Perumahan |

| No. | Aplikasi                                                        | Fungsi                                                                                                                                                                                                                                              | Pengelola Utama                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 44  | Om-SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran ) | aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.                                                                                        | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata ruang, Pertanahan dan Perumahan |
| 45  | KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran)  | merupakan aplikasi e-planning yang diinisiasi Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN RB                                                                                                                                 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata ruang, Pertanahan dan Perumahan |
| 46  | PBG/SIMBG                                                       | Aplikasi pelaporan izin bangunan                                                                                                                                                                                                                    | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata ruang, Pertanahan dan Perumahan |
| 47  | SPAN LAPOR                                                      | Aplikasi pengaduan dan pelaporan masyarakat                                                                                                                                                                                                         | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata ruang, Pertanahan dan Perumahan |
| 48  | Si-Baru                                                         | perwujudan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Direktorat Jenderal Perumahan yang dirancang untuk menyediakan sistem informasi tata kelola bantuan perumahan yang terpadu dan mendukung proses bisnis pengelolaan bantuan perumahan | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata ruang, Pertanahan dan Perumahan |
| 49  | e-RTLH                                                          | Pendataan rumah tidak layak huni yang akan diberikan bantuan bedah rumah                                                                                                                                                                            | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata ruang, Pertanahan dan Perumahan |
| 50  | SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah)                      | merupakan salah satu tools penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis                                                                                            | Badan Keuangan dan Aset Daerah                                      |

| No. | Aplikasi                                                      | Fungsi                                                                                                                                  | Pengelola Utama                     |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|     |                                                               | perencanaan pembangunan dan pemetaan                                                                                                    |                                     |
| 51  | Katupa (Aplikasi pengelolaan utang)                           | Aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan utang daerah                                                                                  | Badan Keuangan dan Aset Daerah      |
| 52  | SPPD                                                          | Aplikasi pengelolaan perjalanan dinas                                                                                                   | Badan Keuangan dan Aset Daerah      |
| 53  | Aplikasi BMD                                                  | sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya pengelolaan barang milik daerah.                       | Badan Keuangan dan Aset Daerah      |
| 54  | Aplikasi KASDA                                                | Aplikasi Pengelolaan kas daerah kabupaten sidrap                                                                                        | Badan Keuangan dan Aset Daerah      |
| 55  | INDRA (Indonesia Disaster Rapid Assessment)                   | melaporkan bencana yang terjadi di setiap wilayah secara cepat dan akurat.                                                              | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 56  | MAIPARK                                                       | Aplikasi yang digunakan untuk mendeteksi daerah yang beresiko dapat terjadi bencana alam                                                | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 57  | Sistem Informasi Penanggulangan Bencana Terpadu (SINDU)       | Aplikasi yang digunakan untuk pemenuhan informasi terkait penanggulangan bencana secara terpadu                                         | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 58  | e-Prologpal (Elektronik Proposal logistik dan pengadaan alat) | Aplikasi yang ditujukan untuk pengadaan logistik dan peralatan di lokasi bencana                                                        | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 59  | e-Proposal (Elektronik Proposal)                              | Aplikasi yang digunakan untuk pengadaan bantuan                                                                                         | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 60  | Siormas                                                       | Aplikasi pendataan terdaftar ormas                                                                                                      | Badan Kesbang dan Politik           |
| 61  | SIRUP (Sistem Informasi Reformasi Birokrasi)                  | aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP | Badan Kesbang dan Politik           |

| No. | Aplikasi                                                       | Fungsi                                                                                                                                                                                        | Pengelola Utama                 |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 62  | Sipantau (Pemantauan Pilpres, Pileg)                           | Aplikasi pementauan jalannya proses pilpres dan pileg                                                                                                                                         | Badan Kesbang dan Politik       |
| 63  | SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah)                     | merupakan salah satu tools penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan | Bagian Kerjasama                |
| 64  | SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah)                        | sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah                                                                                           | Bagian Kerjasama                |
| 65  | SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah)                     | merupakan salah satu tools penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| 66  | SIRUP (Sistem Informasi Reformasi Birokrasi)                   | aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP                                                       | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| 67  | Sistem Informasi Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (SIERA) | Perencanaan pengelolaan program serta mengintegrasikan aspek keuangan                                                                                                                         | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| 68  | SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)                      | Aplikasi pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan                                                                                                            | Bagian Umum dan Protokol        |

| No. | Aplikasi                                                   | Fungsi                                                                                                                                                                                        | Pengelola Utama          |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|     |                                                            | Barang/Jasa secara elektronik.                                                                                                                                                                |                          |
| 69  | SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah)                 | merupakan salah satu tools penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan | Bagian Umum dan Protokol |
| 70  | e-Monev (Electronic Monitoring and Evaluation)             | aplikasi yang mendukung pelaksanaan PP nomor 39 tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.                                                                 | Bagian Umum dan Protokol |
| 71  | SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) | aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik                                                                        | Bagian Umum dan Protokol |
| 72  | SITARA (Sistem Informasi Kepegawaian Terpadu)              | aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup Sekretariat Daerah                                                                                              | Bagian Umum dan Protokol |
| 73  | Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)             | aplikasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan data ASN secara nasional meliputi seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.                                            | Bagian Umum dan Protokol |
| 74  | e-Kinerja                                                  | Mempermudah melakukan penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP) para ASN secara elektronik;<br>Mempermudah melakukan penilaian prestasi kerja para ASN                                         | Bagian Umum dan Protokol |

| No. | Aplikasi                      | Fungsi                                                                                                                                              | Pengelola Utama          |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|     |                               | secara elektronik setiap tahun                                                                                                                      |                          |
| 75  | My SAPK                       | sistem aplikasi pelayanan kepegawaian BKN untuk memudahkan kegiatan administrasi para PNS seperti penginputan gaji, PNS, dan lain sebagainya.       | Bagian Umum dan Protokol |
| 76  | OSS(Online Single Submission) | sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko          | Dinas Lingkungan Hidup   |
| 77  | TAPERA                        | Aplikasi pengadaan Layanan bantuan Tabungan Perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil                                                                     | Dinas Lingkungan Hidup   |
| 78  | DJP Online                    | Layanan pelaporan pajak tahunan pegawai                                                                                                             | Dinas Lingkungan Hidup   |
| 79  | LHKPN                         | Aplikasi Layanan laporan mengenai harta kekayaan pejabat negara                                                                                     | Dinas Lingkungan Hidup   |
| 80  | My SAPK                       | sistem aplikasi pelayanan kepegawaian BKN untuk memudahkan kegiatan administrasi para PNS seperti penginputan gaji, PNS, dan lain sebagainya.       | Dinas Lingkungan Hidup   |
| 81  | SIPSN                         | sistem jejaring yang mengelola data yang bersumber dari beberapa data dasar yang terintegrasi menjadi sebuah kumpulan informasi Pengelolaan Sampah. | Dinas Lingkungan Hidup   |
| 82  | SRN                           | Aplikasi pendataan dan pelaporan mobilisasi dukungan dan atau aksi pengendalian perubahan iklim yang konsisten                                      | Dinas Lingkungan Hidup   |

| No. | Aplikasi                                                        | Fungsi                                                                                                                                                                                                                                   | Pengelola Utama                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 | dengan unsur-unsur data aksi pengendalian perubahan iklim yang terukur.                                                                                                                                                                  |                                                                   |
| 83  | SPECTRUM                                                        | Aplikasi Penghitungan data emisi gas rumah kaca                                                                                                                                                                                          | Dinas Lingkungan Hidup                                            |
| 84  | IKLH                                                            | Aplikasi Pendataan tentang indeks kualitas lingkungan hidup                                                                                                                                                                              | Dinas Lingkungan Hidup                                            |
| 85  | Om-SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran ) | aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.                                                                             | Dinas Lingkungan Hidup                                            |
| 86  | emonev                                                          | ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja dalam kurun waktu tiga bulan yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 87  | KRISNA(KOLABORASI PERENCANAAN DAN INFORMASI KINERJA ANGGARAN)   | dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.                               | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 88  | SIPD(Sistem Informasi Pembangunan Daerah)                       | penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis                                                                                                                                    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |

| No. | Aplikasi                   | Fungsi                                                                                                                                          | Pengelola Utama                                                   |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                            | perencanaan pembangunan dan pemetaan.                                                                                                           |                                                                   |
| 89  | Litbang                    |                                                                                                                                                 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 90  | Siks/ng                    | Pengelolaan bantuan warga miskin                                                                                                                | DINAS SOSIAL                                                      |
| 91  | edabu                      | Bantuan pembayaran bpjs                                                                                                                         | DINAS SOSIAL                                                      |
| 92  | SPAN LAPOR                 | Layanan pengaduan masyarakat                                                                                                                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                  |
| 93  | SIAPP                      | Layanan aspirasi DAERAH                                                                                                                         | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                  |
| 94  | PPID                       | PEJABATAN PENGELOLAAN APLIKASI PUBLIK                                                                                                           | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                  |
| 95  | ADUAN SPBE.SIDRAPKAB.CO.ID | LAYANAN ADUAN SPBE                                                                                                                              | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                  |
| 96  | SATU DATA                  | LAYANAN DATA KAB SIDRAP                                                                                                                         | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                  |
| 97  | SIDRAPKAB                  | LAYANAN INFORMASI                                                                                                                               | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                  |
| 98  | Premi                      | presensi guru menunjukkan waktu guru clock in (absen masuk) dan clock out (absen pulang) serta informasi detail seperti lokasi dan foto selfie. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                   |
| 99  | Pasti beraksi              | untuk mengatasi anak putus sekolah di Sulawesi Selatan                                                                                          | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                   |
| 100 | Simtun                     | aplikasi pengajuan tunjangan profesi guru                                                                                                       | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                   |
| 101 | simbar                     | aplikasi pembayaran tunjangan profesi guru                                                                                                      | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                   |
| 102 | sim antun                  | aplikasi aneka tunjangan profesi guru                                                                                                           | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                   |
| 103 | sim tendik                 | aplikasi data tenaga kependidikan sebagai dasar SK                                                                                              | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                   |
| 104 | verval SP                  | aplikasi verifikasi dan validasi data satuan Pendidikan                                                                                         | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                   |

| No. | Aplikasi        | Fungsi                                                                                                                                                       | Pengelola Utama                      |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 105 | verval ijazah   | aplikasi verifikasi dan validasi data ijazah                                                                                                                 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan      |
| 106 | verval PD       | aplikasi verifikasi dan validasi data peserta didik                                                                                                          | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan      |
| 107 | verval PTK      | aplikasi verifikasi dan validasi data pendidik dan tenaga kependidikan                                                                                       | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan      |
| 108 | Omspan          | memonitoring transaksi dalam SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web                                       | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan      |
| 109 | krisna          | aplikasi sinergi perencanaan anggaran kependidikan                                                                                                           | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan      |
| 110 | simdak          | aplikasi dana alokasi khusus kependidikan                                                                                                                    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan      |
| 111 | SIPD            | aplikasi data analisi perencanaan pembangunan dan pemetaan daerah                                                                                            | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan      |
| 112 | PBJ/LPSE        | aplikasi pembelian barang dan jasa                                                                                                                           | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan      |
| 113 | SIPBJ/Sipengaja | aplikasi pembelian barang dan jasa yang dikelola UKPBJ                                                                                                       | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan      |
| 114 | SIMPKB          | pemantauan dan evaluasi kinerja pegawai di berbagai instansi pemerintah di Indonesia                                                                         | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan      |
| 115 | dapodik         | memantau dan mengelola data pendidikan secara komprehensif, termasuk data siswa, data sekolah, data tenaga pendidik, dan berbagai informasi terkait lainnya. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan      |
| 116 | SIMPELAKU       | dinas kependudukan dan catatan sipil                                                                                                                         |                                      |
| 117 | E office        | mentransformasikan sistem korespondensi yang asalnya berbasis                                                                                                | dinas kependudukan dan catatan sipil |

| No. | Aplikasi                      | Fungsi                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pengelola Utama                                                |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                               | kertas menjadi berbasis elektronik.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |
| 118 | SIK TERPUSAT                  | menata Administrasi Kependudukan agar lebih tertib, dan database yang sebelumnya berada di daerah,                                                                                                                                                                                 | dinas kependudukan dan catatan sipil                           |
| 119 | PALEKKO                       | Layanan ini spesial untuk pencari keadilan yang berusia enam puluh enam tahun (Manula) keatas dan atau yang memakai kursi roda (difabel), diharapkan dengan adanya layanan ini dapat memudahkan pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang | dinas kependudukan dan catatan sipil                           |
| 120 | Inzting Sulsel                | aplikasi yang dibuat Pemkab Takalar, yang kemudian akan dimanfaatkan oleh seluruh kabupaten kota se Sulsel dalam pendataan dan penanganan kasus stunting                                                                                                                           | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 121 | INM (INDIKATOR NASIONAL MUTU) | untuk mengukur kepatuhan pemberi layanan kesehatan dalam kebersihan tangan, sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhannya agar dapat menjamin keselamatan pasien dengan cara mengurangi risiko infeksi yang terkait pelayanan kesehatan.                           | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 122 | SPM(Standar pelayanan minial) | ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang                                                                                                                                                                                                                             | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN                                 |

| No. | Aplikasi                             | Fungsi                                                                                                                                                                                                                                  | Pengelola Utama                                                |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                      | berhak diperoleh setiap warga secara minimal.                                                                                                                                                                                           | PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                |
| 123 | KOMDAT (komunikasi data) kesmas      | big data yang menampung data kesehatan masyarakat secara nyata dan akurat.                                                                                                                                                              | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 124 | KS(keluarga sehat)                   | aplikasi sistem informasi kesehatan daerah yang berlaku secara nasional yang menghubungkan- an secara online dan terintegrasi seluruh Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Di- nas Kesehatan Provinsi, dan Kementerian Kesehatan. | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 125 | Kansa                                |                                                                                                                                                                                                                                         | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 126 | eppgbm                               | sistem elektronik pencatatan Dan pelaporan Gizi berbasis masyarakat yang memuat data hasil pengukuran dan pelaporan gizi yang dientri setiap bulan oleh Pengelola Gizi di tiap- tiap Puskesmas.                                         | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 127 | Mpdn (maternal date pern notifikasi) | sistem pencatatan secara digital data kematian Maternal dan Perinatal                                                                                                                                                                   | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 128 | SITKO                                | setiap tingkat administrasi menghubungkan data dan informasi melalui sistem informasi ke program lain.                                                                                                                                  | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 129 | E monev tfu                          | CAPAIAN TFU YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR (IKL)                                                                                                                                                                              | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| No. | Aplikasi                  | Fungsi                                                                                                                                                                                                                                 | Pengelola Utama                                                |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 130 | E monev Hsp               | executor dalam memverifikasi TPP yang sudah berstatus MS dari hasil IKL yang dilakukan oleh puskesmas/wilker KKP, sebagai tindak lanjut dalam proses penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi pangan / sertifikat laik sehat (SLS). | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 131 | E monev stbm              | pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan.                                                                                                                         | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 132 | (SIPEKAM)<br>e-Monev PKAM | Upaya peningkatan pengawasan kualitas air minum aman berkelanjutan, untuk mendapatkan air minum yang aman sampai dengan tingkat Rumah Tangga,                                                                                          | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 133 | Sikelim                   | pengawasan dan pelaporan pengelolaan Limbah Medis dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SIKELIM                                                                                                                             | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 134 | Evaluasi.menpan.go.id     | sebuah platform yang dibuat untuk membantu organisasi dalam melakukan survei dan evaluasi terhadap kinerja dan kepuasan karyawan atau pelanggan.                                                                                       | Bagian organisasi                                              |
| 135 | SIMONA                    | aplikasi dari Kementrian dalam Negeri untuk melakukan monitoring pelaksanaan analisis jabatan, beban kerja, evaluasi jabatan, anggaran dan penerapan tambahan penghasilan                                                              | Bagian organisasi                                              |

| No. | Aplikasi         | Fungsi                                                                                                                                                                                                                                   | Pengelola Utama                          |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|     |                  | pegawai di pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Paser,                                                                                                                                                                        |                                          |
| 136 | SIPD Perencanaan | Perencanaan penyusunan Renstra dan Renja                                                                                                                                                                                                 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM |
| 137 | SIPD Keuangan    | Perencanaan laporan keuangan                                                                                                                                                                                                             | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM |
| 138 | SIMDA            | pengelolaan segala kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah.                                                                                                      | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM |
| 139 | EMONEV           | ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja dalam kurun waktu tiga bulan yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM |
| 140 | sismondak        | Sistem Monitoring Dana Alokasi Khusus Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan                                                                                                                                                               | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT              |
| 141 | sipjaki          | dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.                                                                              |                                          |
| 142 | simda            | Membantu pemerintah daerah untuk membangun dan menggunakan sistem informasi keuangan dan                                                                                                                                                 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT              |

| No.        | Aplikasi | Fungsi                                                                                                                                                                                                  | Pengelola Utama             |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|            |          | kinerja untuk tata kelola yang baik termasuk pengendalian transaksi dan informasi yang memadai.                                                                                                         |                             |
| <b>143</b> | SIPD     | merupakan salah satu tools penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan           | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| <b>144</b> | TEPRA    | kelanjutan Tim Evaluasi Penyerapan Anggaran (TEPA) yang dibentuk oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) pada pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II.         | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| <b>145</b> | Sispensi | Peraturan daerah terkait keuangan dan perencanaan                                                                                                                                                       | Bagian Hukum                |
| <b>146</b> | IPERDA   | Fasilitasi dan Konsultasi                                                                                                                                                                               | Bagian Hukum                |
| <b>147</b> | sipamase | aplikasi pemenuhan indikator penilaian SPBE.                                                                                                                                                            | Bagian Hukum                |
| <b>148</b> | Jdih     | suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum yang | Bagian Hukum                |

| No. | Aplikasi | Fungsi                                                                                                                                                                                                                                   | Pengelola Utama                                        |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|     |          | mudah, murah, cepat dan akurat.                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
| 149 | Emonev   | ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja dalam kurun waktu tiga bulan yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). | INSPEKTORAT                                            |
| 150 | SIPD     | merupakan salah satu tools penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan                                            |                                                        |
| 151 | Sijapti  | uatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan instansi pemerintah, mulai dari konsultasi, penyampaian dokumen rencana seleksi | Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia |
| 152 | sipintar | Sistem Informasi Program Indonesia Pintar dalam bentuk aplikasi mobile.                                                                                                                                                                  | Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia |
| 153 | sipandu  |                                                                                                                                                                                                                                          | Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia |

| No. | Aplikasi     | Fungsi                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pengelola Utama                                        |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 154 | Isrmempan    | Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
| 155 | Sakip review | sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. | Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia |
| 156 | Srikandi     | aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik                                                                                                                                                        | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                        |
| 157 | SIPD         | merupakan salah satu tools penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan                                                                                 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                        |
| 158 | TEPRA        | Aplikasi pengadaan Layanan bantuan Tabungan Perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil                                                                                                                                                                                               | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                        |
| 159 | LPSE         | unit kerja yang dibentuk untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia/Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan                                                                                                                                                  | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA                       |

| No. | Aplikasi    | Fungsi                                                                                                                                                                                                                                   | Pengelola Utama                  |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|     |             | pengadaan secara elektronik.                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| 160 | Srikandi    | aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik                                                                                                                   | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| 161 | SIPD        | merupakan salah satu tools penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan                                            | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| 162 | SIRUP       | Adalah sebuah layanan untuk pengadaan barang dan jasa                                                                                                                                                                                    | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| 163 | emonev      | ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja dalam kurun waktu tiga bulan yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). | BADAN PENDAPATAN DAERAH          |
| 164 | SIRUP       | Adalah sebuah layanan untuk pengadaan barang dan jasa                                                                                                                                                                                    | BADAN PENDAPATAN DAERAH          |
| 165 | Sakip reviu | sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan                                                                                      | BADAN PENDAPATAN DAERAH          |

| No. | Aplikasi                                                                | Fungsi                                                                                                                                                                                        | Pengelola Utama          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|     |                                                                         | akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.                                                                     |                          |
| 166 | SIPD                                                                    | merupakan salah satu tools penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan | BADAN PENDAPATAN DAERAH  |
| 167 | SISDMK                                                                  | adalah sistem terkait SDM kesehatan. SIDMK digunakan untuk mengetahui jumlah tenaga kesehatan di suatu wilayah.                                                                               | RUMAH SAKIT NENE'MALLOMO |
| 168 | RS online                                                               | RS online atau rumah sakit online merupakan konsep di mana layanan kesehatan disampaikan atau diakses melalui internet                                                                        | RUMAH SAKIT NENE'MALLOMO |
| 169 | siranap                                                                 | memuat informasi berkaitan dengan informasi data, ketersediaan tempat tidur isolasi, dan tempat tidur ICU Covid-19 di rumah sakit.                                                            | RUMAH SAKIT NENE'MALLOMO |
| 170 | sisrute                                                                 | Aplikasi SISRUTE merupakan sarana komunikasi proses rujukan yang dapat memberikan informasi rujukan pelayanan kesehatan perorangan                                                            | RUMAH SAKIT NENE'MALLOMO |
| 171 | <a href="https://rsudnenemallomo.com/">https://rsudnenemallomo.com/</a> | RUMAH SAKIT NENE'MALLOMO                                                                                                                                                                      |                          |

| No. | Aplikasi | Fungsi                                                                                                                                                                                       | Pengelola Utama          |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 172 | KESSAN   | proses evaluasi pelayanan FKRTL yang dilaksanakan melalui mekanisme survei untuk memperoleh umpan balik atau kesan pengalaman peserta JKN setelah menerima layanan dari fasilitas kesehatan. | RUMAH SAKIT NENE'MALLOMO |

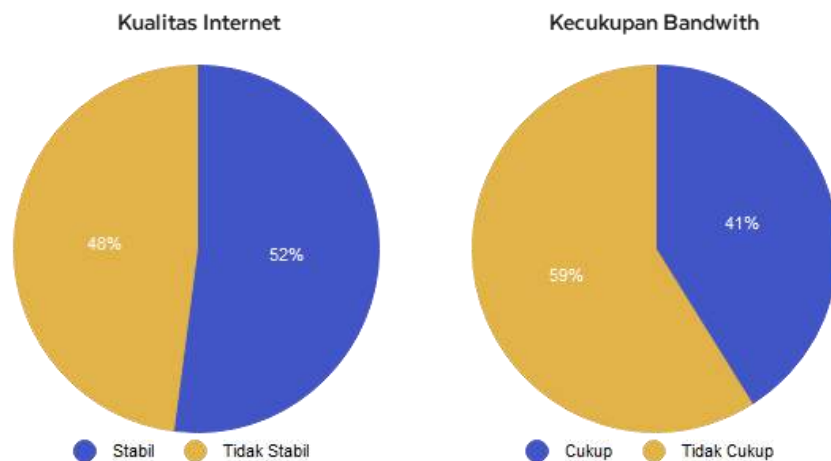
### 3.5. Infrastruktur TIK

Pemda Sidenreng Rappang telah membangun infrastruktur TIK dengan terkoneksi seluruh OPD yang ada melalui jaringan yang dikelola oleh Dinas Kominfo. Secara umum, dari sisi infrastruktur dasar, yaitu kelistrikan, tidak ditemukan isu yang signifikan, karena sebagian besar pemenuhan listrik dilaporkan stabil dan hanya mengalami pemadaman beberapa kali dalam setahun. Di sisi lain, dalam hal penyediaan Internet, sekitar 50% dari OPD melaporkan adanya ketidakstabilan dan ketidakcukupan bandwidth. Uraian hasil survei dan masing-masing unsur infrastruktur TIK dijelaskan pada sub bab berikut, dan selengkapnya metadata arsitektur infrastruktur TIK di Pemda Sidenreng Rappang disajikan pada Lampiran 5.

#### 3.5.1. Dukungan Infrastruktur Internet

Infrastruktur Internet menjadi infrastruktur dasar yang terpenting setelah listrik. Tanpa ketersediaan Internet yang cukup, maka proses operasional masing-masing OPD akan mengalami hambatan dan menjadi tidak optimal, karena pertukaran data, terutama dengan instansi pusat dan provinsi dilakukan melalui jalur Internet.

Hasil survei atas dukungan Internet di masing-masing OPD digambarkan sebagai berikut.



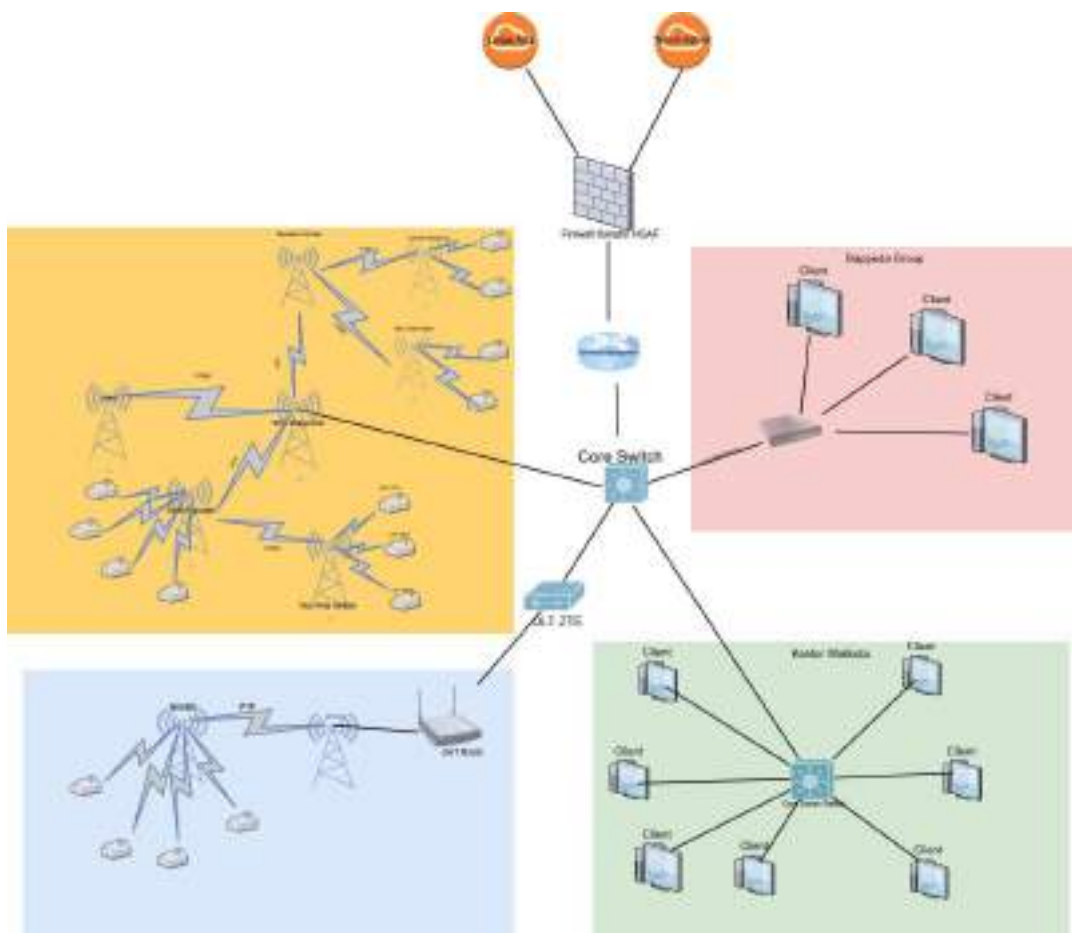
Gambar 6. Kondisi Internet

Hasil survei yang dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi internet menunjukkan bahwa sebanyak 48% OPD mengalami koneksi internet yang tidak stabil, dan sebanyak 59% melaporkan bahwa bandwidth yang mereka miliki kurang mencukupi.

### 3.5.2. Penyediaan Jaringan

Penyediaan jaringan antar OPD sudah terlihat cukup baik karena setiap OPD sudah terkoneksi dengan OPD lainnya. Jaringan fisik yang dikelola oleh Dinas Kominfo ini berupa kombinasi antara Fiber Optic (FO). Jaringan FO yang sudah tersedia masih terbatas antara Bappeda, kantor Bupati, Dinas Kominfo, dan RSUD.

Dari sisi koneksi Internet, Pemda Sidenreng Rappang menggunakan dua provider Internet dengan pola aktif-aktif. Dengan pola seperti ini, diharapkan terjadinya terputusnya koneksi Internet secara total dapat diminimalisasi.



Gambar 7. Topologi Jaringan

### 3.5.3. Jaringan Intra

Jaringan intranet yang menghubungkan setiap OPD yang ada di Kab. Sidenreng Rappang diimplementasikan dalam bentuk MAN (Metropolitan Area Network). Jaringan intra pemerintah merupakan program yang sangat strategis dalam membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik. Cakupan infrastruktur jaringan sangat mempengaruhi jangkauan layanan yang telah dibangun.

### 3.5.4. Sistem Penghubung Layanan

Beberapa aplikasi pemerintahan telah terintegrasi melalui API. Namun demikian Pemda Sidenreng Rappang belum menerapkan sistem penghubung layanan (SPL) sehingga integrasi yang terjadi adalah integrasi aplikasi yang bersifat peer-to-peer.

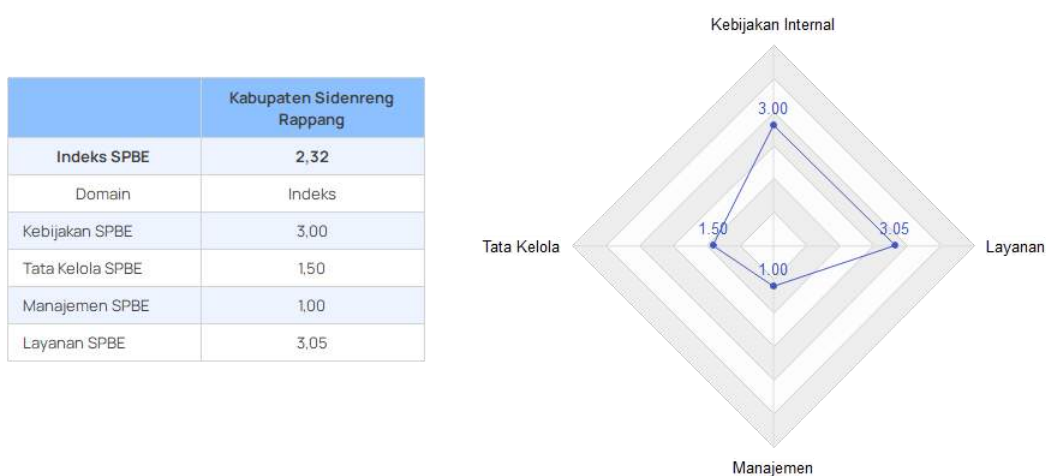
## 3.6. Keamanan TIK

Dari sisi keamanan TIK, Pemda Sidenreng Rappang telah menerapkannya dengan penempatan beberapa perangkat keamanan jaringan pada topologi jaringan. Perangkat tersebut antara lain firewall, monitoring dan pengatur lalu lintas jaringan, dan proxy. Selengkapnya metadata arsitektur keamanan TIK di Kab. Sidenreng Rappang disajikan pada Lampiran 6.

### 3.7. Pengelolaan dan Organisasi TIK

Kondisi berjalan pengelolaan dan organisasi TIK di Pemda Sidenreng Rappang dinilai dengan menggunakan Indeks SPBE.

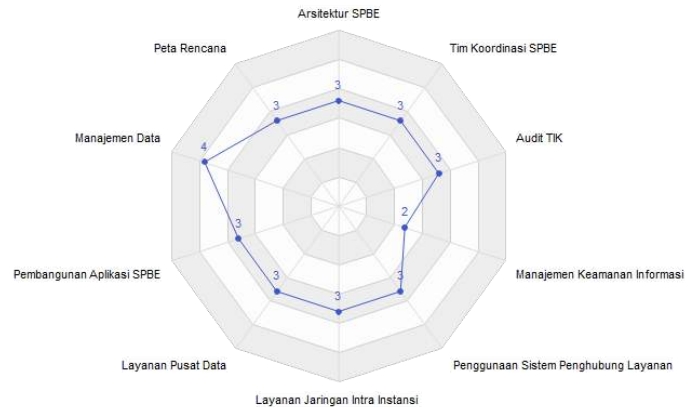
Secara keseluruhan, implementasi kebijakan internal, tata kelola TIK, manajemen SPBE, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE di lingkungan Pemda Sidenreng Rappang. Hasil evaluasi tahun 2022 menunjukkan pencapaian predikat **Cukup** (1,83) dalam penerapan SPBE. Hasil tersebut ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 8. Indeks SPBE Kab. Sidenreng Rappang

### 3.7.1. Domain Kebijakan Internal SPBE

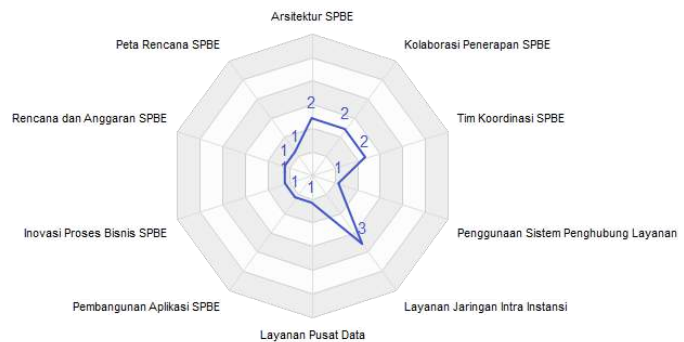
|                         | Kabupaten Sidenreng Rappang |
|-------------------------|-----------------------------|
| Domain Kebijakan        | 3,00                        |
| Aspek                   | Indeks                      |
| Kebijakan Internal SPBE | 3,00                        |



Gambar 9. Nilai Domain Kebijakan SPBE

### 3.7.2. Domain Tata Kelola SPBE

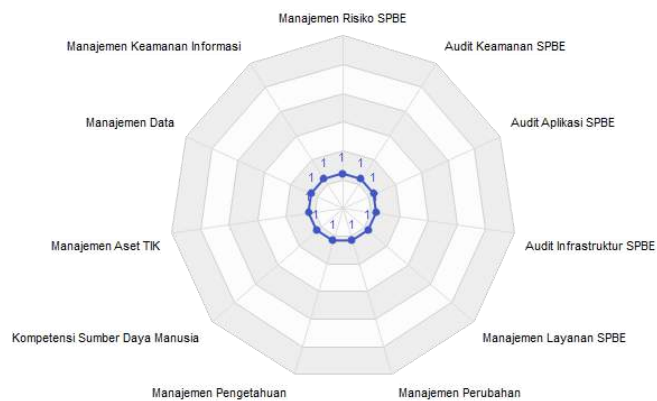
|                                    | Kabupaten Sidenreng Rappang |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Domain Tata Kelola SPBE            | 1,50                        |
| Aspek                              | Indeks                      |
| Perencanaan Strategis SPBE         | 1,25                        |
| Teknologi Informasi dan Komunikasi | 1,50                        |
| Penyelenggara SPBE                 | 2,00                        |



Gambar 10. Nilai Domain Tata Kelola SPBE

### 3.7.3. Domain Manajemen SPBE

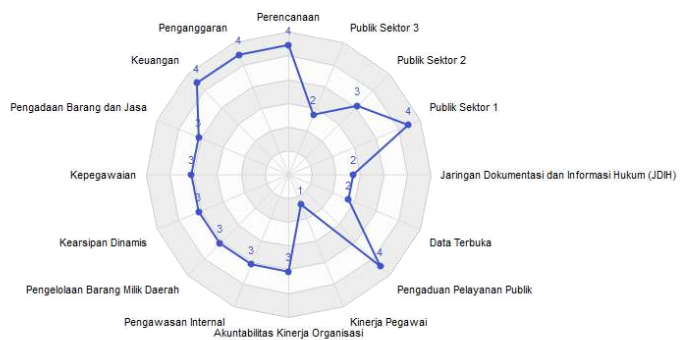
|                          | Kabupaten Sidenreng Rappang |
|--------------------------|-----------------------------|
| Domain Manajemen SPBE    | 1,00                        |
| Aspek                    | Indeks                      |
| Penerapan Manajemen SPBE | 1,00                        |
| Pelaksanaan Audit TIK    | 1,00                        |



Gambar 11. Nilai Domain Manajemen SPBE

### 3.7.4. Domain Layanan

|                                                       | Kabupaten Sidenreng Rappang |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Domain Layanan SPBE                                   | 3,05                        |
| Aspek                                                 | Indeks                      |
| Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik | 3,20                        |
| Layanan Publik Berbasis Elektronik                    | 2,85                        |



Gambar 12. Nilai Domain Layanan SPBE

Predikat indeks SPBE Pemda Sidenreng Rappang berada pada predikat kurang, pencapaian menuju predikat baik sangat membutuhkan usaha yang besar karena hanya terpaut nilai 0.77 menuju 2.60 untuk mencapai predikat baik. Keunggulan penerapan SPBE di Pemda Sidenreng Rappang adalah pada domain Layanan, terutama karena telah mengadopsi

beberapa aplikasi umum berbagi pakai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sementara itu, ketiga domain lainnya, yaitu kebijakan internal, tata kelola TIK, dan Manajemen SPBE, perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan.

## 4. Strategi Pengembangan SPBE

Penyusunan Arsitektur SPBE didasarkan pada strategi TIK yang diturunkan dari RPJMD. Dengan demikian, pengembangan dan penerapan strategi TIK yang ada pada Arsitektur SPBE dapat berjalan selaras dengan perkembangan kebutuhan pembangunan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

### 4.1. Strategi TIK berdasarkan Strategi RPJMD

Arsitektur SPBE Pemda Sidenreng Rappang disusun dengan melakukan analisis terhadap sasaran dan strategi yang telah dikategorikan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023. Penurunan sasaran dan strategi menjadi strategi TIK dilakukan agar dukungan TIK yang dibangun dipastikan membantu pencapaian sasaran RPJMD. Penurunan sasaran dan strategi menjadi sasaran strategi TIK ditunjukkan pada tabel berikut.

| Misi                                                                                                                            | Sasaran                                            | Strategi                                                                                                                                                   | Strategi/Solusi TIK                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Memajukan dan Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan dalam Rangka Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b> | Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan | Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, meningkatkan kualitas SDM dan pemerataan tenaga pendidik dan meningkatkan sarana dan prasarana Pendidikan; | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan infrastruktur Digital bagi Pendidikan</li> <li>• Pengembangan Dashboad terintegrasi</li> <li>• Pelatihan Digital bagi tenaga pendidik</li> </ul> |

|                                                                       |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                    | Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, menciptakan pemerataan tenaga kesehatan yang berkualitas diiringi dengan penerapan pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Infrastruktur Digital pada layanan Kesehatan</li> <li>• Pengembangan database Kesehatan masyarakat</li> <li>• Pengembangan layanan Kesehatan berbasis digital</li> </ul> |
|                                                                       | Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan         | Meningkatkan peran kelembagaan PUG dan forum anak, menyebarluaskan informasi kesetaraan gender dan urgensi perlindungan perempuan dan anak, serta meningkatkan keberdayaan perempuan dalam perekonomian                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan digital bagi perempuan</li> <li>• Pengembangan Creative Hub bagi anak dan perempuan</li> </ul>                                                                              |
| <b>Memajukan Usaha Agribisnis, UMKM dan Industri Pengolahan untuk</b> | Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah | Meningkatkan daya saing produk pertanian terpadu berbasis petik, olah, kemas dan jual disertai dengan penguatan kelembagaan pelaku                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan inklusi digital di sector ekonomi</li> <li>• Peningkatan literasi e-commerce</li> </ul>                                                                                  |

|                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</b>                                              |                                                                 | utama dan pelaku usaha serta pemenuhan sarana dan prasarana pertanian                                                                                          |                                                                                                                                         |
|                                                                                           | Menurunnya tingkat kemiskinan                                   | Meningkatkan keterpenuhan hak dasar dan                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan data kemiskinan berbasis digital</li> <li>• Pelatihan Literasi Digital</li> </ul> |
|                                                                                           | Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan                    | keberdayaan penduduk miskin serta meningkatkan pendapatan kelompok penduduk terbawah dengan memperluas skema perlindungan dan bantuan sosial                   |                                                                                                                                         |
| <b>Mengembangkan Kerjasama Investasi Daerah dan Penyediaan Lapangan Kerja Baru</b>        | Meningkatnya pertumbuhan investasi dan daya saing daerah        | Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan investasi serta daya saing pariwisata                                                                               | Pengembangan Layanan Investasi dan Perizinan Usaha berbasis Digital                                                                     |
| <b>Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan berwawasan Lingkungan</b> | Meningkatnya ketersediaan infrastruktur daerah yang berkualitas | Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan Infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, serta permukiman dan perumahan dengan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan | Pengembangan Dashboard Pembangunan Daerah                                                                                               |
|                                                                                           | Meningkatnya kualitas                                           | Memelihara daya dukung dan daya                                                                                                                                |                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                            | lingkungan hidup                                                       | tampung lingkungan serta meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana                                                         |                                                                                                                                 |
| <b>Mengoptimalkan Kinerja, Kualitas dan Profesionalitas Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik Melalui Penerapan Good Governance dan Electronic Government</b> | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah                   | Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur, penataan kelembagaan, serta meningkatkan sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah | Pengembangan TIK berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)                                                        |
|                                                                                                                                                                            | Meningkatnya kualitas pelayanan publik                                 | Meningkatkan kualitas SDM dalam pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan publik serta pengembangan inovasi daerah                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengukuran Tingkat Kompetensi Digital Aparatur</li> <li>• Pelatihan Digital</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                            | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik | Meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintahan                                                        | Pengembangan Arsitektur SPBE                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mengembangkan Dan Memajukan Kawasan Pedesaan Melalui Konsep Desa Cerdas (Smart Village), Sehat Dan Mandiri</b>                                                                        | Terwujudnya desa maju dan mandiri               | Meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan Digital bagi masyarakat Desa</li> <li>• Inklusi Digital Desa di Sektor Ekonomi</li> </ul> |
| <b>Memajukan dan Menciptakan Kondisi Kehidupan Beragama Serta Meningkatkan Kualitas Budaya Lokal Sebagai Basis Nilai Dalam Menciptakan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif</b> | Meningkatnya kenyamanan kehidupan bermasyarakat | Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum melalui pengawasan, pengendalian disertai dengan pendekatan sosial kemasyarakatan |                                                                                                                                              |

#### 4.2. Penguatan Layanan SPBE dalam rangka Pengembangan Layanan Publik

Sistem informasi yang bersifat sektoral dalam berbagai platform teknologi generasi lama menggunakan berbagai macam arsitektur perangkat keras dan aplikasi. Sistem informasi generasi lama ini masing-masing memiliki model dan struktur data tersendiri tanpa mempertimbangkan integrasi dengan aplikasi-aplikasi lainnya yang sebetulnya terkait secara proses bisnis. Aplikasi-aplikasi seperti ini biasanya diadakan atau dibangun secara reaktif untuk sekedar memenuhi permintaan pemrosesan data atau informasi di suatu lingkungan satuan

kerja yang terbatas. Aplikasi-aplikasi yang dibangun reaktif seperti ini sulit berintegrasi dengan baik aplikasi lain yang terkait, sehingga tidak dapat mendukung kebutuhan analisis data dan informasi untuk para pengambil kebijakan. Hal ini juga menimbulkan risiko ketidakberlanjutan atau berkelanjutan dengan biaya tinggi dan meningkat. Keterbatasan sistem menciptakan ekstra usaha dan waktu untuk menghasilkan data yang diinginkan. Hal ini juga mengakibatkan peningkatan risiko kerentanan keamanan secara eksponensial. Banyak sistem semacam ini yang bahkan tidak memiliki dukungan vendor. Selanjutnya, sistem ini tidak dapat diintegrasikan dengan persyaratan yang dimandatkan di masa depan dan merupakan penghalang bagi transformasi layanan dan peluang efisiensi layanan pemerintahan.

Untuk melakukan penguatan integrasi data, strategi pengembangan SPBE di Kabupaten Sidenreng Rappang disarankan untuk mengadopsi platform sistem informasi pemerintahan untuk membangun portofolio sistem informasi modern yang terutama mendukung proses-proses bisnis spesifik yang dilaksanakan dalam lingkup Pemda Sidenreng Rappang. Adopsi platform ini akan meminimalisasi risiko terbangunnya sistem dengan pendekatan masa lalu yang terkotak-kotak yang memiliki risiko tinggi dalam kegagalan sistem, ketidakakuratan data, dan gangguan operasional. Inisiatif platform ini akan memberikan potensi untuk menyederhanakan operasi administratif, meningkatkan penggunaan informasi untuk pelaporan dan analisis, mengurangi sistem dan proses yang tumpang tindih, mengurangi biaya pengembangan aplikasi, dan membantu transformasi dan standardisasi proses keuangan dan sumber daya manusia.

Adopsi platform sistem informasi pemerintahan diharapkan dapat:

- menciptakan platform solusi berskala enterprise yang dapat berkontribusi dalam mengoptimalkan pengelolaan sistem;
- memungkinkan lingkungan yang fleksibel di mana data dan informasi lebih mudah diakses dari lokasi manapun;

- menyediakan platform integrasi dan interoperabilitas antar aplikasi dan memudahkan aplikasi yang lebih baru untuk bertukar data dengan aplikasi yang telah dibangun sebelumnya;
- meminimalisasi jumlah aplikasi stand-alone yang terkotak-kotak di masing-masing OPD tanpa adanya integrasi dengan aplikasi lainnya di OPD lainnya.
- memudahkan pengambilan data, menyediakan definisi data yang lebih baik untuk analisis serta pengelolaan data, dan menjaga integritas dan keamanan sehingga meningkatkan kualitas dan aksesibilitas informasi untuk dukungan keputusan;
- memfasilitasi best practice terbaik yang terintegrasi dan terkini;
- meningkatkan dan memperbaiki fungsionalitas back office;
- mengurangi entri dan pemrosesan data berulang, penggunaan media penyimpanan, dan penggunaan kertas yang berlebihan.

Sementara itu, untuk kegiatan manajerial, seperti perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, pengadaan, dan aplikasi administratif terkait lainnya disarankan untuk segera mengadopsi aplikasi umum berbagi pakai yang sudah disarankan oleh Kementerian PANRB. Dengan demikian, sebagian besar pengembangan sistem informasi di lingkungan Pemda Sidenreng Rappang menjadi lebih berfokus pada sistem-sistem informasi yang menjadi kebutuhan spesifik dalam mengakselerasi pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Inisiatif adopsi platform sistem informasi pemerintahan dan adopsi aplikasi umum berbagi pakai ini diharapkan dapat dimulai di awal dimulainya program-program TIK yang tercantum dalam Arsitektur SPBE ini.

## **5. Target Arsitektur**

Arsitektur SPBE yang akan dibangun dan dikembangkan sudah semestinya selaras dengan RPJMD dan strategi TIK, sehingga memenuhi kebutuhan proses bisnis dan harapan dari para pemangku kepentingan, dan sekaligus meminimalisasi permasalahan yang ada. Oleh karena itu, arsitektur SPBE diturunkan dan diidentifikasi dari strategi TIK, proses

bisnis, dan kebutuhan dan permasalahan yang ditemukan dalam tahap assessment.

Sebagaimana yang telah menjadi arahan Kementerian PANRB melalui SE Menpan RB No. 18/2022, arsitektur SPBE terdiri dari enam arsitektur, yaitu layanan, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur TIK, dan keamanan TIK. Selain dari itu, ditambahkan arsitektur tersendiri khusus untuk tata kelola TIK untuk memastikan bahwa keenam arsitektur tersebut dikelola dengan baik dan tetap selaras dengan strategi pembangunan Pemda Sidenreng Rappang.

### **5.1. Layanan**

Layanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

#### **5.1.1. Prinsip-prinsip Layanan**

Mengacu pada PP 96/2012, prinsip-prinsip layanan adalah:

- 1) Keterpaduan, yaitu bahwa suatu layanan harus dapat diintegrasikan dengan layanan lainnya dan dapat diselesaikan dalam satu sistem.
- 2) Ekonomis, yaitu layanan yang diselenggarakan tidak menimbulkan biaya tinggi.
- 3) Koordinasi, yaitu bahwa seluruh layanan yang diselenggarakan harus dikelola secara terpadu dan terkoordinasi dengan misi yang sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
- 4) Pendelegasian & pelimpahan wewenang, yaitu melaksanakan suatu layanan harus berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang atau penugasan dari instansi induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5) Akuntabilitas, yaitu bahwa penyelenggaraan suatu layanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 6) Aksesibilitas, yaitu bahwa suatu layanan harus mudah diakses oleh target layanan, baik masyarakat, pelaku usaha, instansi pemerintah lainnya, dsb.

Penerapan TIK pada layanan haruslah bertujuan untuk membantu memenuhi setiap prinsip layanan tersebut.

#### 5.1.2. Target Arsitektur Layanan

Target arsitektur layanan Kabupaten Sidenreng Rappang diadopsi dari SE Menteri PANRB No. 18/2022, dengan beberapa penyesuaian, terutama untuk layanan yang terkait dengan wewenang Pusat dan Provinsi yang disesuaikan dengan kewenangan Kabupaten/Kota. Berikut adalah target arsitektur layanan.

Tabel 2. Target Prioritas Arsitektur Layanan

| Kebijakan                   | Domain Arsitektur Layanan SPBE                    | Deskripsi Layanan SPBE                                                                                                                                  | Referensi Arsitektur Layanan SPBE                    | Kode Domain Arsitektur Terkait |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Ekonomi dan Industri</b> | [DAL01] Layanan                                   | Layanan terkait perizinan                                                                                                                               | [01] Layanan Publik [01.05] Industri                 | [DAB01] [DAD01]                |
|                             | [DAL02] Layanan Perizinan Sektor Pertanian        | Layanan terkait perizinan pengelolaan sarana dan prasarana pertanian, pengelolaan pembiayaan pertanian, dan Komoditas Pertanian, Perkebunan, Peternakan | [01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi | [DAB02] [DAD02] [DAA01]        |
|                             | [DAL04] Layanan Perizinan Sektor Lingkungan Hidup | Layanan terkait perizinan sektor lingkungan hidup                                                                                                       | [01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi | [DAB04] [DAD04] [DAA01]        |
|                             | [DAL05] Layanan Perizinan Sektor Pekerjaan Umum   | Layanan terkait perizinan bangunan gedung, pemanfaatan badan jalan,                                                                                     | [01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi | [DAB05] [DAD05] [DAA01]        |
|                             |                                                   |                                                                                                                                                         |                                                      |                                |

| Kebijakan | Domain<br>Arsitektur<br>Layanan<br>SPBE              | Deskripsi<br>Layanan SPBE                                                                                                                                                                                | Referensi<br>Arsitektur<br>Layanan<br>SPBE           | Kode<br>Domain<br>Arsitektur<br>Terkait |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|           |                                                      | dan penggunaan air baku                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                         |
|           | [DAL06]<br>Layanan Perizinan Sektor Perumahan Rakyat | Layanan terkait perizinan pembangunan perumahan rakyat                                                                                                                                                   | [01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi | [DAB06]<br>[DAD06]<br>[DAA01]           |
|           | [DAL07]<br>Layanan Perizinan Sektor Pendidikan       | Layanan terkait perizinan penyelenggaraan pendidikan nasional tingkat Pendidikan Usia Dini dan Sekolah Dasar dan Kurikulum Pendidikan keagamaan                                                          | [01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi | [DAB07]<br>[DAD07]<br>[DAA01]           |
|           | [DAL10]<br>Layanan Perizinan Sektor Kesehatan        | Layanan terkait perizinan pengelolaan kefarmasian (Apotek, Toko Obat), pengelolaan alat Kesehatan (, pengelolaan fasilitas Kesehatan (RS kelas C dan D), pengelolaan layanan kesehatan, obat dan makanan | [01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi | [DAB10]<br>[DAD10]<br>[DAA01]           |
|           | [DAL11]<br>Layanan Perizinan Sektor Perdagangan      | Layanan terkait perizinan pengawasan pasar daerah, ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi perdagangan daerah, ekspor non migas, dan usaha perdagangan,                               | [01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi | [DAB11]<br>[DAD11]<br>[DAA01]           |

| Kebijakan                           | Domain<br>Arsitektur<br>Layanan<br>SPBE                                | Deskripsi<br>Layanan SPBE                                                                                                                                                                                                                                | Referensi<br>Arsitektur<br>Layanan<br>SPBE                       | Kode<br>Domain<br>Arsitektur<br>Terkait |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                     | [DAL12]<br>Layanan<br>Perizinan<br>Sektor UMKM                         | Layanan terkait<br>perizinan<br>penyelenggaraan<br>usaha mikro,<br>kecil, dan<br>menengah                                                                                                                                                                | [01] Layanan<br>Publik<br>[01.16]<br>Perizinan dan<br>Akreditasi | [DAB12]<br>[DAD12]<br>[DAA01]           |
|                                     | [DAL13]<br>Layanan<br>Perizinan<br>Sektor<br>Informasi                 | Layanan terkait<br>perizinan sistem<br>informatika                                                                                                                                                                                                       | [01] Layanan<br>Publik<br>[01.16]<br>Perizinan dan<br>Akreditasi | [DAB13]<br>[DAD13]<br>[DAA01]           |
|                                     | [DAL16]<br>Layanan<br>Perizinan<br>Sektor<br>Pariwisata                | Layanan terkait<br>perizinan<br>tempat wisata<br>dan<br>penyelenggaraan<br>pariwisata                                                                                                                                                                    | [01] Layanan<br>Publik<br>[01.16]<br>Perizinan dan<br>Akreditasi | [DAB16]<br>[DAD16]<br>[DAA01]           |
| <b>Pembangunan<br/>Kewillayahan</b> | [DAL18]<br>Layanan<br>Pemantauan<br>Pembangunan<br>Pekerjaan<br>Umum   | Layanan terkait<br>pemantauan<br>pembangunan<br>pekerjaan<br>umum                                                                                                                                                                                        | [01] Layanan<br>Publik<br>[01.17]<br>Pekerjaan<br>Umum           | [DAB18]<br>[DAD18]<br>[DAA02]           |
|                                     | [DAL19]<br>Layanan<br>Pemantauan<br>Pembangunan<br>Perumahan<br>Rakyat | Layanan terkait<br>pemantauan<br>pembangunan<br>perumahan<br>rakyat                                                                                                                                                                                      | [01] Layanan<br>Publik<br>[01.41]<br>Perumahan                   | [DAB19]<br>[DAD19]<br>[DAA02]           |
| <b>Kesehatan</b>                    | [DAL20]<br>Layanan<br>Kesehatan<br>Terpadu                             | Layanan terkait<br>layanan<br>telemedicine,<br>digitalisasi<br>rekam medis,<br>penyelenggaraan<br>sistem rujukan<br>online, rekam<br>medis online,<br>dan sistem<br>personal health<br>care di Fasilitas<br>Kesehatan di<br>Daerah (RS<br>Kelas C dan D) | [01] Layanan<br>Publik<br>[01.25]<br>Kesehatan                   | [DAB20]<br>[DAD20]<br>[DAA03]           |
| <b>Sosial</b>                       | [DAL21]<br>Layanan                                                     | Layanan terkait<br>bantuan sosial<br>dan layanan<br>data penerima<br>bantuan sosial<br>di daerah                                                                                                                                                         | [01] Layanan<br>Publik<br>[01.26] Sosial                         | [DAB21]<br>[DAD21]<br>[DAA04]           |

| Kebijakan                | Domain<br>Arsitektur<br>Layanan<br>SPBE            | Deskripsi<br>Layanan SPBE                                                                                                     | Referensi<br>Arsitektur<br>Layanan<br>SPBE                                         | Kode<br>Domain<br>Arsitektur<br>Terkait |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                          | Bantuan Sosial Terintegrasi                        | kesejahteraan sosial yang terpadu                                                                                             |                                                                                    |                                         |
|                          | [DAL22]<br>Layanan Bantuan Pendidikan Terintegrasi | Layanan terkait bantuan bantuan Pendidikan untuk Pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar                                  | [01] Layanan Publik<br>[01.26] Sosial                                              | [DAB22]<br>[DAD22]<br>[DAA04]           |
|                          | [DAL24]<br>Layanan Bantuan Kesehatan Terintegrasi  | Layanan terkait bantuan kesehatan                                                                                             | [01] Layanan Publik<br>[01.26] Sosial                                              | [DAB24]<br>[DAD24]<br>[DAA04]           |
| <b>Pendidikan</b>        | [DAL27]<br>Layanan Pendidikan                      | layanan pendidikan dan layanan penyediaan konten digital untuk Pendidikan dasar dan anak usia dini                            | [01] Layanan Publik<br>[01.31] Pendidikan                                          | [DAB27]<br>[DAD27]<br>[DAA07]           |
| <b>Pemerintahan Umum</b> | [DAL28]<br>Layanan Administrasi Pemerintahan       | Layanan terkait perencanaan pembangunan Daerah                                                                                | [02] Layanan Administrasi Pemerintahan<br>[02.03] Perencanaan Pembangunan Nasional | [DAB30]<br>[DAD30]<br>[DAA08]           |
|                          |                                                    | Layanan terkait penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik Daerah, dan layanan keuangan daerah lainnya | [02] Layanan Administrasi Pemerintahan<br>[02.02] Keuangan                         | [DAB29]<br>[DAD29]<br>[DAA08]           |
|                          |                                                    | Layanan terkait akuntabilitas kinerja                                                                                         | [02] Layanan Administrasi Pemerintahan<br>[02.07] Akuntabilitas Kinerja            | [DAB31]<br>[DAD31]<br>[DAA08]           |

| Kebijakan                  | Domain<br>Arsitektur<br>Layanan<br>SPBE    | Deskripsi<br>Layanan SPBE                                                                                                | Referensi<br>Arsitektur<br>Layanan<br>SPBE                                     | Kode<br>Domain<br>Arsitektur<br>Terkait |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                            |                                            | Layanan terkait kearsipan, kepegawaian, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan administrasi pemerintahan lainnya | [02] Layanan Administrasi Pemerintahan [02.04] Aparatur Negara                 | [DAB31]<br>[DAD31]<br>[DAA08]           |
| <b>Satu Data Indonesia</b> | [DAL29] Layanan Portal Satu Data Indonesia | Layanan terkait manajemen data statistik, data keuangan Daerah, dan data geospasial                                      | [02] Layanan Administrasi Pemerintahan [02.09] Data dan Informasi Pemerintahan | [DAB32-34]<br>[DAD32-34]<br>[DAA09]     |

## 5.2. Proses Bisnis

Sebagaimana hasil penilaian Indeks SPBE, Pemda Sidenreng Rappang belum memiliki peta proses bisnis yang bersifat formal. Peta proses bisnis ini penting untuk memudahkan pengembangan aplikasi pendukungnya ke depannya. Dengan adanya peta proses bisnis, pengembang aplikasi dapat mengidentifikasi dengan lebih cepat titik-titik integrasi yang diperlukan untuk dibangun.

### 5.2.1. Prinsip-prinsip Proses Bisnis

Selain prinsip-prinsip pemetaan proses bisnis sebagaimana yang tercantum pada Permen PANRB No. 19/2018, beberapa prinsip proses bisnis umum berikut perlu diperhatikan:

- 1) Proses bisnis harus disusun secara holistik, dari hulu ke hilir.
- 2) Proses bisnis harus dapat menunjukkan interaksi antara organisasi dengan para pemangku kepentingannya.
- 3) Proses bisnis perlu mempertimbangkan adopsi TIK untuk memangkas panjang proses sekaligus mendorong inovasi.
- 4) Tidak semua proses dalam rangkaian proses bisnis harus diotomasi.

### 5.2.2. Target Arsitektur Proses Bisnis

Berikut ini adalah target arsitektur proses bisnis Kabupaten Sidenreng Rappang akan akan diimplementasikan dalam lima tahun ke depan.

| Kebijakan                   | Domain Arsitektur Proses Bisnis                    | Deskripsi Proses Bisnis                                                                                                                                       | Referensi Arsitektur Proses Bisnis                            | Kode Domain Arsitektur Terkait |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Ekonomi dan Industri</b> | [DAB02]<br>Perizinan Sektor Pertanian              | Proses bisnis terkait perizinan pengelolaan sarana dan prasarana pertanian, pengelolaan pembiayaan pertanian, dan Komoditas Pertanian, Perkebunan, Peternakan | [02] Ekonomi dan Industri [02.03] Pertanian                   | [DAD02]<br>[DAL02]             |
|                             | [DAB04]<br>Perizinan Sektor Lingkungan Hidup       | Proses bisnis terkait sektor lingkungan hidup                                                                                                                 | [07] Lingkungan dan Sumber Daya Alam [07.05] Lingkungan Hidup | [DAD04]<br>[DAL04]             |
|                             | [DAB05]<br>Perizinan Sektor Pekerjaan Umum         | Proses bisnis terkait perizinan bangunan gedung, pemanfaatan badan jalan, dan penggunaan air baku                                                             | [03] Pembangunan Kewilayahan [03.01] Pekerjaan Umum           | [DAD05]<br>[DAL05]             |
|                             | [DAB06]<br>Perizinan Sektor Perumahan Rakyat       | Proses bisnis terkait perizinan pembangunan perumahan rakyat                                                                                                  | [03] Pembangunan Kewilayahan [03.04] Perumahan                | [DAD06]<br>[DAL06]             |
|                             | [DAB07]<br>Perizinan Sektor Pendidikan             | Proses bisnis terkait perizinan penyelenggaraan Pendidikan dasar dan Pendidikan dini dan Kurikulum keagamaan                                                  | [06] Pendidikan dan Tenaga Kerja [06.01] Pendidikan           | [DAD07]<br>[DAL07]             |
|                             | [DAB09]<br>Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan | Proses bisnis terkait perizinan usaha perikanan budidaya                                                                                                      | [02] Ekonomi dan Industri [02.06] Perikanan                   | [DAD09]<br>[DAL09]             |
|                             |                                                    |                                                                                                                                                               |                                                               |                                |

| Kebijakan | Domain<br>Arsitektur<br>Proses Bisnis                         | Deskripsi<br>Proses Bisnis                                                                                                                                                                                                                 | Referensi<br>Arsitektur<br>Proses Bisnis                                | Kode<br>Domain<br>Arsitektur<br>Terkait |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|           | [DAB10]<br>Perizinan Sektor<br>Kesehatan, Obat<br>dan Makanan | Proses bisnis<br>terkait perizinan<br>pengelolaan<br>kefarmasian,<br>pengelolaan alat<br>kesehatan,<br>pengelolaan<br>fasilitas<br>Kesehatan<br>(Rumah Sakit<br>Kelas C dan D,<br>pengelolaan<br>layanan<br>kesehatan, obat<br>dan makanan | [04]<br>Perlindungan<br>Sosial dan<br>Kesehatan<br>[04.01]<br>kesehatan | [DAD10]<br>[DAL10]                      |
|           | [DAB11]<br>Perizinan Sektor<br>Perdagangan                    | Proses bisnis<br>terkait perizinan<br>pengawasan<br>pasar daerah,<br>ketersediaan<br>bahan pokok<br>dan penguatan<br>jaringan<br>distribusi<br>perdagangan<br>daerah, ekspor<br>non migas, dan<br>usaha<br>perdagangan                     | [02] Ekonomi<br>dan Industri<br>[02.02]<br>Perdagangan                  | [DAD11]<br>[DAL11]                      |
|           | [DAB12]<br>Perizinan Sektor<br>UMKM                           | Proses bisnis<br>terkait perizinan<br>penyelenggaraan<br>usaha mikro,<br>kecil, dan<br>menengah                                                                                                                                            | [02] Ekonomi<br>dan Industri<br>[02.10] Usaha<br>Kecil dan<br>Menengah  | [DAD12]<br>[DAL12]                      |
|           | [DAB13]<br>Perizinan Sektor<br>Informasi                      | Proses bisnis<br>terkait<br>informatika                                                                                                                                                                                                    | [09]<br>Pemerintahan<br>Umum<br>[09.03]<br>Informasi                    | [DAD13]<br>[DAL13]                      |
|           | [DAB16]<br>Perizinan Sektor<br>Pariwisata                     | Proses bisnis<br>terkait perizinan<br>tempat wisata<br>dan<br>penyelenggaraan<br>pariwisata                                                                                                                                                | [02] Ekonomi<br>dan Industri<br>[02.11]<br>Pariwisata                   | [DAD16]<br>[DAL16]                      |

| Kebijakan                          | Domain<br>Arsitektur<br>Proses Bisnis                               | Deskripsi<br>Proses Bisnis                                                                                                                                                                        | Referensi<br>Arsitektur<br>Proses Bisnis                                | Kode<br>Domain<br>Arsitektur<br>Terkait |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Pembangunan<br/>Kewilayahan</b> | [DAB18]<br>Pemantauan<br>Pembangunan<br>Pekerjaan<br>Umum           | Proses bisnis<br>terkait<br>pemantauan<br>pembangunan<br>pekerjaan<br>umum                                                                                                                        | [03]<br>Pembangunan<br>Kewilayahan<br>[03.01]<br>Pekerjaan<br>Umum      | [DAD18]<br>[DAL18]                      |
|                                    | [DAB19]<br>Pemantauan<br>Pembangunan<br>Perumahan<br>Rakyat         | Proses bisnis<br>terkait<br>pemantauan<br>pembangunan<br>perumahan<br>rakyat                                                                                                                      | [03]<br>Pembangunan<br>Kewilayahan<br>[03.04]<br>Perumahan              | [DAD19]<br>[DAL19]                      |
| <b>Kesehatan</b>                   | [DAB20]<br>Penyelenggaraan<br>Layanan<br>Kesehatan<br>Terpadu       | Proses bisnis<br>terkait layanan<br>telemedicine,<br>digitalisasi<br>rekam medis,<br>penyelenggaraan<br>sistem rujukan<br>online, rekam<br>medis online,<br>dan sistem<br>personal health<br>care | [04]<br>Perlindungan<br>Sosial dan<br>Kesehatan<br>[04.01]<br>Kesehatan | [DAD20]<br>[DAL20]                      |
| <b>Sosial</b>                      | [DAB21]<br>Penyelenggaraan<br>Bantuan Sosial<br>Terintegrasi        | Proses bisnis<br>terkait layanan<br>bantuan sosial<br>serta<br>pengelolaan<br>data<br>kesejahteraan<br>sosial yang<br>terpadu                                                                     | [04]<br>Pelindungan<br>Sosial dan<br>Kesehatan<br>[04.02] Sosial        | [DAD21]<br>[DAL21]                      |
|                                    | [DAB22]<br>Penyelenggaraan<br>Bantuan<br>Pendidikan<br>Terintegrasi | Proses bisnis<br>terkait layanan<br>bantuan<br>pendidikan                                                                                                                                         | [06]<br>Pendidikan<br>dan Tenaga<br>Kerja<br>[06.01]<br>Pendidikan      | [DAD22]<br>[DAL22]                      |
|                                    | [DAB24]<br>Penyelenggaraan<br>Bantuan<br>Kesehatan<br>Terintegrasi  | Proses bisnis<br>terkait layanan<br>bantuan<br>kesehatan                                                                                                                                          | [04]<br>Pelindungan<br>Sosial dan<br>Kesehatan<br>[04.01]<br>Kesehatan  | [DAD24]<br>[DAL24]                      |
| <b>Pendidikan</b>                  | [DAB27]<br>Penyelenggaraan<br>Pendidikan<br>Berbasis<br>Teknologi   | Proses bisnis<br>terkait layanan<br>pendidikan dan<br>penyediaan<br>konten digital                                                                                                                | [06]<br>Pendidikan<br>dan Tenaga<br>Kerja<br>[06.01]<br>Pendidikan      | [DAD27]<br>[DAL27]                      |

| Kebijakan                  | Domain<br>Arsitektur<br>Proses Bisnis                                     | Deskripsi<br>Proses Bisnis                                                                                                     | Referensi<br>Arsitektur<br>Proses Bisnis                              | Kode<br>Domain<br>Arsitektur<br>Terkait |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Pemerintahan Umum</b>   | [DAB28]<br>Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemerintahan Dalam Negeri | Proses bisnis terkait pemerintahan dalam negeri                                                                                | [09]<br>Pemerintahan Umum<br>[09.01] Dalam Negeri                     | [DAD28]<br>[DAL28]                      |
|                            | [DAB29]<br>Penyelenggaraan Layanan Penganggaran                           | Proses bisnis terkait penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik daerah, dan keuangan daerah lainnya    | [09]<br>Pemerintahan Umum<br>[09.02] Keuangan                         | [DAD29]<br>[DAL28]                      |
|                            | [DAB30]<br>Penyelenggaraan Layanan Perencanaan                            | Proses bisnis terkait perencanaan pembangunan                                                                                  | [09]<br>Pemerintahan Umum<br>[09.05] Perencanaan Pembangunan Nasional | [DAD30]<br>[DAL28]                      |
|                            | [DAB31]<br>Penyelenggaraan Layanan Aparatur Negara                        | Proses bisnis terkait kearsipan, kepegawaian, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan administrasi pemerintahan lainnya | [09]<br>Pemerintahan Umum<br>[09.06] Aparatur Negara                  | [DAD31]<br>[DAL28]                      |
| <b>Satu Data Indonesia</b> | [DAB32]<br>Pengelolaan Data Statistik                                     | Proses bisnis terkait manajemen data statistik                                                                                 | [09]<br>Pemerintahan Umum<br>[09.03] Informasi                        | [DAD32]<br>[DAL29]                      |
|                            | [DAB33]<br>Pengelolaan Data Geospasial                                    | Proses bisnis terkait manajemen data geospasial                                                                                | [09]<br>Pemerintahan Umum<br>[09.03] Informasi                        | [DAD33]<br>[DAL29]                      |
|                            | [DAB34]<br>Pengelolaan Data Keuangan Negara                               | Proses bisnis terkait manajemen data keuangan daerah                                                                           | [09]<br>Pemerintahan Umum<br>[09.02] Keuangan                         | [DAD34]<br>[DAL29]                      |

### **5.3. Data dan Informasi**

Data dan informasi merupakan aset penting bagi suatu organisasi. Data dan informasi mengalir dari satu proses ke proses lainnya, dan dari aplikasi satu ke aplikasi lainnya. Data dan informasi adalah bahan utama pengambilan keputusan. Oleh karena itu, identifikasi data dan informasi menjadi penting. Data sedapat mungkin diinput hanya satu kali pada suatu aplikasi, dan dibaca oleh aplikasi lainnya. Duplikasi input data akan berpotensi menyebabkan masalah integritas data, sehingga data tersebut tidak dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan.

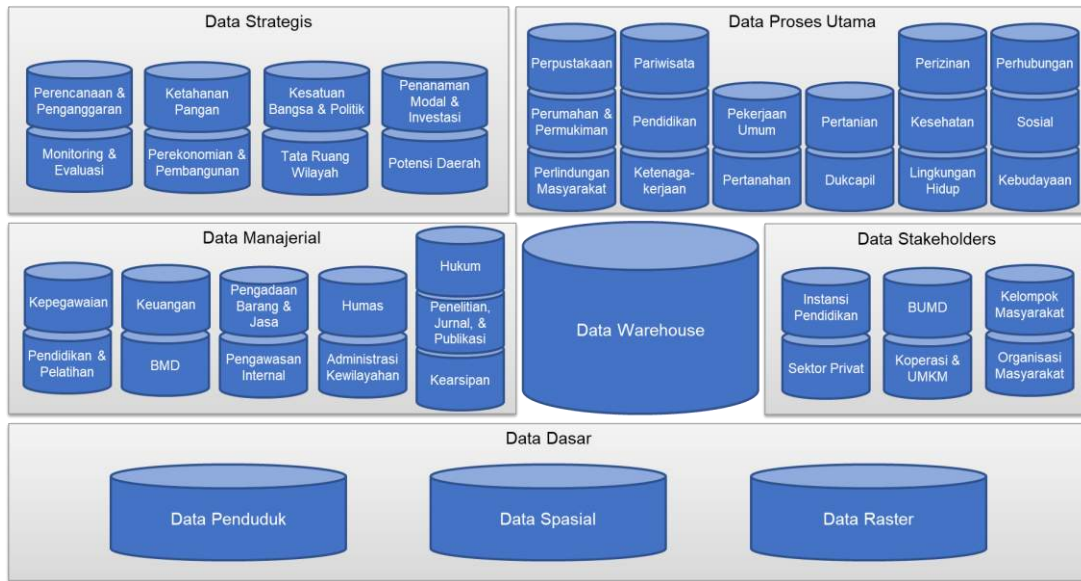
#### **5.3.1. Prinsip-prinsip Data dan Informasi**

Prinsip-prinsip data dan informasi yang paling mendasar adalah sebagai berikut:

- 1) Data dan informasi adalah aset organisasi dan harus dikelola sebagaimana mengelola aset kritikal organisasi lainnya.
- 2) Data dan informasi harus dikelola secara transparan dan mematuhi (comply) peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Data dan informasi harus disimpan dalam format baku sehingga dapat digunakan ulang (reuse) dan dapat interoperabilitaskan.
- 4) Data dan informasi harus dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip keamanan informasi.

#### **5.3.2. Target Arsitektur Data dan Informasi**

Arsitektur data dan informasi Kabupaten Sidenreng Rappang disusun dalam 5 kelompok data, yaitu data dasar, data manajerial, data stakeholder, data proses utama, dan data strategis. Kelima kelompok data tersebut akan dikumpulkan pada suatu data warehouse. Melalui data warehouse inilah data strategis dibangun. Penggambaran arsitektur data adalah sebagai berikut.



Gambar 13. Target Arsitektur Data

Selanjutnya, dari sekian banyak data yang digambarkan tersebut terdapat beberapa jenis data yang menjadi target prioritas, sebagaimana yang diarahkan oleh SE Menteri PANRB 18/2022. Target data prioritas tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Target Prioritas Arsitektur Data

| Kebijakan                   | Domain Arsitektur Data dan Informasi                  | Deskripsi Data dan Informasi                                                                                                                                  | Referensi Arsitektur Data dan Informasi                                  | Kode Domain Arsitektur Terkait                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Ekonomi dan Industri</b> | [DAD02] Data dan Informasi Perizinan Sektor Pertanian | Proses bisnis terkait perizinan pengelolaan sarana dan prasarana pertanian, pengelolaan pembiayaan pertanian, dan Komoditas Pertanian, Perkebunan, Peternakan | [02] Informasi Ekonomi dan Industri<br>[02.03] Data Pertanian            | [DAB02]<br>[DAL02]<br>[DAA01]<br>[DAI01-03]<br>[DAK01-03] |
|                             | [DAD03] Data dan Informasi Perizinan Sektor Kehutanan | Data dan informasi terkait perizinan sektor kehutanan                                                                                                         | [07] Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam<br>[07.03] Data Kehutanan | [DAB03]<br>[DAL03]<br>[DAA01]<br>[DAI01-03]<br>[DAK01-03] |

| Kebijakan | Domain<br>Arsitektur Data<br>dan Informasi                         | Deskripsi Data<br>dan Informasi                                                                                                                                                  | Referensi<br>Arsitektur Data<br>dan Informasi                                   | Kode<br>Domain<br>Arsitektur<br>Terkait                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|           | [DAD04] Data dan Informasi Perizinan Sektor Lingkungan Hidup       | Data dan informasi terkait sektor lingkungan hidup                                                                                                                               | [07] Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam<br>[07.05] Data Lingkungan Hidup | [DAB04]<br>[DAL04]<br>[DAA01]<br>[DAI01-03]<br>[DAK01-03] |
|           | [DAD05] Data dan Informasi Perizinan Sektor Pekerjaan Umum         | Data dan informasi terkait perizinan bangunan gedung, pemanfaatan badan jalan, dan penggunaan air baku                                                                           | [03] Informasi Pembangunan Kewilayahan<br>[03.01] Data Pekerjaan Umum           | [DAB05]<br>[DAL05]<br>[DAA01]<br>[DAI01-03]<br>[DAK01-03] |
|           | [DAD06] Data dan Informasi Perizinan Sektor Perumahan Rakyat       | Data dan informasi terkait perizinan pembangunan perumahan rakyat                                                                                                                | [03] Informasi Pembangunan Kewilayahan<br>[03.04] Data Perumahan                | [DAB06]<br>[DAL06]<br>[DAA01]<br>[DAI01-03]<br>[DAK01-03] |
|           | [DAD07] Data dan Informasi Perizinan Sektor Pendidikan             | Data dan informasi terkait perizinan penyelenggaraan pendidikan nasional dan keagamaan                                                                                           | [06] Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja<br>[06.01] Data Pendidikan           | [DAB07]<br>[DAL07]<br>[DAA01]<br>[DAI01-03]<br>[DAK01-03] |
|           | [DAD09] Data dan Informasi Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan | Data dan informasi terkait perizinan usaha perikanan budidaya                                                                                                                    | [02] Informasi Ekonomi dan Industri<br>[02.06] Data Perikanan                   | [DAB09]<br>[DAL09]<br>[DAA01]<br>[DAI01-03]<br>[DAK01-03] |
|           | [DAD10] Data dan Informasi Perizinan Sektor Kesehatan              | Data dan informasi terkait perizinan pengelolaan kefarmasian, pengelolaan alat kesehatan, pengelolaan fasilitas kesehatan, pengelolaan layanan kesehatan, serta obat dan makanan | [04] Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan<br>[04.01] Data kesehatan      | [DAB10]<br>[DAL10]<br>[DAA01]<br>[DAI01-03]<br>[DAK01-03] |

| Kebijakan                      | Domain<br>Arsitektur Data<br>dan Informasi                         | Deskripsi Data<br>dan Informasi                                                                                                                                                      | Referensi<br>Arsitektur Data<br>dan Informasi                                | Kode<br>Domain<br>Arsitektur<br>Terkait                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                | [DAD11] Data dan Informasi Perizinan Sektor Perdagangan            | Data dan informasi terkait perizinan pengawasan pasar daerah, ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi perdagangan daerah, ekspor non migas, dan usaha perdagangan | [02] Informasi Ekonomi dan Industri<br>[02.02] Data Perdagangan              | [DAB11]<br>[DAL11]<br>[DAA01]<br>[DAI01-03]<br>[DAK01-03] |
|                                | [DAD12] Data dan Informasi Perizinan Sektor UMKM                   | Data dan informasi terkait perizinan penyelenggaraan usaha mikro, kecil, dan menengah                                                                                                | [02] Informasi Ekonomi dan Industri<br>[02.10] Data Usaha Kecil dan Menengah | [DAB12]<br>[DAL12]<br>[DAA01]<br>[DAI01-03]<br>[DAK01-03] |
|                                | [DAD13] Data dan Informasi Perizinan Sektor Informasi              | Data dan informasi terkait perizinan sektor informatika                                                                                                                              | [09] Informasi Pemerintahan Umum<br>[09.03] Data Informasi                   | [DAB13]<br>[DAL13]<br>[DAA01]<br>[DAI01-03]<br>[DAK01-03] |
|                                | [DAD16] Data dan Informasi Perizinan Sektor Pariwisata             | Data dan informasi terkait perizinan tempat wisata dan penyelenggaraan pariwisata                                                                                                    | [02] Informasi Ekonomi dan Industri<br>[02.11] Data Pariwisata               | [DAB16]<br>[DAL16]<br>[DAA01]<br>[DAI01-03]<br>[DAK01-03] |
| <b>Pembangunan Kewilayahan</b> | [DAD18] Data dan Informasi Pemantauan Pembangunan Pekerjaan Umum   | Data dan informasi terkait pemantauan pembangunan pekerjaan umum                                                                                                                     | [03] Informasi Pembangunan Kewilayahan<br>[03.01] Data Pekerjaan Umum        | [DAB18]<br>[DAL18]<br>[DAA02]<br>[DAI01-03]<br>[DAK01-03] |
|                                | [DAD19] Data dan Informasi Pemantauan Pembangunan Perumahan Rakyat | Data dan informasi terkait pemantauan pembangunan perumahan rakyat                                                                                                                   | [03] Informasi Pembangunan Kewilayahan<br>[03.04] Data Perumahan             | [DAB19]<br>[DAL19]<br>[DAA02]<br>[DAI01-03]<br>[DAK01-03] |

| Kebijakan                | Domain<br>Arsitektur Data<br>dan Informasi                        | Deskripsi Data<br>dan Informasi                                                                                                                                       | Referensi<br>Arsitektur Data<br>dan Informasi                             | Kode<br>Domain<br>Arsitektur<br>Terkait                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Kesehatan</b>         | [DAD20] Data dan Informasi Kesehatan Terpadu                      | Data dan informasi terkait layanan telemedicine, digitalisasi rekam medis, penyelenggaraan sistem rujukan online, rekam medis online, dan sistem personal health care | [04] Informasi Pelindungan Sosial dan Kesehatan<br>[04.01] Data Kesehatan | [DAB20]<br>[DAL20]<br>[DAA03]<br>[DAI01-03]<br>[DAK01-03] |
| <b>Sosial</b>            | [DAD21] Data dan Informasi Bantuan Sosial Terintegrasi            | Data dan informasi terkait layanan bantuan sosial serta pengelolaan data kesejahteraan sosial yang terpadu                                                            | [04] Informasi Pelindungan Sosial dan Kesehatan<br>[04.02] Data Sosial    | [DAB21]<br>[DAL21]<br>[DAA04]<br>[DAI01-03]<br>[DAK01-03] |
|                          | [DAD22] Data dan Informasi Bantuan Pendidikan Terintegrasi        | Data dan informasi terkait layanan bantuan pendidikan                                                                                                                 | [06] Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja<br>[06.01] Data Pendidikan     | [DAB22]<br>[DAL22]<br>[DAA04]<br>[DAI01-03]<br>[DAK01-03] |
|                          | [DAD24] Data dan Informasi Bantuan Kesehatan Terintegrasi         | Data dan informasi terkait layanan bantuan kesehatan                                                                                                                  | [04] Informasi Pelindungan Sosial dan Kesehatan<br>[04.01] Data Kesehatan | [DAB24]<br>[DAL24]<br>[DAA04]<br>[DAI01-03]<br>[DAK01-03] |
| <b>Pendidikan</b>        | [DAD27] Data dan Informasi Pendidikan                             | Data layanan pendidikan dan penyediaan konten digital                                                                                                                 | [06] Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja<br>[06.01] Data Pendidikan     | [DAB27]<br>[DAL27]<br>[DAA07]<br>[DAI01-03]<br>[DAK01-03] |
| <b>Pemerintahan Umum</b> | [DAD28] Data dan Informasi Administrasi Pemerintahan Dalam Negeri | Data dan informasi terkait pemerintahan dalam negeri                                                                                                                  | [09] Informasi Pemerintahan umum<br>[09.01] Data Dalam Negeri             | [DAB28]<br>[DAL28]<br>[DAA08]<br>[DAI01-03]<br>[DAK01-03] |

| Kebijakan                  | Domain<br>Arsitektur Data<br>dan Informasi  | Deskripsi Data<br>dan Informasi                                                                                                     | Referensi<br>Arsitektur Data<br>dan Informasi                                     | Kode<br>Domain<br>Arsitektur<br>Terkait                   |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                            | [DAD29] Data dan Informasi Penganggaran     | Data dan informasi terkait penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara, dan keuangan negara lainnya    | [09] Informasi Pemerintahan Umum<br>[09.02] Data Keuangan                         | [DAB29]<br>[DAL28]<br>[DAA08]<br>[DAI01-03]<br>[DAK01-03] |
|                            | [DAD30] Data dan Informasi Perencanaan      | Data dan informasi terkait perencanaan pembangunan                                                                                  | [09] Informasi Pemerintahan umum<br>[09.05] Data Perencanaan Pembangunan Nasional | [DAB30]<br>[DAL28]<br>[DAA08]<br>[DAI01-03]<br>[DAK01-03] |
|                            | [DAD 31] Data dan Informasi Aparatur Negara | Data dan informasi terkait kearsipan, kepegawaian, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan administrasi pemerintahan lainnya | [09] Informasi Pemerintahan umum<br>[09.06] Data Aparatur Negara                  | [DAB31]<br>[DAL28]<br>[DAA09]<br>[DAI01-03]<br>[DAK01-03] |
| <b>Satu Data Indonesia</b> | [DAD32] Data Statistik                      | Data dan informasi terkait manajemen data statistik                                                                                 | [09] Informasi Pemerintahan Umum<br>[09.03] Data Informasi                        | [DAB32]<br>[DAL29]<br>[DAA09]<br>[DAI01-03]<br>[DAK01-03] |
|                            | [DAD33] Data Geospasial                     | Data dan informasi terkait manajemen data geospasial                                                                                | [09] Informasi Pemerintahan Umum<br>[09.03] Data Informasi                        | [DAB33]<br>[DAL29]<br>[DAA09]<br>[DAI01-03]<br>[DAK01-03] |
|                            | [DAD34] Data Keuangan                       | Data dan informasi terkait manajemen data keuangan negara                                                                           | [09] Informasi Pemerintahan Umum<br>[09.02] Data Keuangan                         | [DAB34]<br>[DAL29]<br>[DAA09]<br>[DAI01-03]<br>[DAK01-03] |

## 5.4. Aplikasi

Aplikasi dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis sekaligus memfasilitasi integrasi antar proses bisnis yang terkait. Solusi aplikasi diperlukan oleh Pemda Sidenreng Rappang untuk memfasilitasi pencapaian visi dan misi dalam RPJMD. Suatu solusi aplikasi diharapkan dapat memfasilitasi beberapa arah kebijakan dan beberapa OPD, sehingga terjadi integrasi dan sinergi antar satuan kerja di lingkungan Pemda Sidenreng Rappang demi memperlancar tercapainya tujuan pembangunan dalam RPJMD.

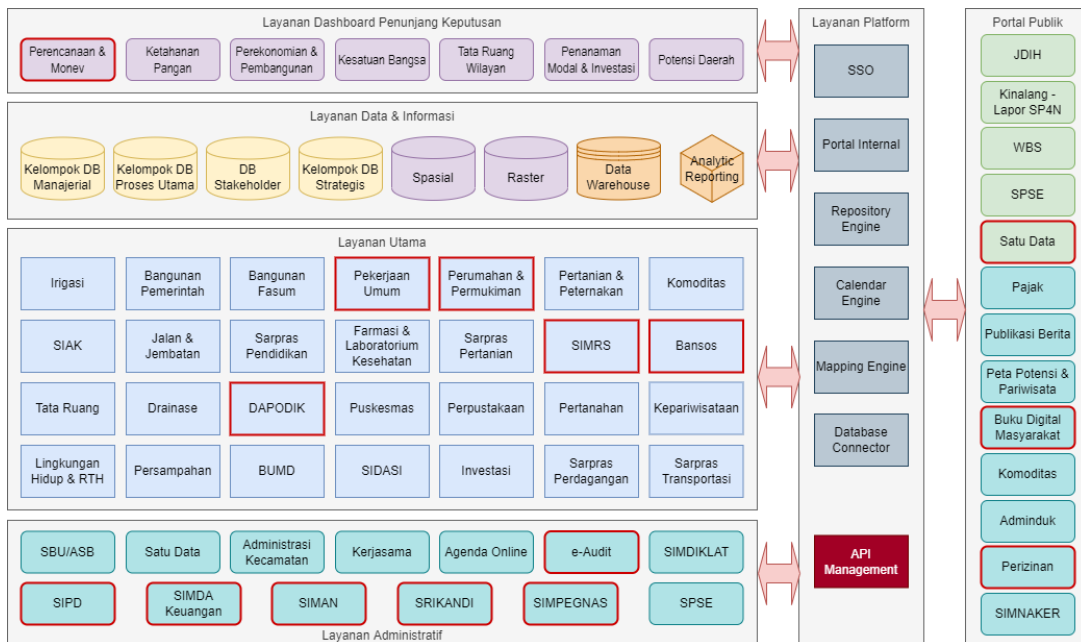
### 5.4.1. Prinsip-prinsip Aplikasi

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam membangun dan mengembangkan aplikasi antara lain:

- 1) Aplikasi dibangun secara *loose-coupled* dengan memanfaatkan platform layanan (*services*) standar sehingga pemeliharannya menjadi lebih mudah. Dimana *loose-coupled* sendiri adalah salah satu bentuk integrasi aplikasi, dimana satu aplikasi dan aplikasi lainnya tidak saling mempengaruhi secara langsung dan dapat dengan mudah dipisahkan ataupun digabungkan secara logis.
- 2) Aplikasi diprioritaskan dibangun dengan basis sumber terbuka (*open source*) sehingga meminimalisasi biaya lisensi serta ketergantungan atas vendor tertentu.
- 3) Aplikasi dibangun dengan menggunakan teknologi dan bahasa pemrograman yang tersedia luas di pasaran, sehingga menurunkan biaya pemeliharaan dan pengembangan.
- 4) Aplikasi harus dapat diakses kapan saja dan dari mana saja oleh pengguna sesuai dengan hak aksesnya.
- 5) Setiap komponen aplikasi harus dapat digunakan kembali (*reuse*) oleh aplikasi lainnya.
- 6) Setiap aplikasi harus dapat diintegrasikan dengan aplikasi lainnya.
- 7) Setiap perubahan pada aplikasi harus tercatat dan mendapatkan persetujuan dari tim penjaminan mutu aplikasi.

#### 5.4.2. Target Arsitektur Aplikasi

Target arsitektur aplikasi dibangun berdasarkan hasil analisis survei dan kebutuhannya dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan dalam RPJMD. Target arsitektur aplikasi Pemda Sidenreng Rappang ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 14. Target Arsitektur Aplikasi

Selain itu di antara aplikasi-aplikasi yang tergambarkan pada target arsitektur tersebut, beberapa aplikasi termasuk dalam target prioritas nasional sebagai arahan pada SE Menteri PANRB No. 18/2022, yaitu pada aplikasi yang diberikan *outline* berwarna merah. Berikut ini adalah target prioritas untuk arsitektur aplikasi berdasarkan arahan tersebut.

| Kebijakan                      | Domain Arsitektur Aplikasi SPBE                            | Deskripsi Aplikasi SPBE                                                     | Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE                       | Kode Domain Arsitektur Terkait                       |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Ekonomi dan Industri</b>    | [DAA01] Aplikasi Perizinan Terintegrasi                    | Aplikasi perizinan yang mengintegrasikan seluruh aplikasi perizinan sektor  | [01] Aplikasi Umum<br>[01.01] Aplikasi Layanan Publik    | [DAD01-17]<br>[DAL01-17]<br>[DAI01-03]<br>[DAK01-03] |
| <b>Pembangunan Kewilayahan</b> | [DAA02] Aplikasi Pemantauan Pembangunan Pekerjaan Umum dan | Aplikasi terkait pemantauan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat | [02] Aplikasi Khusus<br>[02.02] Aplikasi Fungsi Tertentu | [DAD18-19]<br>[DAL18-19]<br>[DAI01-03]<br>[DAK01-03] |

| Kebijakan                  | Domain<br>Arsitektur<br>Aplikasi SPBE                 | Deskripsi Aplikasi<br>SPBE                                                                                                                                                                                                         | Referensi<br>Arsitektur<br>Aplikasi<br>SPBE                                                         | Kode<br>Domain<br>Arsitektur<br>Terkait              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                            | Perumahan<br>Rakyat                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                      |
| <b>Kesehatan</b>           | [DAA03]<br>Aplikasi<br>Kesehatan<br>Terpadu           | Aplikasi terkait layanan <i>telemedicine</i> , digitalisasi rekam medis, penyelenggaraan sistem rujukan <i>online</i> , rekam medis <i>online</i> , dan sistem <i>personal health care</i> . Fitur tersebut tergabung dalam SIMRS. | [01] Aplikasi Umum<br>[01.01] Aplikasi Layanan Publik                                               | [DAD20]<br>[DAL20]<br>[DAI01-03]<br>[DAK01-03]       |
| <b>Sosial</b>              | [DAA04]<br>Aplikasi<br>Bantuan Sosial<br>Terintegrasi | Aplikasi terkait bantuan sosial terintegrasi, termasuk didalamnya berupa kegiatan layanan bantuan listrik, bantuan pendidikan, bantuan sosial, dan bantuan kesehatan, serta pengelolaan data kesejahteraan sosial yang terpadu     | [01] Aplikasi Umum<br>[01.01] Aplikasi Layanan Publik<br>[01.02] Aplikasi Administrasi Pemerintahan | [DAD21-24]<br>[DAL21-24]<br>[DAI01-03]<br>[DAK01-03] |
| <b>Pendidikan</b>          | [DAA07]<br>Aplikasi<br>Pendidikan                     | Aplikasi layanan pendidikan dan Aplikasi penyediaan konten digital, yaitu DAPODIK dan Buku Digital Masyarakat                                                                                                                      | [01] Aplikasi Umum<br>[01.01] Aplikasi Layanan Publik                                               | [DAD27]<br>[DAL27]<br>[DAI01-03]                     |
| <b>Pemerintahan Umum</b>   | [DAA08]<br>Aplikasi<br>Administrasi<br>Pemerintahan   | Aplikasi terkait perencanaan, penganggaran, keuangan, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan administrasi pemerintahan lainnya                                    | [01] Aplikasi Umum<br>[01.02] Aplikasi Administrasi Pemerintahan                                    | [DAD28-31]<br>[DAL28]<br>[DAI01-03]<br>[DAK01-03]    |
| <b>Satu Data Indonesia</b> | [DAA09] Portal<br>Satu Data<br>Indonesia              | Aplikasi terkait manajemen data statistik, data                                                                                                                                                                                    | [01] Aplikasi Umum<br>[01.01]                                                                       | [DAD32-34]<br>[DAL29]                                |

| Kebijakan | Domain<br>Arsitektur<br>Aplikasi SPBE | Deskripsi Aplikasi<br>SPBE                                                                                        | Referensi<br>Arsitektur<br>Aplikasi<br>SPBE | Kode<br>Domain<br>Arsitektur<br>Terkait |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|           |                                       | keuangan daerah,<br>dan data geospasial<br>yang nantinya akan<br>diintegrasikan<br>dengan portal data<br>nasional | Aplikasi<br>Layanan<br>Publik               | [DAI01-03]<br>[DAK01-03]                |

## 5.5. Infrastruktur TIK

Infrastruktur TIK merupakan lapisan paling dasar yang memberikan dukungan dan layanan-layanan yang digunakan oleh lapisan-lapisan arsitektur di atasnya. Pada bagian ini akan dibahas mengenai prinsip-prinsip yang mendasari dalam perancangan infrastruktur TIK, tren teknologi dan standar teknologi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari topologi jaringan, arsitektur, dan portofolio infrastruktur TIK dalam rangka pengembangan SPBE di Kabupaten Sidenreng Rappang.

### 5.5.1. Prinsip-prinsip Infrastruktur TIK

Rancangan arsitektur infrastruktur TIK disusun dengan mengacu pada *good practices* untuk memastikan bahwa infrastruktur TIK dapat selalu menyediakan layanan yang handal seiring dengan berkembangnya layanan pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- 1) *Availability*. Yaitu ketersediaan layanan infrastruktur TIK yang terbebas dari gangguan. Hal ini dicapai dengan melakukan penggandaan komponen-komponen kritis yang mempengaruhi ketersediaan layanan TIK yang diberikan, termasuk penyediaan fasilitas data center cadangan sebagai bagian dari *disaster recovery plan*, dan penerapan teknologi server dan storage clustering.

- 2) *Scalability*. Merupakan kemampuan untuk menampung peningkatan beban kerja layanan TIK. Hal ini dicapai melalui perencanaan kapasitas perangkat infrastruktur sesuai dengan beban kerjanya, ditambah ruang untuk mengakomodasi peningkatan beban yang tidak terduga. Penerapan teknologi server dan storage clustering memungkinkan pengalokasian kapasitas server dan disk penyimpanan data untuk berbagai aplikasi secara dinamis sesuai dengan konfigurasi beban.
- 3) *Security*. Pengamanan integritas data dari ancaman pencurian, pengubahan dan penghapusan baik yang dilakukan melalui jaringan maupun akses langsung ke fasilitas fisik TIK. Hal ini dicapai melalui penyediaan fasilitas-fasilitas untuk melakukan deteksi, pencegahan dan mitigasi terhadap ancaman-ancaman terhadap kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data, disamping juga perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Juga dengan penerapan *IT Security Policy* yang mengikuti standar-standar yang berlaku di bidang keamanan TIK.
- 4) *Serviceability*. Yaitu kemudahan untuk melakukan pemeliharaan termasuk perbaikan dari kerusakan. Hal ini dicapai melalui pemilihan teknologi yang sudah teruji dan memiliki dukungan teknis vendor yang baik serta dapat diandalkan.
- 5) *Manageability*. Yaitu kemudahan dalam pengelolaan, termasuk administrasi dan pengoperasiannya. Ini dicapai dengan menyediakan alat bantu (tools) pengelolaan, termasuk didalamnya aktivitas pemantauan dan pengendalian untuk selanjutnya dapat dilakukan respon sesuai dengan tuntutan service level secara terpadu. Selain itu juga dengan pemilihan produk dan platform yang standar sehingga dapat lebih mudah untuk diintegrasikan untuk dikelola secara terpadu.

#### 5.5.2. Target Arsitektur Infrastruktur TIK

Layanan infrastruktur TIK yang nantinya dimiliki oleh Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri tiga kelompok besar, yaitu fasilitas/pusat

komputasi, sistem integrasi, dan platform. Ketiga kelompok tersebut diuraikan pada tabel berikut.

| Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE | Deskripsi Infrastruktur SPBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE                                                                                                                | Kode Domain Arsitektur Terkait                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>[DAI01] Fasilitas Komputasi</b>   | <p>Pusat komputasi yang dikelola oleh Dinas Kominfo ditekankan untuk menjadi infrastruktur TIK berbagi pakai yang dimanfaatkan oleh seluruh OPD. Pusat komputasi dikembangkan lebih lanjut dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menilai keamanan pusat komputasi.</li> <li>▪ Menerapkan konsep colocation untuk penempatan seluruh server yang dimiliki OPD pada pusat komputasi.</li> <li>▪ Membangun interkoneksi dengan Pusat Data Nasional (PDN).</li> </ul> | <p>[01] Fasilitas Komputasi<br/>           [01.01] Pusat Data Nasional<br/>           [01.02] Pusat Komputasi<br/>           [01.03] Pusat Kendali</p> | <p>[DAD01-34]<br/>           [DAA01-09]<br/>           [DAK01-03]</p> |
| <b>[DAI02] Sistem Integrasi</b>      | <p>Penyelenggaraan sistem integrasi dikembangkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jaringan Intra yang saat ini mengadopsi topologi MAN dimutakhirkan dengan implementasi FO pada jaringan intra utama (<i>backbone</i>)</li> <li>▪ Mengkaji dan menerapkan Sistem Penghubung Layanan yang dapat dimanfaatkan oleh aplikasi dari seluruh OPD.</li> </ul>                                                                                             | <p>[02] Sistem Integrasi<br/>           [02.01] Jaringan Intra Pemerintah<br/>           [02.02] Sistem Penghubung Layanan Pemerintah</p>              | <p>[DAD01-34]<br/>           [DAA01-09]<br/>           [DAK01-03]</p> |
| <b>[DAI03] Platform</b>              | <p>Penerapan platform berupa kerangka infrastruktur aplikasi dan komputasi awan, untuk mewujudkan <i>government cloud</i>, menjadi infrastruktur berbagi pakai yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh OPD.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>[03] Platform<br/>           [03.01] Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi<br/>           [03.02] Komputasi Awan</p>                                  | <p>[DAD01-34]<br/>           [DAA01-09]<br/>           [DAK01-03]</p> |

### 5.5.3. Fasilitas/Pusat Komputasi

Pusat komputasi pada dasarnya adalah pusat data yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pusat komputasi adalah sebuah tempat yang diamankan untuk peralatan komputer, media penyimpanan dan peralatan komunikasi serta jaringan yang digunakan untuk menyimpan, mendistribusikan dan memelihara data dalam sebuah organisasi. Pusat komputasi berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan akses semua data yang dibutuhkan oleh organisasi. Data tersebut diambil, diolah dan disimpan kembali pada pusat komputasi.

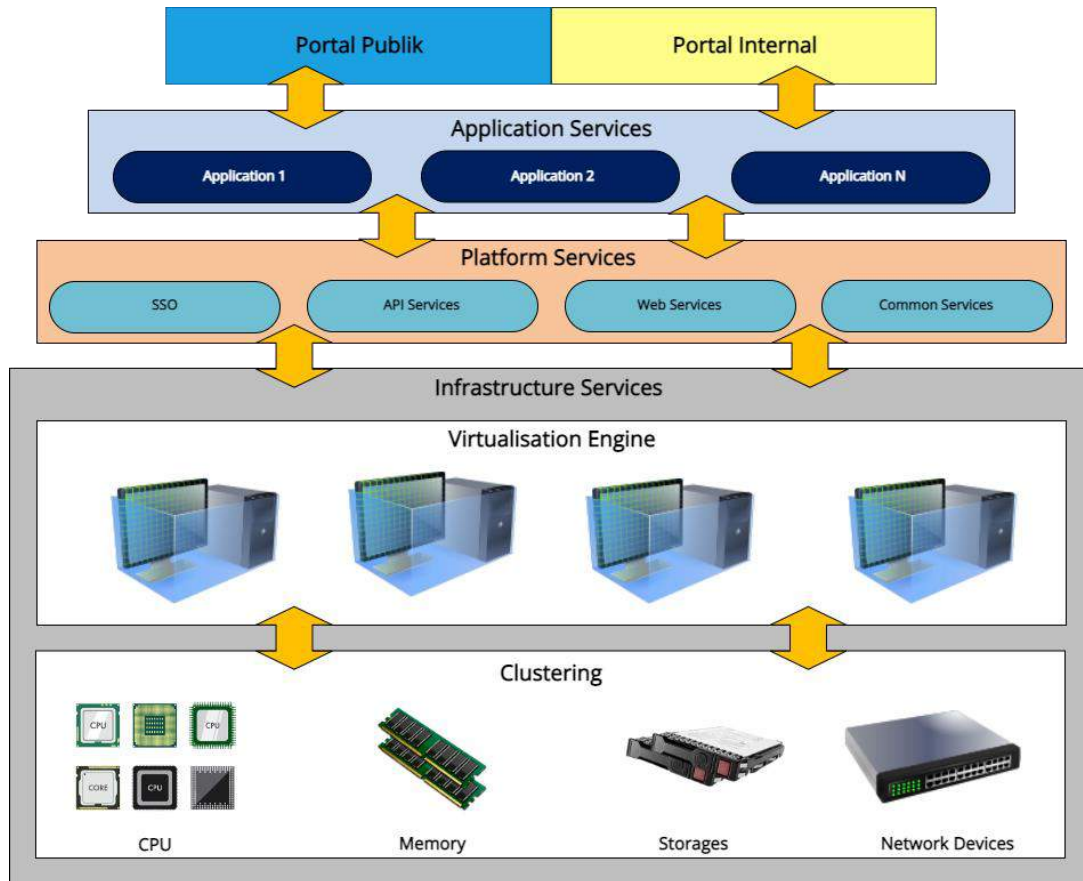
Pemda Sidenreng Rappang mengadopsi konsep dan teknologi *cloud computing* dalam layanan pusat komputasinya. *Cloud computing* merupakan suatu konsep teknologi yang menyediakan layanan komputasi, aplikasi, akses data, dan penyimpanan sedemikian hingga penggunaannya tidak memerlukan pengetahuan teknis mengenai konfigurasi ataupun lokasi fisik dari sistem layanannya. Semua aplikasi dan layanan lainnya yang diperlukan tersedia dan dapat diakses melalui web browser, tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan.

Penerapan *cloud* oleh Pemda Sidenreng Rappang akan bersifat *private*. Ini artinya layanan cloud akan disediakan untuk kepentingan layanan pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tentunya, *private cloud* ini nantinya juga akan dapat diakses dari manapun, sesuai dengan kebutuhan.

Dengan penerapan *private cloud* ini, semua OPD dapat menekan biaya pengembangan aplikasi. Selain itu, standarisasi aplikasi maupun data menjadi lebih mudah karena terpusat. Standarisasi data tentunya akan memudahkan jajaran pengambil keputusan untuk berkoordinasi dan mengolah data yang diperlukan.

Di sisi lain, Diskominfo sebagai unit pengelola TIK penyedia *private cloud* harus dapat memenuhi SLA minimum yang disyaratkan oleh semua OPD, terutama dari sisi ketersediaan aplikasi dan data. Untuk itu, komponen-komponen infrastruktur yang menjadi prasyarat bagi implementasi *cloud* haruslah dipenuhi terlebih dahulu. Gambar berikut

menunjukkan komponen infrastruktur yang harus dipenuhi untuk menyediakan layanan *private cloud* di Kabupaten Sidenreng Rappang.



Gambar 15. Arsitektur Cloud

Arsitektur *cloud* terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu *infrastructure services*, *platform services*, dan *application services*. Ketiga lapisan ini saling berinteraksi atas permintaan layanan, baik aplikasi maupun data, yang diakses melalui portal, baik portal publik maupun portal internal.

*Infrastructure services* merupakan lapisan dasar pembentuk *cloud* yang disusun atas dua teknologi optimasi pemanfaatan multi-perangkat, yaitu *clustering* dan *virtualisation*. *Clustering* menangani perangkat keras, sedangkan virtualisasi menangani sistem operasi dan *server* secara *logic*.

*Clustering* adalah suatu metode untuk meningkatkan performa sekaligus ketersediaan dari suatu perangkat dengan cara menggabungkan dan mengkoneksikan beberapa perangkat berfungsi sama menjadi seolah-olah satu perangkat. Dengan cara demikian, gangguan yang terjadi pada salah satu perangkat tidak akan mengganggu kegiatan yang terjadi dalam *cluster*

perangkat tersebut; perangkat yang mengalami gangguan dapat langsung digantikan oleh perangkat baru tanpa disadari oleh pengguna *cloud*. Dalam penyediaan *cloud*, metode ini menjadi kritikal untuk diterapkan demi memastikan ketersediaan layanan *cloud*.

*Virtualisation* merupakan suatu metode untuk mengoptimalkan pemanfaatan perangkat keras *server*. Dengan penerapan virtualisasi, *server* yang dibangun tidak harus memiliki perangkat khusus, melainkan dapat menggunakan perangkat yang sama dengan *server* lainnya. Virtualisasi memudahkan pengadaan server beserta dengan backup-nya. Melalui virtualisasi, suatu *server* dapat dengan mudah dibentuk dan di-“copy” menjadi *backup server* atau menjadi *server* lainnya. Dengan cara ini, jika terjadi gangguan pada satu *server*, maka koneksi dapat langsung terpindahkan pada *backup server*-nya tanpa mengganggu kegiatan operasional aplikasi, baik yang terjadi di lapisan *platform*, maupun di lapisan aplikasi. Untuk penerapan *cloud* ini, penerapan virtualisasi sangat penting untuk menjamin ketersediaan dan keberlangsungan kegiatan operasional yang dilakukan pada aplikasi-aplikasi yang berjalan di dalam semua *server* yang berada di lapisan infrastruktur.

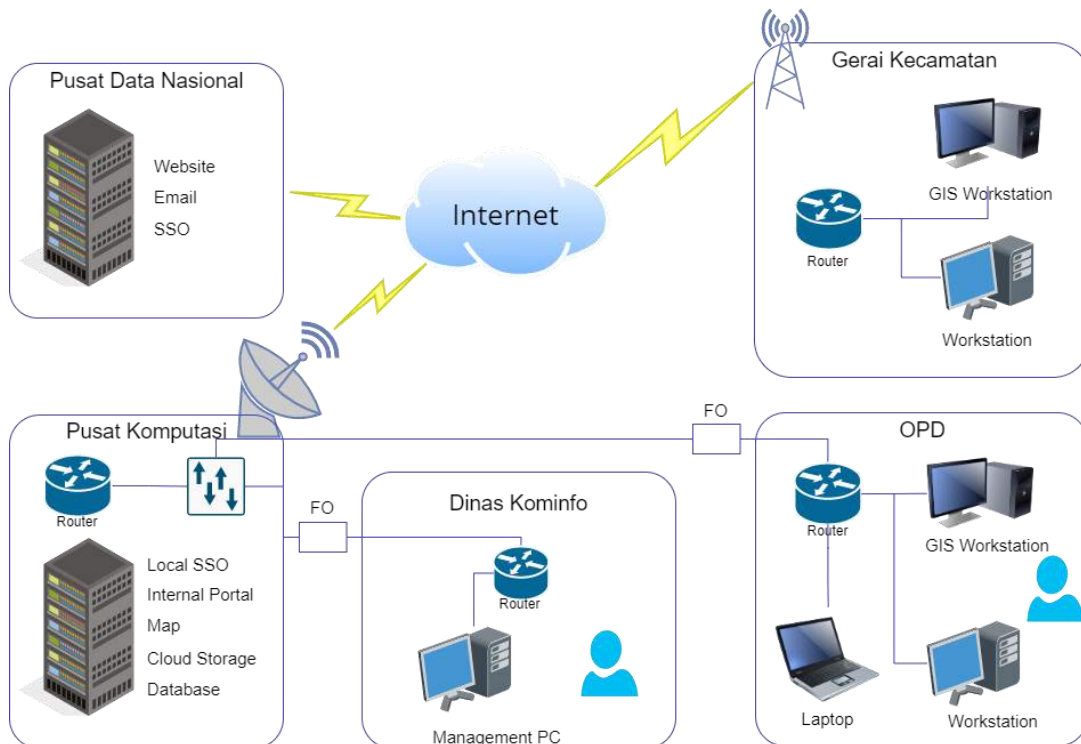
*Platform services* berada di atas lapisan infrastruktur. Lapisan *platform* ini memfasilitasi pembangunan aplikasi dengan menyediakan sistem operasi, SSO, API *services*, *web services*, dan modul-modul dasar lainnya (*common services*). Dengan tersedianya layanan *platform*, aplikasi-aplikasi dibangun dengan memanfaatkan modul-modul yang telah disediakan oleh *platform* melalui API. Dengan cara ini pembangunan aplikasi akan hanya berfokus pada modul unik yang dibutuhkan oleh aplikasi tersebut. Dengan demikian, kompleksitas pembangunan ataupun pengembangan aplikasi dapat diminimalisasi.

*Application services* menyediakan seluruh aplikasi seperti yang digambarkan pada arsitektur sistem informasi. Lapisan ini meminimalisasi kebutuhan instalasi dan pemeliharaan aplikasi di sisi pengguna, sehingga menyederhanakan dukungan dan pemeliharaan aplikasi secara keseluruhan. Aplikasi-aplikasi yang ada dalam lapisan ini diakses melalui *web portal*, baik portal publik maupun portal internal.

#### 5.5.4. Sistem Integrasi: Topologi Jaringan

Jaringan LAN harus dibangun secara terstruktur, baik dari sisi topologi jaringan, segmentasi jaringan, pengalamatan (addressing) maupun penggunaan perangkatnya. Dengan memiliki struktur jaringan yang baik maka akan dapat dilakukan pengaturan, pengawasan serta pemanfaatan yang lebih maksimal. Perangkat aktif jaringan sebagai komponen utama di jaringan tentunya harus memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya jaringan, seperti kapasitas bandwidth, mem-filter traffic yang lewat (traffic filtering), segmentasi jaringan (VLAN), mengatur prioritas traffic (traffic priority), dan ketahanan jaringan (network reliability) yang baik, serta berbagai fungsi pengontrolan lainnya, sehingga pemanfaatan TIK dalam proses layanan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta memberikan hasil yang maksimal.

Acuan topologi jaringan utama Kabupaten Sidenreng Rappang ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 16. Acuan Topologi Jaringan Utama

Pola topologi jaringan di atas dimaksudkan untuk menjadi acuan penerapan infrastruktur TIK di Kabupaten Sidenreng Rappang. Standar

acuan ini digunakan untuk membantu membuat justifikasi berdasarkan kapabilitas teknis minimum yang dibutuhkan oleh masing-masing OPD.

Mengacu pada acuan topologi di atas, setiap OPD terhubung dengan pusat komputasi melalui kabel FO. Dengan demikian, koneksi intranet antar OPD, dan terutama, antara OPD dengan pusat komputasi, dapat dilangsungkan dengan lebih terjamin kelancarannya. Acuan topologi tersebut kemudian diterapkan pada keseluruhan OPD sehingga membentuk topologi sebagai mana gambar berikut.

Target jaringan intra pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah menghubungkan seluruh kantor pemerintah kabupaten termasuk didalamnya kantor kecamatan di seluruh wilayah kabupaten. Berdasarkan hasil pemetaan bahwa setidaknya dibutuhkan  $\pm 100$  KM panjang kabel Fiber Optic untuk menghubungkan seluruh kantor kecamatan di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan rincian:

- Asumsi pusat pengendali jaringan intra pemerintah adalah Kantor Dinas Kominfo Sidenreng Rappang
- Ke Kantor Kecamatan Maritengngae :  $\pm 5$  KM
- Ke Kantor Kecamatan Watang Pulu :  $\pm 4$  KM
- Ke Kantor Kecamatan Panca Rijang :  $\pm 10$  KM
- Ke Kantor Kecamatan Baranti :  $\pm 4$  KM
- Ke Kantor Kecamatan Kulo :  $\pm 12$  KM
- Ke Kantor Kecamatan Watang Sidenreng :  $\pm 8$  KM
- Ke Kantor Kecamatan Dua Pitue :  $\pm 17$  KM
- Ke Kantor Kecamatan Pitu Riawa :  $\pm 7$  KM
- Ke Kantor Kecamatan Pitu Riase :  $\pm 18$  KM
- Ke Kantor Kecamatan Tellu Limpoe :  $\pm 10$  KM
- Ke Kantor Kecamatan Maritengngae :  $\pm 5$  KM
- Ke Kantor Kecamatan Panca Lautang :  $\pm 7$  KM



Gambar 17. Target Jaringan Intra Pemerintah

Gerai Kecamatan adalah suatu bangunan atau ruangan tertentu yang dipersiapkan untuk mempunyai koneksi *Internet* dan listrik yang stabil. Gerai ini difungsikan sebagai ruang kerja bagi personel Kecamatan yang membutuhkan koordinasi melalui jaringan *Internet*/intranet. Jika memungkinkan, gerai ini juga bisa difungsikan sebagai pusat pelatihan TIK, atau bahkan sebagai ruang publik untuk menyediakan edukasi digital. Karena membutuhkan listrik yang stabil, maka Gerai Kecamatan perlu dilengkapi dengan perangkat cadangan listrik, seperti UPS dan Genset.

#### 5.5.5. Sistem Integrasi: Sistem Penghubung Layanan (SPL)

Sistem penghubung layanan pada dasarnya adalah suatu aplikasi yang menyediakan komunikasi antar aplikasi lainnya. SPL berperan sebagai penghubung integrasi antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya, dan mencegah hubungan langsung antar aplikasi. Dengan adanya SPL ini, maka pengaturan integrasi aplikasi menjadi terstandarkan dan relatif lebih mudah dikelola.

#### 5.5.6. Platform

Platform adalah suatu konsep di mana suatu aplikasi (sederhana) dijadikan service sehingga dapat dimanfaatkan atau diperlakukan sebagai modul oleh aplikasi lainnya. Platform yang akan dikembangkan oleh

Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain adalah single sign-on (SSO), map engine, calendar, dan repository. Gambaran platform dapat dilihat pada **Error! Reference source not found.** (Target Arsitektur Aplikasi). Platform s elanjutkan akan dikelola oleh API Management, sehingga sekaligus berperan sebagai SPL.

## 5.6. Keamanan TIK

Keamanan TIK merupakan salah satu hal penting dalam memastikan integrasi dan pertukaran data antar OPD di Kabupaten Sidenreng Rappang berlangsung dengan aman. Data yang dikelola dan dipertukarkan dapat merupakan data rahasia dan kerusakan pada satu data akan berdampak pada semua OPD yang memanfaatkan data tersebut dan output kerja yang tergantung pada data tersebut.

### 5.6.1. Prinsip-prinsip Keamanan TIK

Seluruh aspek keamanan TIK pada dasarnya berpondasi pada tiga prinsip utama yang dikenal dengan prinsip CIA (*Confidentiality, Integrity, Availability*):

1. *Confidentiality* atau kerahasiaan, yang berarti bahwa setiap data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang atau berhak atas data tersebut.
2. *Integrity* atau integritas, adalah prinsip yang menekankan adanya langkah-langkah yang dapat mencegah terjadinya perubahan atau kehilangan data, sekaligus memastikan validitas data tersebut.
3. *Availability* atau ketersediaan, berarti bahwa setiap pihak yang mempunyai hak atas suatu data atau informasi harus dapat mengaksesnya setiap saat diperlukan.

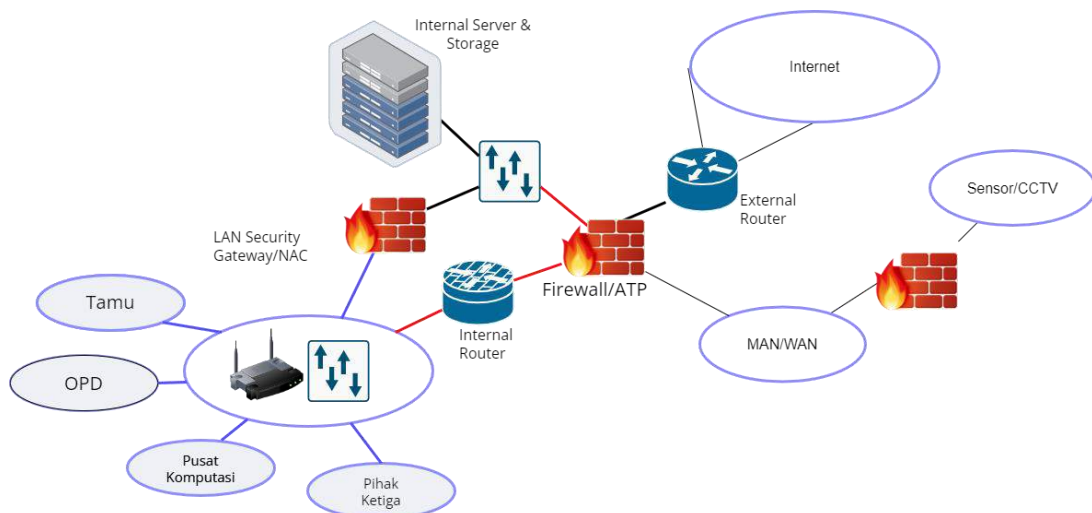
### 5.6.2. Target Arsitektur Keamanan TIK

Arsitektur keamanan TIK yang dibangun oleh Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri tiga kelompok unsur, yaitu standar keamanan, penerapan keamanan, dan kelaikan keamanan SPBE. Ketiga kelompok tersebut diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4. Target Arsitektur Keamanan TIK

| Domain Arsitektur Keamanan SPBE       | Deskripsi Keamanan SPBE                                                                                                                                                                                                                                           | Referensi Arsitektur Keamanan SPBE                                                                                                                                                                                                  | Kode Domain Arsitektur Terkait         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>[DAK01] Standar Keamanan</b>       | Persyaratan keamanan yang diacu oleh Pemda Sidenreng Rappang mengadopsi ISO 27001. Standar keamanan memastikan penerapan fungsi keamanan pada data dan informasi, Aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE sesuai dengan persyaratan keamanan yang telah ditetapkan. | [01] Standar Keamanan<br>[01.01] Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE<br>[01.02] Standar nasional/internasional terkait keamanan SPBE<br>[01.03] Regulasi lainnya                                                              | [DAD01-34]<br>[DAA01-09]<br>[DAI01-09] |
| <b>[DAK02] Penerapan Keamanan</b>     | Penyelenggaraan keamanan TIK melalui program kerja kesadaran keamanan, identifikasi kerentanan keamanan, dan peningkatan keamanan, penanganan insiden keamanan SPBE serta Audit Keamanan SPBE.                                                                    | [02] Penerapan Keamanan<br>[02.01] Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE<br>[02.02] Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE<br>[02.03] Peningkatan Keamanan SPBE<br>[02.04] Penanganan Insiden Keamanan SPBE<br>[02.05] Audit Keamanan SPBE | [DAD01-34]<br>[DAA01-09]<br>[DAI01-09] |
| <b>[DAK03] Kelaikan Keamanan SPBE</b> | Pemberian rekomendasi kelaikan keamanan aplikasi dan infrastruktur TIK.                                                                                                                                                                                           | [03] Kelaikan Keamanan<br>[03.01] Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum<br>[03.02] Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional                                                                                                          | [DAD01-34]<br>[DAA01-09]<br>[DAI01-09] |

Penerapan konfigurasi perangkat keamanan yang akan diimplementasikan di Kabupaten Sidenreng Rappang mengacu pada gambaran topologi keamanan TIK sebagai berikut.



Gambar 18. Topologi Keamanan TIK

## 5.7. Tata Kelola dan Organisasi TIK

Istilah tata kelola TIK (*IT governance*) mulai disebutkan pada literatur akademis maupun profesional di sekitar awal tahun 1990-an. Tata kelola TIK semakin dikenal secara luas di akhir tahun 1990-an, dengan dibentuknya *IT Governance Institute* (ITGI) di tahun 1998. Saat ini, tata kelola TIK menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola organisasi.

Sebagai subset dari tata kelola TIK, saat ini *cybersecurity* juga menjadi *highlight*. Semakin kompleksnya TIK, semakin konvergenya antara mesin dengan TIK, serta meningkatnya penggunaan IoT (*Internet of Things*), teknologi *Big Data*, *smart sensor*, dsb., maka sisi ancaman terhadap keamanan TIK menjadi meningkat dan juga semakin canggih. Oleh karena itu, walaupun keamanan informasi merupakan bagian dari Tata Kelola TIK, pada arsitektur tata kelola SPBE, keamanan informasi dijadikan aspek tersendiri yang dianggap sejajar dengan tata kelola TIK.

### 5.7.1. Prinsip-prinsip Tata Kelola TIK

Mengacu pada *good practice* COBIT 2019, terdapat enam prinsip tata kelola TIK, yaitu:

- 1) Tata kelola TIK harus memberikan nilai bagi setiap pemangku kepentingan. Suatu organisasi dibentuk untuk menciptakan nilai bagi pemangku kepentingannya. Oleh karena itu, ketika sebuah organisasi membuat keputusan tentang manajemen dan tata kelola TIK, prinsip panduannya adalah mempertimbangkan manfaat, risiko, dan sumber daya. Prinsip ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan yang berbeda dari pemangku kepentingan yang berbeda dan memastikan bahwa keputusan TIK mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan.
- 2) Tata Kelola TIK harus mengadopsi pendekatan holistik. Sistem tata kelola yang baik mengharuskan komponen-komponen ini bekerja sama secara holistik. Ini berarti bahwa organisasi yang menggunakan kerangka kerja ini mengadopsi pendekatan holistik dan mengintegrasikan tata kelola TI ke dalam tata kelola organisasi mereka secara keseluruhan.
- 3) Tata kelola TIK harus bersifat dinamis. Setelah organisasi menetapkan sistem tata kelola perusahaan, penting untuk memastikan bahwa sistem tersebut dinamis. Jika ada perubahan pada faktor desain, seperti perubahan strategi atau teknologi, organisasi mempertimbangkan perubahan ini dan menerapkan adaptasi bila diperlukan. Sistem tata kelola yang dinamis memiliki fleksibilitas untuk menjawab tantangan yang tidak terduga.
- 4) Tata kelola TIK terpisah dari manajemen TIK. Tata kelola dan manajemen adalah dua bidang yang memiliki berbagai tujuan, tanggung jawab, dan kegiatan. Keduanya membutuhkan struktur pendukung yang berbeda. Sementara tata kelola berarti mengevaluasi kebutuhan pemangku kepentingan dan memprioritaskan tujuan, manajemen mengacu pada pemantauan kegiatan organisasi dan memastikan bahwa mereka selaras dengan yang digariskan di bawah tata kelola.

- 5) Tata kelola TIK beradaptasi dengan kebutuhan organisasi. Prinsip ini mengharuskan organisasi menyesuaikan sistem tata kelola sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Organisasi menggunakan serangkaian faktor desain untuk menyesuaikan dan memprioritaskan komponen sistem tata kelola. Hal ini memungkinkan kerangka kerja untuk beradaptasi dengan organisasi yang berbeda dan memastikan bahwa sistem tata kelola berkelanjutan.
- 6) Tata kelola TIK diterapkan secara menyeluruh. Sistem tata kelola ujung ke ujung mengacu pada sistem terintegrasi tunggal yang terdiri dari semua fungsi perusahaan, dengan fokus pada fungsi TI. Sistem ini menyelaraskan kegiatan tata kelola dan manajemen dan menggunakan kerangka kerja COBIT 2019 untuk menyediakan satu sumber arahan. Pendekatan ini memastikan konsistensi dan cakupan sehingga organisasi dapat mengelola dan mengatur fungsi teknologi dan informasi mereka dengan sukses.

#### 5.7.2. Penerapan Manajemen SPBE

Sesuai dengan arahan Perpres 95/2018, terdapat delapan proses manajemen yang harus diterapkan di setiap IPPD. Kedelapan proses manajemen tersebut diuraikan sebagai berikut.

- 1) Manajemen Risiko SPBE. Manajemen Risiko SPBE adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE. Manajemen Risiko SPBE mengacu pada Permen PANRB No. 5/2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE. Pemda Sidenreng Rappang perlu menetapkan dan menerapkan manajemen risiko SPBE yang diadopsi dari Permen PANRB tersebut.
- 2) Manajemen Keamanan Informasi. Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE. Strategi keamanan informasi ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE dengan berdasarkan risiko SPBE.

- 3) **Manajemen Data.** Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data. Manajemen Data mengacu pada Permen PPN No. 16/2020 tentang Manajemen Data SPBE. Salah satu bentuk penerapan manajemen data adalah terbentuknya Forum Satu Data.
- 4) **Manajemen Aset TIK.** Manajemen aset TIK bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK. Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Aset TIK yang dikelola tidak hanya terbatas pada perangkat keras dan perangkat lunak, namun juga mencakup data dan informasi, SDM, lisensi, layanan yang disediakan oleh pihak ketiga, dan SOP.
- 5) **Pemenuhan Kompetensi SDM SPBE.** Manajemen SDM bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. Manajemen SDM dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan SDM dalam SPBE.
- 6) **Manajemen Pengetahuan.** Manajemen Pengetahuan adalah proses yang dilakukan untuk mendokumentasi pengalaman dan pengetahuan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi SPBE guna meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Rangkaian proses manajemen pengetahuan dimulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- 7) **Manajemen Perubahan.** Manajemen Perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. Manajemen Perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

- 8) Manajemen Layanan SPBE. Manajemen Layanan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE. Manajemen Layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.

#### 5.7.3. Pelaksanaan Audit TIK

Audit TIK pada dasarnya adalah bagian dari proses peningkatan keamanan TIK. Sesuai dengan Perpres 95/2018, audit TIK terdiri dari tiga jenis, yaitu:

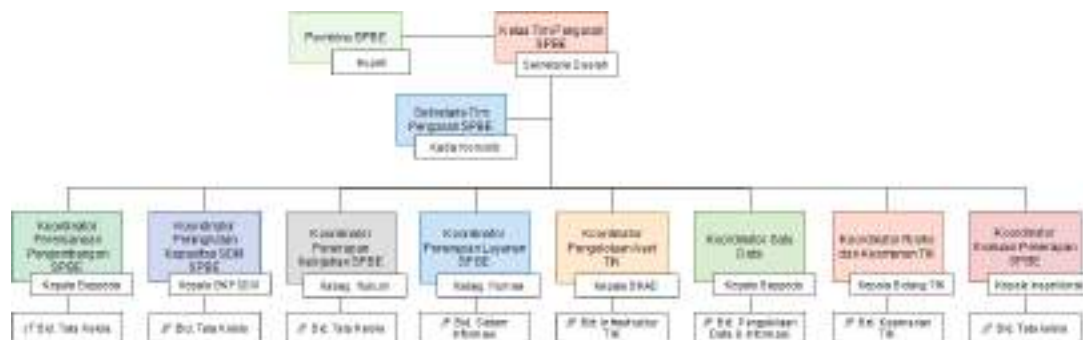
- 1) Audit Infrastruktur SPBE. Audit infrastruktur SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE yang meliputi:
  - a) penerapan tata kelola dan manajemen infrastruktur SPBE;
  - b) infrastruktur SPBE;
  - c) kinerja infrastruktur SPBE yang dihasilkan; dan
  - d) aspek infrastruktur SPBE lainnya.
- 2) Audit Aplikasi SPBE. Audit Aplikasi SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE yang meliputi:
  - a) Audit aplikasi umum; dan
  - b) Audit aplikasi khusus.
- 3) Audit Keamanan SPBE. Audit keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Keamanan SPBE yang terdiri atas:
  - a) Audit Keamanan Aplikasi; dan
  - b) Audit Keamanan Infrastruktur.

#### 5.7.4. Rekomendasi Koordinasi Pengelolaan TIK

Pengelolaan TIK perlu dikoordinasikan dengan baik dan konsisten. Oleh karena itu penetapan peran Tim Koordinator SPBE, sebagaimana yang menjadi arahan Perpres 95/2018, menjadi sangat krusial. Saat ini di lingkungan Pemda Sidenreng Rappang, Tim Koordinasi SPBE telah ditetapkan. Namun demikian dirasakan perlu untuk memutakhirkan Keputusan Bupati tersebut dengan penekanan bahwa peran pengelolaan SPBE secara keseluruhan tidak hanya menjadi tugas Dinas Kominfo,

namun merupakan tanggung jawab bersama dari setiap unit kerja yang ada di lingkungan Pemda Sidenreng Rappang. Oleh karena itu, Keputusan Bupati tersebut perlu dimutakhirkan dengan pembagian tugas SPBE ke setiap anggota Tim Koordinasi SPBE.

Susunan Tim Koordinasi SPBE direkomendasikan sebagaimana pada gambar berikut.



Gambar 19. Tim Koordinasi SPBE

Koordinasi pengelolaan TIK yang mengungkit peran dari masing-masing satuan kerja atas pengembangan dan penerapan SPBE diusulkan sebagai berikut:

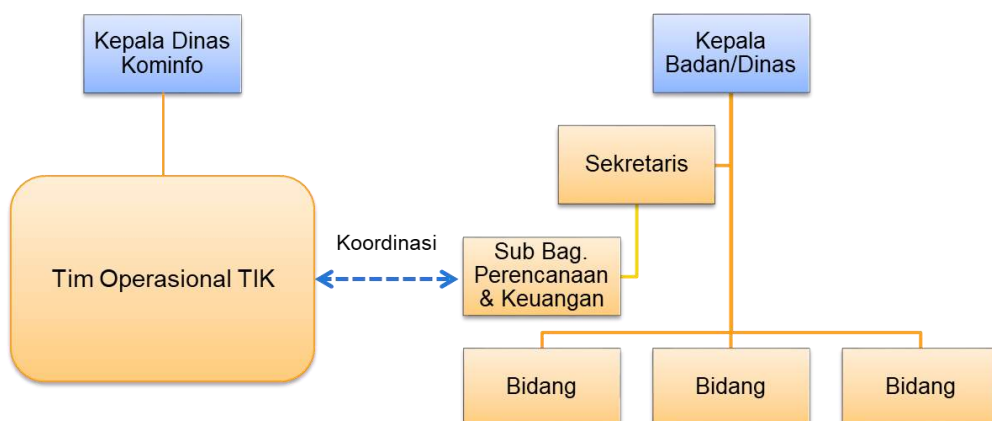
- Tim Pengarah mendapat pembinaan, pengarahan, dan melakukan pelaporan berkala ke Pembina SPBE yang dijabat oleh Bupati. Pelaporan berkala dilakukan minimal satu kali dalam setahun, atau disarankan dua kali dalam setahun.
- Tim Pengarah SPBE perlu melakukan koordinasi rutin, minimal dua kali dalam setahun.
- Tim Pengarah SPBE diketuai oleh Ketua Tim Pengarah SPBE, diusulkan untuk dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- Sekretaris Tim Pengarah diusulkan untuk dijabat oleh Kepala Diskominfo.
- Masing-masing anggota lainnya mendapatkan tugas spesifik untuk menjadi koordinator bidang SPBE tertentu (seperti pada diagram), yaitu:
  - o Kepala Bappelitbang sebagai Koordinator Perencanaan Pengembangan SPBE dan Koordinator Satu Data.

- o Kepala BKPP sebagai Koordinator Peningkatan Kapasitas SDM SPBE.
  - o Kepala Bagian Hukum sebagai Koordinator Penerapan Kebijakan SPBE.
  - o Kepala Bagian Humas sebagai Koordinator Penerapan Layanan SPBE.
  - o Kepala BPKD sebagai Koordinator Pengelolaan Aset TIK.
  - o Kepala Bidang TIK sebagai Koordinator Risiko dan Keamanan SPBE.
  - o Kepala Inspektorat sebagai Koordinator Evaluasi Penerapan SPBE.
- Setiap koordinator bidang SPBE dapat didampingi/diwakili oleh koordinator teknis yang ditunjuk oleh koordinator, atau ditunjuk oleh Ketua Tim Pengarah SPBE.

Tugas-tugas tim lainnya yang masih terkait SPBE, misalkan Forum Satu Data, Tim Keamanan Informasi, dll, diusulkan untuk dileburkan menjadi tugas Tim Koordinator SPBE, sesuai dengan bidangnya masing-masing.

#### 5.7.5. Rekomendasi Fungsi Pengelola TIK pada OPD

Untuk memastikan sinergi operasional TIK antara OPD dengan Dinas Kominfo, maka perlu ditempatkan fungsi pengelolaan TIK di masing-masing OPD. Hal ini sekaligus dapat menjaga keberlangsungan layanan TIK di setiap OPD karena penanganan masalah terkait TIK dapat segera diatasi.



Gambar 20. Rekomendasi Penempatan Fungsi TIK Pada OPD

Fungsi pengelola TIK di setiap OPD direkomendasikan ditempatkan sebagai bagian dari Subbag Perencanaan dan Keuangan yang berada di bawah Sekretariat. Tentunya, penempatan ini akan disesuaikan dengan karakteristik di masing-masing OPD, sehingga pada beberapa OPD dimungkinkan menempatkan peran TIK pada bidang tertentu.

Sebagai catatan tambahan, peran TIK sedapat mungkin dilaksanakan oleh dua orang personel yang minimal salah satunya berstatus ASN. Hal ini untuk menghindari ketergantungan pada personel tunggal dalam operasional TIK.

#### 5.7.6. Rekomendasi Peningkatan Kapasitas SPBE

Semakin cepatnya perkembangan teknologi menyebabkan semakin cepatnya bisnis berputar. Kemajuan teknologi dalam kecerdasan buatan, *machine learning*, *big data*, dsb. terus mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, memasarkan, dan membuat keputusan.

Kesalahan besar yang dilakukan pada umumnya organisasi adalah melakukan implementasi berbagai teknologi baru tetapi tidak memberikan pelatihan keterampilan digital yang memadai kepada pegawainya. Keterbatasan kemampuan digital yang dimiliki (sebagian besar) pegawai pada akhirnya akan menghambat kemajuan dan transformasi digital organisasi yang mengakibatkan tertinggalnya organisasi dibandingkan dengan organisasi yang memiliki pegawai dengan tingkat kemampuan digital yang tinggi.

Oleh karena itu, Pemda Sidenreng Rappang perlu memiliki dan menjalankan program pelatihan peningkatan digital untuk memastikan pemanfaatan teknologi secara optimal. Peningkatan kemampuan digital pegawai dapat mengarah pada transformasi digital yang positif secara keseluruhan.

Sebagaimana yang menjadi arahan dari SPBE, terdapat minimum enam bidang TIK yang harus dimiliki oleh instansi pemerintah, yaitu proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE.

Selain dari keenam bidang tersebut, disarankan untuk meningkatkan kapasitas pada bidang manajemen proyek TIK, tata kelola TIK, dan audit TIK. Keseluruhan bidang tersebut sebaiknya dilatihkan secara lintas fungsi.

Tabel 5. Rekomendasi Peningkatan Kapasitas

| No. | Bidang TIK                 | Contoh Topik Pelatihan                                                                                                      | OPD Peserta                                                                                    |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Proses bisnis pemerintahan | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan peta proses bisnis</li> <li>▪ Business process reengineering</li> </ul> | Semua OPD                                                                                      |
| 2   | Arsitektur SPBE            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan arsitektur TIK</li> <li>▪ TOGAF</li> </ul>                              | Semua OPD                                                                                      |
| 3   | Data dan informasi         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Big data</li> <li>▪ Pengelolaan data</li> </ul>                                    | Semua OPD                                                                                      |
| 4   | Keamanan SPBE              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ COBIT</li> <li>▪ ISO 27001</li> </ul>                                              | Semua OPD                                                                                      |
| 5   | Aplikasi SPBE              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agile/SCRUM</li> </ul>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bappelitbang</li> <li>▪ Dinas Kominfo</li> </ul>      |
| 6   | Infrastruktur SPBE         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Manajemen Aset TIK</li> <li>▪ ITIL V4</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Kominfo</li> <li>▪ Pengelola TIK OPD</li> </ul> |
| 7   | Manajemen proyek TIK       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Manajemen Proyek TIK</li> <li>▪ Manajemen Kualitas</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bappelitbang</li> <li>▪ Dinas Kominfo</li> </ul>      |
| 8   | Tata kelola TIK            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ COBIT</li> <li>▪ ISO 31000</li> </ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Semua OPD</li> </ul>                                  |
| 9   | Audit TIK                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ COBIT</li> </ul>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Kominfo</li> <li>▪ Inspektorat</li> </ul>       |

Pelaksanaan pelatihan tersebut dapat bekerja sama dengan Instansi Pusat, Perguruan Tinggi, ataupun lembaga pelatihan lainnya.

## 6. Peta Rencana

Berdasarkan target arsitektur yang telah diuraikan sebelumnya, maka disusunlah peta rencana yang dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi seluruh OPD dalam pengembangan TIK selama lima tahun ke depan. Peta rencana tersebut ditunjukkan pada tabel berikut.

| No.           | Muatan/Proyek/<br>Kegiatan                               | OPD                                               | Luaran                                                             | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>1.</b>     | <b>Tata Kelola</b>                                       |                                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |
| <b>1.1.</b>   | Penguatan Tata Kelola SPBE                               |                                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |
| <b>1.1.1.</b> | Pemutakhiran Perbup tentang SPBE                         | Diskominfo dan Bagian Hukum                       | Perbup tentang Penyelenggaraan SPBE yang telah termutakhirkan.     | ✓    |      |      |      |      |
| <b>1.1.2.</b> | Pemutakhiran Perbup tentang Tim Koordinasi               | Diskominfo dan Bagian Hukum                       | Kepbup tentang Tim Koordinasi SPBE yang telah termutakhirkan.      | ✓    |      |      |      |      |
| <b>1.1.3.</b> | Penetapan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE               | Bappelitbang, Diskominfo, dan Bagian Hukum        | Perbup/Kepbup tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE.            | ✓    |      |      |      |      |
| <b>1.1.4.</b> | Reviu pelaksanaan Peta Rencana SPBE                      | Tim Koordinasi SPBE                               | Hasil reviu pelaksanaan Peta Rencana SPBE.                         |      | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| <b>1.1.5.</b> | Penyusunan dan penetapan peta proses bisnis              | Bappelitbang, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum | Perbup/Kepbup tentang Peta Proses Bisnis.                          | ✓    |      |      |      |      |
| <b>1.1.6.</b> | Penyusunan pedoman pembangunan dan pengembangan aplikasi | Diskominfo dan Bagian Hukum                       | Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang telah disahkan. | ✓    |      |      |      |      |
| <b>1.1.7.</b> | Penyusunan pedoman dan SOP pengelolaan Pusat Komputasi   | Diskominfo dan Bagian Hukum                       | Pedoman dan SOP Pengelolaan Pusat Komputasi yang telah disahkan.   | ✓    |      |      |      |      |
| <b>2.</b>     | <b>Manajemen</b>                                         |                                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |
| <b>2.1.</b>   | Penerapan Manajemen SPBE                                 |                                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |
| <b>2.1.1.</b> | Penyusunan pedoman manajemen risiko SPBE                 | Diskominfo                                        | Pedoman manajemen risiko SPBE yang telah disahkan.                 | ✓    |      |      |      |      |
| <b>2.1.2.</b> | Penerapan manajemen risiko SPBE                          | Semua OPD                                         | Formulir manajemen risiko yang terisi oleh setiap OPD              | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |

| No.     | Muatan/Proyek/<br>Kegiatan                        | OPD                  | Luaran                                                                                                     | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 2.1.3.  | Penyusunan kebijakan keamanan informasi           | Diskominfo           | Perbup/Kepbup tentang keamanan informasi                                                                   | ✓    |      |      |      |      |
| 2.1.4.  | Penyusunan pedoman manajemen keamanan informasi   | Diskominfo           | Pedoman manajemen keamanan informasi yang telah disahkan.                                                  | ✓    |      |      |      |      |
| 2.1.5.  | Penyusunan pedoman manajemen data                 | Diskominfo           | Pedoman manajemen data yang telah disahkan.                                                                | ✓    |      |      |      |      |
| 2.1.6.  | Penyusunan kamus data                             | Diskominfo           | Kamus data yang telah disahkan.                                                                            | ✓    | ✓    | ✓    |      |      |
| 2.1.7.  | Penyusunan pedoman manajemen aset TIK             | Diskominfo, BKAD     | Pedoman manajemen aset TIK yang telah disahkan.                                                            | ✓    |      |      |      |      |
| 2.1.8.  | Penyusunan IT asset register                      | Diskominfo           | Daftar aset TIK di seluruh OPD.                                                                            | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| 2.1.9.  | Penyusunan pedoman manajemen pengetahuan SPBE     | Diskominfo, Disarpus | Pedoman manajemen pengetahuan SPBE yang telah disahkan.                                                    | ✓    |      |      |      |      |
| 2.1.10. | Penyusunan pedoman manajemen perubahan            | Diskominfo           | Pedoman manajemen perubahan yang telah disahkan.                                                           | ✓    |      |      |      |      |
| 2.1.11. | Penyusunan pedoman manajemen layanan              | Diskominfo           | Pedoman manajemen layanan yang telah disahkan.                                                             | ✓    |      |      |      |      |
| 2.2.    | Peningkatan Kapasitas SDM SPBE                    |                      |                                                                                                            |      |      |      |      |      |
| 2.2.1.  | Penyusunan rencana peningkatan kapasitas SDM SPBE | BKPP, Diskominfo     | Rencana peningkatan kapasitas SDM SPBE.                                                                    | ✓    |      |      |      |      |
| 2.2.2.  | Peningkatan kapasitas SDM Dinas Kominfo           | BKPP                 | Pelatihan terkait SPBE (proses bisnis, data dan informasi, arsitektur, aplikasi, infrastruktur, keamanan). | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| 2.2.3.  | Peningkatan kapasitas SDM SPBE lintas fungsi      | BKPP                 | Pelatihan terkait SPBE (proses bisnis, data dan informasi, keamanan).                                      | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| 2.3.    | Manajemen Audit TIK                               |                      |                                                                                                            |      |      |      |      |      |

| No.    | Muatan/Proyek/<br>Kegiatan                | OPD                           | Luaran                                                        | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 2.3.1. | Audit Infrastruktur                       | Diskominfo dan Inspektorat    | Panduan Audit Infrastruktur dan hasil audit infrastruktur     | ✓    |      |      |      |      |
| 2.3.2. | Audit Aplikasi                            | Diskominfo dan Inspektorat    | Panduan Audit Aplikasi dan hasil audit Aplikasi               | ✓    |      |      |      |      |
| 2.3.3. | Audit Keamanan                            | Diskominfo dan Inspektorat    | Panduan Audit Keamanan dan hasil audit Keamanan               | ✓    |      |      |      |      |
| 3.     | <b>Layanan</b>                            |                               |                                                               |      |      |      |      |      |
| 3.1.   | Layanan Perizinan Sektor Pertanian        | DKP                           | Tersedianya layanan terkait perizinan sektor pertanian        | ✓    |      |      |      |      |
| 3.2.   | Layanan Perizinan Sektor Perikanan        | Dinas Pertanian dan Perikanan | Tersedianya layanan terkait perizinan sektor Perikanan        | ✓    |      |      |      |      |
| 3.3.   | Layanan Perizinan Sektor Perumahan Rakyat | DPRKP                         | Tersedianya layanan terkait perizinan sektor Perumahan Rakyat | ✓    |      |      |      |      |
| 3.4.   | Layanan Perizinan Sektor Pekerjaan Umum   | DISPUPR                       | Tersedianya layanan terkait perizinan sektor Pekerjaan Umum   | ✓    |      |      |      |      |
| 3.5.   | Layanan Perizinan Sektor Lingkungan Hidup | DLH                           | Tersedianya layanan terkait perizinan sektor Lingkungan Hidup | ✓    |      |      |      |      |
| 3.6.   | Layanan Perizinan Sektor Kesehatan        | DINKES                        | Tersedianya layanan terkait perizinan sektor Kesehatan        | ✓    |      |      |      |      |
| 3.7.   | Layanan Perizinan Sektor Perdagangan      | DISDAGKOP UKM                 | Tersedianya layanan terkait perizinan sektor Perdagangan      | ✓    |      |      |      |      |
| 3.8.   | Layanan Perizinan Sektor UMKM             | DISDAGKOP UKM                 | Tersedianya layanan terkait perizinan sektor UMKM             | ✓    | ✓    |      |      |      |
| 3.9.   | Layanan Perizinan Sektor Informasi        | DISKOMINFO                    | Tersedianya layanan terkait perizinan sektor Informasi        | ✓    | ✓    | ✓    |      |      |
| 3.10.  | Layanan Perizinan Sektor Pariwisata       | DISBUDPAR                     | Tersedianya layanan terkait perizinan sektor Pariwisata       | ✓    |      |      |      |      |

| No.    | Muatan/Proyek/<br>Kegiatan                                | OPD                               | Luaran                                                                                                                   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 3.11.  | Layanan Pemantauan Pembangunan Pekerjaan Umum             | DISPUPR                           | Tersedianya layanan terkait Pemantauan sektor Pekerjaan Umum                                                             | ✓    |      |      |      |      |
| 3.12.  | Layanan Pemantauan Pembangunan Perumahan Rakyat           | DPRKP                             | Tersedianya layanan terkait Pemantauan sektor Perumahan Rakyat                                                           | ✓    | ✓    |      |      |      |
| 3.13.  | Layanan Kesehatan Terpadu                                 | DINKES                            | Tersedianya layanan terkait sektor Kesehatan Terpadu                                                                     | ✓    |      |      |      |      |
| 3.14.  | Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi                       | DINSOS                            | Tersedianya layanan terkait sektor Bantuan Sosial Terintegrasi                                                           | ✓    |      |      |      |      |
| 3.15.  | Layanan Bantuan Pendidikan Terintegrasi                   | DISDIK                            | Tersedianya layanan terkait sektor Bantuan Pendidikan Terintegrasi                                                       | ✓    |      |      |      |      |
| 3.16   | Layanan Pendidikan                                        | DISDIK                            | Tersedianya layanan terkait sektor Pendidikan                                                                            | ✓    |      |      |      |      |
| 3.17.  | Layanan Administrasi Pemerintahan                         | SETDA                             | Tersedianya layanan terkait sektor Administrasi Pemerintahan                                                             | ✓    | ✓    |      |      |      |
| 3.18.  | Layanan Portal Satu Data Indonesia di Daerah              | Bappelitbang , Diskominfo         | Tersedianya layanan terkait sektor Portal Satu Data di Daerah                                                            | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| 4.     | <b>Aplikasi</b>                                           |                                   |                                                                                                                          |      |      |      |      |      |
| 4.1.   | Pengembangan & Integrasi Aplikasi Sektoral                |                                   |                                                                                                                          |      |      |      |      |      |
| 4.1.1. | Proyek Pengembangan Aplikasi Perizinan                    | Diskominfo dan OPD terkait bidang | Aplikasi, SOP, dan Dokumen lain terkait dengan aplikasi perizinan                                                        | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |      |
| 4.1.2. | Proyek Pengembangan Aplikasi Investasi dan Potensi Daerah | Diskominfo, DPMPTSP, Disbudpar    | Aplikasi, SOP, dan Dokumen lain terkait dengan aplikasi terkait investasi dan potensi daerah termasuk potensi pariwisata |      | ✓    | ✓    | ✓    |      |

| No.    | Muatan/Proyek/<br>Kegiatan                                          | OPD                                | Luaran                                                                                                                                                                                              | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 4.1.3. | Pengembangan Lanjutan SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit | Dinkes, RSUD                       | Aplikasi SIMRS yang tidak hanya digunakan untuk mengelola pendaftaran pasien, namun juga data kesehatan yang lainnya                                                                                | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |      |
| 4.1.4. | Pengembangan Aplikasi Kependudukan                                  | Disdukcapil, Diskominfo, Kecamatan | Aplikasi terkait dengan data kependudukan, dan layanan Pembuatan dokumen kependudukan (KK, Permohonan KTP, Ket. Pindah Penduduk, Surat Keterangan lainnya), pencatatan rekomendasi pernikahan, dsb. | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |      |
| 4.1.5. | Aplikasi pembuatan akta jual beli tanah                             | Diskominfo, Kecamatan              | Aplikasi pencatatan dan pembuatan akta jual beli tanah di kecamatan terkait                                                                                                                         | ✓    | ✓    | ✓    |      |      |
| 4.1.6. | Aplikasi perumahan umum masyarakat                                  | DPRKP                              | Aplikasi yang digunakan untuk melakukan pendataan dan pelayanan terkait perumahan bagi masyarakat umum                                                                                              | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |      |
| 4.1.7. | Aplikasi Manajemen Perpustakaan                                     | DisArsipPus                        | Aplikasi katalog dan manajemen buku perpustakaan (Pinjam Meminjam, Denda, dsb)                                                                                                                      | ✓    | ✓    | ✓    |      |      |

| No.     | Muatan/Proyek/<br>Kegiatan                                       | OPD          | Luaran                                                                                                                                                                          | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 4.1.8.  | Pengembangan <i>Dashboard</i> untuk Pimpinan Daerah              | Dikominfo    | Aplikasi yang dapat digunakan oleh pimpinan daerah untuk melihat informasi tentang daerah untuk pengambilan keputusan                                                           |      |      | ✓    | ✓    | ✓    |
| 4.1.9.  | Aplikasi Pendataan Fasilitas Pendidikan Dasar dan Anak Usia Dini | Disbudpar    | Aplikasi yang digunakan untuk mendata siswa dan fasilitas pendidikan dasar dan anak usia dini dan memberikan informasi terkait efektifitas zonasi/lokasi sekolah yang dilakukan |      | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| 4.1.10. | Aplikasi pendataan tenaga kesehatan                              | Dinkes, RSUD | Aplikasi yang digunakan untuk pendataan tenaga kesehatan                                                                                                                        | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| 4.1.11. | Pendataan Lokasi Lahan Terbuka Hijau dan Taman Bermain Anak      | Disbudpar    | Aplikasi ini digunakan untuk mendata dan melihat kecukupan taman terbuka hijau dan taman bermain anak                                                                           |      |      |      | ✓    | ✓    |
| 4.1.12. | Aplikasi pendataan perempuan                                     | DPPPA        | Aplikasi yang digunakan untuk mendata perempuan dan bidang keahliannya yang ada di Sidenreng Rappang dan di integrasikan ke data kependudukan                                   |      |      |      | ✓    | ✓    |

| No.     | Muatan/Proyek/<br>Kegiatan                                                | OPD                                  | Luaran                                                                                                                                                               | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 4.1.13. | Aplikasi pendataan tenaga kerja dan bidang keahlian                       | Disperin                             | Aplikasi yang digunakan untuk pendataan tenaga kerja, kecukupan tenaga kerja dan bidang keahlian. Data ini akan diintegrasikan ke Data kependudukan                  |      |      | ✓    | ✓    | ✓    |
| 4.1.14. | Aplikasi pendataan potensi dan Pariwisata                                 | Bappelitbang , Disbudpar, Diskominfo | Aplikasi yang digunakan untuk mendata potensi daerah (investasi, pariwisata, dan potensi lainnya) dan analisis efektifitas pemanfaatan potensi daerah                |      |      |      | ✓    | ✓    |
| 4.1.15. | Penambahan fungsionalitas website dinas pariwisata Kab. Sidenreng Rappang | Disbudpar                            | Penambahan fungsionalitas panduan wisata untuk wisatawan yang datang ke Kab. Sidenreng Rappang                                                                       | ✓    |      |      |      |      |
| 4.1.16. | Pengembangan Aplikasi Perizinan terpadu                                   | DPMPTSP                              | Aplikasi yang terkait dengan perizinan yang dilaksanakan di Sidenreng Rappang. Semua kegiatan perizinan akan bermula diaplikasi ini dan diarahkan ke OPD yang sesuai | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| 4.1.17. | Aplikasi Pemantauan Pekerjaan Umum                                        | DISPUPR                              | Aplikasi pemantauan Pekerjaan Umum                                                                                                                                   | ✓    | ✓    | ✓    |      |      |
| 4.1.18. | Aplikasi eLearning bagi Masyarakat umum                                   | Disdik                               | Aplikasi yang dapat digunakan untuk masyarakat umum terkait dengan materi pembelajaran sekolah dasar dan anak usia dini                                              | ✓    | ✓    |      |      |      |

| No.           | Muatan/Proyek/<br>Kegiatan                                                              | OPD                            | Luaran                                                                         | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>4.2.</b>   | Adopsi Aplikasi Umum Pemerintahan                                                       |                                |                                                                                |      |      |      |      |      |
| <b>4.2.1.</b> | Adopsi aplikasi SIMPEGNAS                                                               | BKPP, Diskominfo               | Tersedianya Data kepegawaian yang terintegrasi secara nasional                 | ✓    | ✓    |      |      |      |
| <b>4.2.2.</b> | Adopsi Aplikasi Srikandi                                                                | Disarpus, Diskominfo           | Tersedianya Data Kearsipan yang terintegrasi secara nasional                   | ✓    | ✓    |      |      |      |
| <b>4.2.3.</b> | Adopsi Aplikasi SIMAN                                                                   | Sekretariat Daerah, Diskominfo | Data BMD yang dikelola                                                         | ✓    | ✓    |      |      |      |
| <b>4.2.4.</b> | Adopsi Layanan Pengawasan seperti e-Audit, Gol Online KPK atau aplikasi sejenis lainnya | Inspektorat, Diskominfo        | Tersedianya data pengawasan                                                    | ✓    |      |      |      |      |
| <b>4.2.5.</b> | Integrasi aplikasi Kinalang dengan SP4N-Lapor                                           | Diskominfo                     | Laporan yang cepat direspon dan diterapkannya no wrong door policy             | ✓    | ✓    |      |      |      |
| <b>4.2.6.</b> | Adopsi dan pengembangan Aplikasi Satu Data Indonesia                                    | Diskominfo, Bappeda            | Tersedianya Data Daerah yang terintegrasi dan terbaru                          | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |      |
| <b>5.</b>     | <b>Infrastruktur</b>                                                                    |                                |                                                                                |      |      |      |      |      |
| <b>5.1.</b>   | Fasilitas Komputasi                                                                     | Diskominfo                     | Pengembangan infrastruktur Komputasi untuk layanan dan aplikasi yang diberikan |      |      |      | ✓    | ✓    |
| <b>5.1.1.</b> | Kajian optimasi penyediaan VM vs bare metal untuk colocation server OPD                 | Diskominfo                     | Laporan kajian kebutuhan colocation OPD                                        | ✓    |      |      |      |      |
| <b>5.1.2.</b> | Implementasi colocation server OPD                                                      | Diskominfo                     | Pooling seluruh server OPD pada Pusat Komputasi                                |      | ✓    | ✓    |      |      |
| <b>5.2.</b>   | <b>Sistem Integrasi</b>                                                                 |                                |                                                                                |      |      |      |      |      |
| <b>5.2.1.</b> | Perluasan jalur FO dari core switch ke setiap OPD                                       | Diskominfo                     | Implementasi jalur FO antara ODP dengan ONT di setiap OPD                      | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| <b>5.2.2.</b> | Kajian dan pengembangan sistem penghubung layanan (SPL)                                 | Diskominfo                     | Implementasi SPL                                                               |      | ✓    | ✓    |      |      |

| No.           | Muatan/Proyek/<br>Kegiatan                                             | OPD         | Luaran                                                         | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>5.3.</b>   | <b>Adopsi Platform</b>                                                 |             |                                                                |      |      |      |      |      |
| <b>5.3.1.</b> | Pengembangan platform aplikasi (SSO, Map Engine, Calendar, Repository) | Diskominfo  | Implementasi platform aplikasi                                 |      | ✓    | ✓    |      |      |
| <b>6.</b>     | <b>Keamanan SPBE</b>                                                   |             |                                                                |      |      |      |      |      |
| <b>6.1.</b>   | <b>Penguatan Keamanan SPBE</b>                                         |             |                                                                |      |      |      |      |      |
| <b>6.1.1.</b> | Penyusunan Standar Keamanan                                            | Diskominfo  | Standar Keamanan TIK yang disahkan                             | ✓    | ✓    | ✓    |      |      |
| <b>6.1.2.</b> | Penerapan Keamanan                                                     | Diskominfo  | Rekaman konfigurasi dan laporan penerapan keamanan TIK         | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| <b>6.1.3.</b> | Penilaian Kelaikan Keamanan SPBE                                       | Diskominfo  | Pengujian teknis keamanan TIK                                  | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| <b>7.</b>     | <b>Audit TIK</b>                                                       |             |                                                                |      |      |      |      |      |
| <b>7.1.</b>   | <b>Audit Infrastruktur SPBE</b>                                        |             |                                                                |      |      |      |      |      |
| <b>7.1.1.</b> | Audit internal infrastruktur SPBE                                      | Inspektorat | Laporan hasil audit infrastruktur SPBE                         | ✓    |      | ✓    |      | ✓    |
| <b>7.1.2.</b> | Audit eksternal infrastruktur                                          | Inspektorat | Laporan hasil audit infrastruktur oleh LATIK/BRIN              |      | ✓    |      | ✓    |      |
| <b>7.1.3.</b> | Pelatihan Audit TIK                                                    | Inspektorat | Tenaga yang memiliki kompetensi untuk melakukan Audit IT       | ✓    |      |      |      |      |
| <b>7.2.</b>   | <b>Audit Aplikasi SPBE</b>                                             | Inspektorat |                                                                |      |      |      |      |      |
| <b>7.2.1.</b> | Audit internal aplikasi SPBE                                           | Inspektorat | Laporan hasil audit aplikasi SPBE                              | ✓    |      | ✓    |      | ✓    |
| <b>7.2.2.</b> | Audit eksternal aplikasi SPBE                                          | Inspektorat | Laporan hasil audit aplikasi oleh LATIK/BRIN                   |      | ✓    |      | ✓    |      |
|               | Pelatihan Audit Aplikasi                                               | Inspektorat | Tenaga yang memiliki kompetensi untuk melakukan Audit Aplikasi | ✓    |      |      |      |      |
| <b>7.3.</b>   | <b>Audit Keamanan SPBE</b>                                             |             |                                                                |      |      |      |      |      |
| <b>7.3.1.</b> | Audit internal keamanan SPBE                                           | Inspektorat | Laporan hasil audit keamanan SPBE                              | ✓    |      | ✓    |      | ✓    |

| No.    | Muatan/Proyek/<br>Kegiatan                | OPD         | Luaran                                                                 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 7.3.1. | Audit eksternal keamanan SPBE             | Inspektorat | Laporan hasil audit keamanan oleh LATIK/BSSN                           |      | √    |      | √    |      |
|        | Pelatihan Audit Keamanan Sistem Informasi | Inspektorat | Tenaga yang memiliki kompetensi untuk melakukan Audit Sistem Informasi | √    |      |      |      |      |

Selanjutnya, perencanaan suatu proyek implementasi Peta Rencana perlu dilakukan melalui tahap perencanaan yang melibatkan kegiatan:

- Kajian kelayakan proyek yang akan diajukan kepada Kepala Dinas/Badan, atau Sekretaris Daerah
- Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) proyek
- Pendefinisian tolok ukur keberhasilan proyek.

Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE ini dapat digunakan sebagai sumber acuan bagi kegiatan-kegiatan tersebut. Adalah sangat penting bagi keakuratan hasil kegiatan ini untuk melibatkan pihak-pihak yang akan menggunakan keluaran dari proyek ini, misalnya end user atau pemilik proses bisnis yang didukung oleh sistem yang akan dikembangkan.

## 6.1. Perencanaan Proyek

Tolok ukur keberhasilan proyek dibutuhkan untuk memantau tercapainya tujuan proyek, yaitu dengan mengukur indikator-indikator yang menunjukkan bahwa keluaran dari proyek benar-benar memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan sesuai rencana semula. Tanda-tanda tidak tercapainya tujuan proyek, jika terdeteksi secara dini, dapat mempercepat pihak manajemen untuk melakukan intervensi atau koreksi sebelum kerugian akibat pemakaian sumber daya yang tidak produktif membengkak. Tolok ukur ini didefinisikan bersama-sama dengan pengguna atau pemilik proses bisnis yang terkait dalam proyek ini.

## 6.2. Piloting dan Roll Out

Untuk mengurangi risiko kegagalan implementasi proyek teknologi informasi perlu dilakukan proyek pendahulu (pilot project) setelah dirasa layak untuk dilanjutkan dan telah diperbaiki hal-hal yang perlu disempurnakan barulah setelah itu dilakukan roll out dengan skala yang

lebih besar. Sebagai contoh, pembangunan suatu sistem dapat diterapkan terlebih dahulu pada 2-3 OPD sebagai pilot project. Apabila sudah teruji keberhasilannya maupun stabil penggunaannya, implementasi dapat dilanjutkan dengan implementasi ke semua OPD.

### **6.3. Manajemen Perubahan**

Penerapan TIK merupakan salah satu cara yang ditempuh organisasi dalam melakukan perubahan, maka sudah selayaknya diterapkan juga manajemen perubahan yang memadai. Organisasi yang telah sukses dalam mengeksekusi proyek-proyek teknologi informasi biasanya melakukan serangkaian kegiatan manajemen perubahan baik sebelum, mengiringi dan pasca implementasi teknologi informasi. Kegiatan manajemen perubahan khas proyek teknologi informasi perlu dilakukan di lingkungan Pemda Sidenreng Rappang disesuaikan kondisi yang ada. Berikut ini adalah contoh kegiatan tersebut:

1. Pembentukan tim/kelompok kerja. Pembentukan tim atau struktur adhoc yang bertanggung jawab atas kesuksesan atau kegagalan implementasi teknologi informasi yang terdiri dari perwakilan dari manajemen masing-masing OPD.
2. Pelatihan manajemen perubahan. Kelompok kerja penanggung jawab yang telah dibentuk diberikan pembekalan dengan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan manajemen perubahan yang relevan dengan proyek implementasi TIK.
3. Komunikasi intensif. Target utama komunikasi intensif ini adalah champion di masing-masing unit kerja. Yang dikomunikasikan adalah target yang akan dicapai, apa yang menjadi manfaat dari implementasi teknologi informasi, konsekuensi yang akan ditanggung, serta usaha yang diperlukan untuk mencapai target-target yang telah dicanangkan. Pendekatan komunikasi yang digunakan harus benar-benar disesuaikan dengan kondisi di lingkungan Pemda Sidenreng Rappang.

4. Sosialisasi. Setelah pendekatan komunikasi mulai dilakukan maka hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah sosialisasi yang sifatnya lebih global, dengan target seluruh personel dari masing-masing satuan kerja. Pesan yang dibawa masih sama dengan pesan yang disampaikan pada tahap komunikasi intensif, hanya dalam kadar yang lebih luas.
5. Pelatihan *end-user*/pengguna. kegiatan pelatihan untuk pengguna yang berperan langsung dalam proses bisnis yang menjadi target dari implementasi TIK yang dilakukan.
6. Resolusi masalah. Kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi/memitigasi/ memberikan solusi *workaround* apabila terjadi permasalahan yang muncul seiring dengan proses implementasi.

## 7. Penutup

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kab. Sidenreng Rappang tahun 2023 – 2027 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan RPJMD Kab. Sidenreng Rappang dengan berpedoman pada Perpres 132 Tahun 2022. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE ini diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian Visi, Misi, dan Prioritas Pembangunan Kab. Sidenreng Rappang melalui pemanfaatan TIK, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Keberhasilan pelaksanaan implementasi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sangat tergantung dari komitmen seluruh pihak, termasuk juga dukungan anggaran dan penyediaan SDM yang memiliki kompetensi yang memadai. Untuk itu diharapkan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE ini dituangkan menjadi suatu ketetapan atau keputusan pimpinan daerah untuk secara sungguh-sungguh dan konsisten melaksanakannya dengan tetap memperhatikan aspek penyesuaian yang ada berdasarkan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan perkembangan teknologi.

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE selanjutnya juga digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan TIK di seluruh OPD lingkup Pemda Sidenreng Rappang, yang selanjutnya akan direview dan diperbarui setelah

ditetapkannya RPJMD Kab. Sidenreng Rappang untuk periode berikutnya dan juga menyesuaikan kemajuan TIK yang berkembang sangat cepat dan tuntutan kebutuhan yang ada pada saat itu.

Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



A small, handwritten mark or signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

## LAMPIRAN 1 METADATA ARSITEKTUR LAYANAN

| ID             | Nama Layanan                                | Tujuan Layanan                                                                               | Fungsi Layanan | Unit Pelaksana<br>Unit Kerja<br>(Dependency) | Kementerian/Lembaga Terkait<br>(Dependency) | RAL Level 1<br>(Dependency) | RAL Level 2<br>(Dependency) | RAL Level 3<br>(Dependency)                | RAL Level 4<br>(Dependency)             |
|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| SIDRAP-DAL.001 | Pencegahan penyakit hewan                   | Melakukan Vaksinasi kepada Hewan agar tercegah dari penyakit                                 | TBD            | Dinas Peternakan dan Perikanan               | Kementrian Pertanian                        | RAL.01 LAYANAN PUBLIK       | RAL.01.09 PETERNAKAN N      | RAL.01.09.01 PEMBINAAN PETERNAKAN REGIONAL | RAL.01.09.03.01 LAYANAN KESEHATAN HEWAN |
| SIDRAP-DAL.002 | Pembibitan hewan melalui suntik             | Pembibitan hewan melalui rekayasa genetik dengan suntikan                                    | TBD            | Dinas Peternakan dan Perikanan               | Kementrian Pertanian                        | RAL.01 LAYANAN PUBLIK       | RAL.01.09 PETERNAKAN N      | RAL.01.09.01 PEMBINAAN PETERNAKAN REGIONAL | RAL.01.09.03.01 LAYANAN KESEHATAN HEWAN |
| SIDRAP-DAL.003 | Bantuan sosial dengan memberikan bibit ikan | Merupakan sebuah bentuk bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam bentuk modal bibit | TBD            | Dinas Peternakan dan Perikanan               | Kementrian Pertanian                        | RAL.01 LAYANAN PUBLIK       | RAL.01.10 PERIKANAN         | RAL.01.10.01 PEMBINAAN PERIKANAN REGIONAL  | RAL.01.09.03.01 LAYANAN KESEHATAN HEWAN |
| SIDRAP-DAL.004 | Pemeriksaan Kebuntingan                     | Pemeriksaan kehamilan hewan                                                                  | TBD            | Dinas Peternakan dan Perikanan               | Kementrian Pertanian                        | RAL.01 LAYANAN PUBLIK       | RAL.01.09 PETERNAKAN N      | RAL.01.09.01 PEMBINAAN PETERNAKAN REGIONAL | RAL.01.09.03.01 LAYANAN KESEHATAN HEWAN |
| SIDRAP-DAL.005 | Pemeriksaan Kelahiran                       | Pemeriksaan kondisi hewan yang lahir                                                         | TBD            | Dinas Peternakan dan Perikanan               | Kementrian Pertanian                        | RAL.01 LAYANAN PUBLIK       | RAL.01.09 PETERNAKAN N      | RAL.01.09.01 PEMBINAAN PETERNAKAN REGIONAL | RAL.01.09.03.01 LAYANAN KESEHATAN HEWAN |
| SIDRAP-DAL.006 | Pemeriksaan kondisi hewan yang lahir        | Surat tentang kesehatan hewan yang keluar atau masuk kabupaten sidrap                        | TBD            | Dinas Peternakan dan Perikanan               | Kementrian Pertanian                        | RAL.01 LAYANAN PUBLIK       | RAL.01.09 PETERNAKAN N      | RAL.01.09.01 PEMBINAAN PETERNAKAN REGIONAL | RAL.01.09.03.01 LAYANAN KESEHATAN HEWAN |
| SIDRAP-DAL.007 | Surat Keterangan bahan asal hewan           | Merupakan sebuah surat keterangan pangan yang dihasilkan oleh hewan                          | TBD            | Dinas Peternakan dan Perikanan               | Kementrian Pertanian                        | RAL.01 LAYANAN PUBLIK       | RAL.01.09 PETERNAKAN N      | RAL.01.09.01 PEMBINAAN PETERNAKAN REGIONAL | RAL.01.09.03.01 LAYANAN KESEHATAN HEWAN |

|                |                                           |                                                                                                                                            |     |                                                                    |                      |                       |                      |                                            |                                         |
|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| SIDRAP-DAL.008 | Penandaan ternak                          | Pemasangan eartag pada hewan                                                                                                               | TBD | Dinas Peternakan dan Perikanan                                     | Kementrian Pertanian | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.09 PETERNAKAN | RAL.01.09.01 PEMBINAAN PETERNAKAN REGIONAL | RAL.01.09.03.01 LAYANAN KESEHATAN HEWAN |
| SIDRAP-DAL.009 | Layanan teknis                            | Penyuluhan teknis terkait komoditi yang dikembangkan di tingkat petani                                                                     | TBD | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan |                      | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.07 PERTANIAN  | RAL.01.07.01 PEMBINAAN PERTANIAN REGIONAL  | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN       |
| SIDRAP-DAL.010 | Layanan Konsultasi                        | Pemberian layanan konsultasi apabila petani mengalami permasalahan yang terjadi dilapangan                                                 | TBD | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan |                      | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.07 PERTANIAN  | RAL.01.07.01 PEMBINAAN PERTANIAN REGIONAL  | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN       |
| SIDRAP-DAL.011 | Fasilitasi sarana dan prasarana pertanian | Memfasilitasi bantuan prasarana seperti alat pertanian, bangunan, gudang, dan alat pengolah tanah, sarana pupuk, dan obat-obatan pertanian | TBD | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan |                      | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.07 PERTANIAN  | RAL.01.07.01 PEMBINAAN PERTANIAN REGIONAL  | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN       |
| SIDRAP-DAL.012 | Bimbingan teknis                          | Melakukan pelatihan-pelatihan, kajian antar wilayah, dan pengiriman petani untuk magang                                                    | TBD | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan |                      | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.07 PERTANIAN  | RAL.01.07.01 PEMBINAAN PERTANIAN REGIONAL  | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN       |
| SIDRAP-DAL.013 | Pengadaan Barang dan jasa                 | Melakukan pengadaan barang dan jasa untuk petani                                                                                           | TBD | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan |                      | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.07 PERTANIAN  | RAL.01.07.01 PEMBINAAN PERTANIAN REGIONAL  | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN       |
| SIDRAP-DAL.014 | Pengelolaan Anggaran                      | Melakukan pengelolaan anggaran dan keuangan, pemantauan dan pelaporan keuangan                                                             | TBD | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan |                      | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.02.02 KEUANGAN   | RAL.01.07.01 PEMBINAAN PERTANIAN REGIONAL  | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN       |
| SIDRAP-DAL.015 | Pemetaan geografis lahan pertanian        | Melakukan pemetaan geografis untuk menentukan wilayah lahan pertanian di kabupaten sidrap                                                  | TBD | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan |                      | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.07 PERTANIAN  | RAL.01.07.01 PEMBINAAN PERTANIAN REGIONAL  | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN       |

|                |                                                            |                                                                                                                                         |     |                                                                    |  |                                          |                                           |                                           |                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| SIDRAP-DAL.016 | Pelaporan sektor pertanian dan pangan                      | Melakukan pengumpulan, melaporkan dan mengelola data dan informasi terkait dengan sektor pertanian dan tanaman pangan secara elektronik | TBD | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.07 PERTANIAN                       | RAL.01.07.01 PEMBINAAN PERTANIAN REGIONAL | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.017 | Pengadaan proposal dan permohonan program sektor pertanian | Melakukan pengajuan, mengelola, dan mengevaluasi proposal atau permohonan yang berkaitan dengan proyek, program di sektor pertanian     | TBD | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.07 PERTANIAN                       | RAL.01.07.01 PEMBINAAN PERTANIAN REGIONAL | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.018 | Pelaporan hasil program atau proyek di sektor pertanian    | Melakukan pantauan dan mengevaluasi program-program dan proyek-proyek yang telah diimplementasikan dalam sektor pertanian               | TBD | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.07 PERTANIAN                       | RAL.01.07.01 PEMBINAAN PERTANIAN REGIONAL | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.019 | Pengelolaan lahan usaha tani                               | mengelola dan melacak data terkait dengan lahan usaha tani, petani, dan kegiatan pertanian                                              | TBD | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.07 PERTANIAN                       | RAL.01.07.01 PEMBINAAN PERTANIAN REGIONAL | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.020 | Pemberian pupuk bersubsidi                                 | Program bantuan kepada petani mengenai pupuk bersubsidi                                                                                 | TBD | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.07 PERTANIAN                       | RAL.01.07.01 PEMBINAAN PERTANIAN REGIONAL | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.021 | Penilaian Kinerja kepegawaian                              | Menilai kinerja kepegawaian untuk peningkatan jabatan                                                                                   | TBD | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                   |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.04 APARATUR NEGARA                 | RAL.02.04.03 MANAJEMEN ASN                | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.022 | Kearsipan persuratan                                       | Pengarsipan seluruh surat-surat di OPD Kab. Sidrap                                                                                      | TBD | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                   |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN | RAL.01.42.05 PEMBINAAN KEPUSTAKAAN        | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.023 | Layanan Perpustakaan                                       | Layanan untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan keperustakaan                                                                        | TBD | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                   |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN | RAL.01.42.05 PEMBINAAN KEPUSTAKAAN        | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |

|                |                                                                          |                                                                                                           |     |                                  |  |                                          |                                           |                                    |                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|--|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| SIDRAP-DAL.024 | Layanan OPAC (Online Public Acces Catalog)                               | Adalah layanan untuk akses seluruh katalog keperustakaan berbasis online                                  | TBD | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN | RAL.01.42.05 PEMBINAAN KEPUSTAKAAN | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN                   |
| SIDRAP-DAL.025 | Pembuatan Kartu Perpustakaan                                             | Layanan untuk pembuatan kartu perpustakaan bagi penggiat literasi dan masyarakat yang ingin meminjam buku | TBD | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN | RAL.01.42.05 PEMBINAAN KEPUSTAKAAN | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN                   |
| SIDRAP-DAL.026 | penerima segala jenis bantuan pemerintah                                 | Pengelolaan bantuan                                                                                       | TBD | Dinas Sosial                     |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.26 SOSIAL                          | RAL.01.26.03 MANAJEMEN SOSIAL      | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN                   |
| SIDRAP-DAL.027 | Koordinasi Ke provinsi                                                   | Pemulangan warga terlantas Pendaftarabn calon org tua angkat                                              | TBD | Dinas Sosial                     |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.26 SOSIAL                          | RAL.01.26.03 MANAJEMEN SOSIAL      | RAL.02.04.02.02 TATA LAKSANA                        |
| SIDRAP-DAL.028 | permintaan bantuan social<br>-Lansi<br>-Anak<br>-disabilitas<br>-bencana | Permintaan bantuan Sosial dari Pusat                                                                      | TBD | Dinas Sosial                     |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.26 SOSIAL                          | RAL.01.26.03 MANAJEMEN SOSIAL      | RAL.02.05.05.03 PEMASYARAKATAN UUD 45 DAN PANCASILA |
| SIDRAP-DAL.029 | BANTUAN yatimpiatu, bpnt,bantuan pkh                                     | BANTUAN yatimpiatu, bpnt,bantuan pkh dari BRI,MANDIRI,BNI                                                 | TBD | Dinas Sosial                     |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.26 SOSIAL                          | RAL.01.26.03 MANAJEMEN SOSIAL      | RAL.02.05.05.03 PEMASYARAKATAN UUD 45 DAN PANCASILA |
| SIDRAP-DAL.030 | Penyaluran beras                                                         | bantuan penyaluran Beras dari bulok                                                                       | TBD | Dinas Sosial                     |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.26 SOSIAL                          | RAL.01.26.03 MANAJEMEN SOSIAL      | RAL.02.05.05.03 PEMASYARAKATAN UUD 45 DAN PANCASILA |
| SIDRAP-DAL.031 | Bantuan pembayaran bpjs                                                  | Pengelolaan bantuan BPJS                                                                                  | TBD | Dinas Sosial                     |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.26 SOSIAL                          | RAL.01.26.03 MANAJEMEN SOSIAL      | RAL.02.05.05.03 PEMASYARAKATAN UUD 45 DAN PANCASILA |

|                |                           |                                                                                                                                                              |     |                                 |  |                                          |                      |                                                           |                                   |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| SIDRAP-DAL.032 | laporan KIA               | dokumen resmi yang menyediakan informasi terkait identitas anak, termasuk data pribadi, data orang tua, serta data kependudukan lainnya.                     | TBD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.31 PENDIDIKAN | RAL.01.26.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL                    | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.033 | Laporan KIP               | Bantuan biaya pendidikan kepada siswa dari keluarga tidak mampu.                                                                                             | TBD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.31 PENDIDIKAN | RAL.01.26.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL                    | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.034 | koordinasi                | Koordinasi untuk mengatasi anak putus sekolah di Sulawesi Selatan                                                                                            | TBD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.31 PENDIDIKAN | RAL.01.26.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL                    | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.035 | Data pokok pendidikan     | memantau dan mengelola data pendidikan secara komprehensif, termasuk data siswa, data sekolah, data tenaga pendidik, dan berbagai informasi terkait lainnya. | TBD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.31 PENDIDIKAN | RAL.01.31.01 MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.036 | manajemen kinerja pegawai | pemantauan dan evaluasi kinerja pegawai di berbagai instansi pemerintah di Indonesia                                                                         | TBD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.31 PENDIDIKAN | RAL.01.31.01 MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.037 | Bantuan dari BRI          | Bantuan dana pendidikan siswa                                                                                                                                | TBD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.31 PENDIDIKAN | RAL.01.31.01 MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.038 | presensi guru             | presensi guru menunjukkan waktu guru clock in (absen masuk) dan clock out (absen pulang) serta informasi detail seperti lokasi dan foto selfie.              | TBD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.31 PENDIDIKAN | RAL.01.31.01 MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |

|                |                                                    |                                                         |     |                                 |  |                                          |                      |                                                         |                                   |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| SIDRAP-DAL.039 | PENGAJUAN DANA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)          | untuk mengatasi anak putus sekolah di Sulawesi Selatan  | TBD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.31 PENDIDIKAN | RAL.01.31.01 MANAJEMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.040 | pengajuan tunjangan profesi guru                   | aplikasi pengajuan tunjangan profesi guru               | TBD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.31 PENDIDIKAN | RAL.01.31.01 MANAJEMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.041 | pembayaran tunjangan                               | aplikasi pembayaran tunjangan profesi guru              | TBD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.31 PENDIDIKAN | RAL.01.31.01 MANAJEMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.042 | Manajemen Aneka Tunjangan                          | aplikasi aneka tunjangan profesi guru                   | TBD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.31 PENDIDIKAN | RAL.01.31.01 MANAJEMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.043 | Pengajuan registrasi NITK bagi tenaga kependidikan | aplikasi data tenaga kependidikan sebagai dasar SK      | TBD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.31 PENDIDIKAN | RAL.01.31.01 MANAJEMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.044 | verifikasi dan validasi data tenaga kependidikan   | aplikasi verifikasi dan validasi data satuan Pendidikan | TBD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.31 PENDIDIKAN | RAL.01.31.01 MANAJEMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.045 | verifikasi dan validasi ijazah                     | aplikasi verifikasi dan validasi data ijazah            | TBD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.31 PENDIDIKAN | RAL.01.31.01 MANAJEMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |

|                |                                                            |                                                                                                                        |     |                                                        |  |                                          |                      |                                                         |                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| SIDRAP-DAL.046 | verifikasi dan validasi peserta didik                      | aplikasi verifikasi dan validasi data peserta didik                                                                    | TBD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                        |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.31 PENDIDIKAN | RAL.01.31.01 MANAJEMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAL.047 | memvalidasi data master GTK                                | aplikasi verifikasi dan validasi data pendidik dan tenaga kependidikan                                                 | TBD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                        |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.31 PENDIDIKAN | RAL.01.31.01 MANAJEMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAL.048 | monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara - DAK | memonitoring transaksi dalam SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web | TBD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                        |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.31 PENDIDIKAN | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH                            | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAL.049 | perencanaan anggaran kependidikan                          | aplikasi sinergi perencanaan anggaran kependidikan                                                                     | TBD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                        |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.31 PENDIDIKAN | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH                            | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAL.050 | alokasi dana kependidikan                                  | aplikasi dana alokasi khusus kependidikan                                                                              | TBD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                        |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.31 PENDIDIKAN | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH                            | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAL.051 | analisi perencanaan dan pembangunan                        | aplikasi data analisi perencanaan pembangunan dan pemetaan daerah                                                      | TBD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                        |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.31 PENDIDIKAN | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH                            | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAL.052 | pembelian barang dan jasa                                  | aplikasi pembelian barang dan jasa                                                                                     | TBD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                        |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.31 PENDIDIKAN | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH                            | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAL.053 | pembelian barang dan jasa                                  | aplikasi pembelian barang dan jasa yang dikelola UKPBJ                                                                 | TBD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                        |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.31 PENDIDIKAN | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH                            | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAL.054 | Pendataan Cukai Rokok                                      | Mendata Cukai rokok dipasar                                                                                            | TBD | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.29 KEAMANAN   | RAL.02.02.04 KEPABEANAN DAN CUKAI                       | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAL.055 |                                                            | Melakukan pemadaman di lokasi yang terdampak kebakaran                                                                 | TBD | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.29 KEAMANAN   | RAL.01.29.03 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM               | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAAN |

|                |                              |                                                                   |     |                                                        |  |                                          |                                      |                                                     |                                   |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| SIDRAP-DAL.056 | Pengendalian Hewan Buas      | Melakukan pengendalian terhadap hewan buas                        | TBD | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.29 KEAMANAN                   | RAL.01.29.03 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM           | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.057 | Pendataan Rokok Ilegal       | Melakukan pendataan terkait rokok-rokok yang beredar di pasaran   | TBD | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.29 KEAMANAN                   | RAL.01.29.03 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM           | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.058 | Persuratan masuk dan keluar  | Mendata Persuratan yang masuk dan keluar                          | TBD | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.29 KEAMANAN                   |                                                     | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.059 | -Pelaporan masyarakat        | Menindaki Pelaporan masyarakat                                    | TBD | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.29 KEAMANAN                   | RAL.01.29.03 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM           | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.060 | Penggajian karyawan          | Melakukan pendataan mengenai penggajian karyawan                  | TBD | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.29 KEAMANAN                   | RAL.01.29.03 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM           | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.061 | Penyusunan Renstra dan Renja | Perencanaan penyusunan Renstra dan Renja                          | TBD | Dinas Perhubungan                                      |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.02 KEUANGAN                   | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH                        | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.062 | Laporan keuangan             | Perencanaan laporan keuangan dinas perhubungan                    | TBD | Dinas Perhubungan                                      |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.02 KEUANGAN                   | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH                        | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN     |
| SIDRAP-DAL.063 | Barang jasa                  | Pengadaan sebuah barang dan jasa                                  | TBD | Dinas Perhubungan                                      |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.02 KEUANGAN                   | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH                        | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN     |
| SIDRAP-DAL.064 | Pegimputan data BPJS         | Pengimputan data-data BPJS                                        | TBD | Dinas Perhubungan                                      |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.08 ORGANISASI DAN TATA KELOLA | RAL.01.26.03 MANAJEMEN SOSIAL                       | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN     |
| SIDRAP-DAL.065 | Kearsipan persuratan         | Pengarsipan segala persuratan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | TBD | Dinas Perhubungan                                      |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.08 ORGANISASI DAN TATA KELOLA | RAL.01.42.06 PEMBINAAN ARSIP STATIS                 | RAL.02.04.02.02 TATA LAKSANA      |
| SIDRAP-DAL.066 | Izin Kendaraan bermotor      | Fasilitasi izin kendaraan bermotor                                | TBD | Dinas Perhubungan                                      |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.19 TRANSPORTASI               | RAL.01.19.01 KEMANANAN DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |

|                |                                                 |                                                                                                                                       |     |                                                        |  |                             |                                             |                                                              |                                               |
|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| SIDRAP-DAL.067 | Izin Penggunaan Jalan                           | Fasilitasi izin penggunaan jalan                                                                                                      | TBD | Dinas Perhubungan                                      |  | RAL.01<br>LAYANAN<br>PUBLIK | RAL.01.19<br>TRANSPORT<br>ASI               | RAL.01.19.01<br>KEMANANAN DAN<br>KESELAMATAN<br>TRANSPORTASI | RAL.02.04.02.<br>01 SISTEM<br>KELEMBAGA<br>AN |
| SIDRAP-DAL.068 | Izin Trayek                                     | Fasilitasi perizinan trayek                                                                                                           | TBD | Dinas Perhubungan                                      |  | RAL.01<br>LAYANAN<br>PUBLIK | RAL.01.19<br>TRANSPORT<br>ASI               | RAL.01.19.01<br>KEMANANAN DAN<br>KESELAMATAN<br>TRANSPORTASI | RAL.02.04.02.<br>01 SISTEM<br>KELEMBAGA<br>AN |
| SIDRAP-DAL.069 | Fasilitasi Perizinan Pelaku usaha               | Memberikan fasilitas rekomendasi untuk perizinan pelaku usaha                                                                         | TBD | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                    |  | RAL.01<br>LAYANAN<br>PUBLIK | RAL.01.16<br>PERIZINAN<br>DAN<br>AKREDITASI | RAL.01.06.02<br>PENGELOLAAN<br>PERDAGANGAN                   | RAL.02.04.02.<br>01 SISTEM<br>KELEMBAGA<br>AN |
| SIDRAP-DAL.070 | Fasilitas perizinan daftar gudang               | Memberikan fasilitas rekomendasi untuk perizinan daftar gudang                                                                        | TBD | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                    |  | RAL.01<br>LAYANAN<br>PUBLIK | RAL.01.16<br>PERIZINAN<br>DAN<br>AKREDITASI | RAL.01.06.02<br>PENGELOLAAN<br>PERDAGANGAN                   | RAL.02.04.02.<br>01 SISTEM<br>KELEMBAGA<br>AN |
| SIDRAP-DAL.071 | Fasilitasi perizinan waralaba                   | Memberikan perizinan rekomendasi waralaba                                                                                             | TBD | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                    |  | RAL.01<br>LAYANAN<br>PUBLIK | RAL.01.16<br>PERIZINAN<br>DAN<br>AKREDITASI | RAL.01.06.02<br>PENGELOLAAN<br>PERDAGANGAN                   | RAL.02.04.02.<br>01 SISTEM<br>KELEMBAGA<br>AN |
| SIDRAP-DAL.072 | Pemantauan Komonitas Barang-barang subsidi      | Pemantauan mengenai komoditas barang barang subsidi di masyarakat                                                                     | TBD | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                    |  | RAL.01<br>LAYANAN<br>PUBLIK | RAL.01.16<br>PERIZINAN<br>DAN<br>AKREDITASI | RAL.01.06.02<br>PENGELOLAAN<br>PERDAGANGAN                   | RAL.02.04.02.<br>01 SISTEM<br>KELEMBAGA<br>AN |
| SIDRAP-DAL.073 | Fasilitasi TKDN (Tingkat komponen dalam negeri) | Memfasilitasi dalam mendorong dan meningkatkan penggunaan komponen atau bahan produksi dalam negeri dalam produk atau proyek tertentu | TBD | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                    |  | RAL.01<br>LAYANAN<br>PUBLIK | RAL.01.16<br>PERIZINAN<br>DAN<br>AKREDITASI | RAL.01.06.02<br>PENGELOLAAN<br>PERDAGANGAN                   | RAL.02.04.02.<br>01 SISTEM<br>KELEMBAGA<br>AN |
| SIDRAP-DAL.074 | Fasilitasi Halal                                | Fasilitasi pemberian logo halal pada produk                                                                                           | TBD | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                    |  | RAL.01<br>LAYANAN<br>PUBLIK | RAL.01.16<br>PERIZINAN<br>DAN<br>AKREDITASI | RAL.01.06.02<br>PENGELOLAAN<br>PERDAGANGAN                   | RAL.02.04.02.<br>01 SISTEM<br>KELEMBAGA<br>AN |
| SIDRAP-DAL.075 | Fasilitasi HAKI                                 | Fasilitasi pemberian rekomendasi Hak kekayaan intelektual                                                                             | TBD | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                    |  | RAL.01<br>LAYANAN<br>PUBLIK | RAL.01.16<br>PERIZINAN<br>DAN<br>AKREDITASI | RAL.01.16.03<br>PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU              | RAL.02.04.02.<br>01 SISTEM<br>KELEMBAGA<br>AN |
| SIDRAP-DAL.076 | Perizinan Investasi dan Usaha                   | Membuat beberapa surat perizinan yang terkait dengan investasi dan usaha                                                              | TBD | Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu |  | RAL.01<br>LAYANAN<br>PUBLIK | RAL.01.16<br>PERIZINAN<br>DAN<br>AKREDITASI | RAL.01.16.03<br>PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU              | RAL.02.04.02.<br>01 SISTEM<br>KELEMBAGA<br>AN |

|                |                                                           |                                                                                                                                                                               |     |                                                                      |  |                                          |                                    |                                                    |                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| SIDRAP-DAL.077 | Perizinan Mendirikan Bangunan                             | Membuat izin untuk mendirikan bangunan di kabupaten sidrap                                                                                                                    | TBD | Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu               |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.16 PERIZINAN DAN AKREDITASI | RAL.01.16.03 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU          | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAL.078 | Perizinan Kesehatan                                       | Mendata tentang perizinan kesehatan                                                                                                                                           | TBD | Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu               |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.16 PERIZINAN DAN AKREDITASI | RAL.01.16.03 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU          | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAL.079 | Fasilitas Keuangan Desa                                   | Mendata pendanaan Pembangunan Keuangan Desa                                                                                                                                   | TBD | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.24 PEMERINTAHAN DAERAH      | RAL.01.21.03 PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PEDESAAN | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN      |
| SIDRAP-DAL.080 | Fasilitasi pengelolaan aset desa                          | Pendataan aset aset yang berada di desa                                                                                                                                       | TBD | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.24 PEMERINTAHAN DAERAH      | RAL.01.21.03 PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PEDESAAN | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAL.081 | Penyusunan Profil desa                                    | mengumpulkan, menganalisis, dan mendokumentasikan data dan informasi yang merinci karakteristik, kondisi, potensi, serta permasalahan dalam suatu desa atau wilayah pedesaan. | TBD | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.24 PEMERINTAHAN DAERAH      | RAL.01.21.03 PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PEDESAAN | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAL.082 | Penataan Desa                                             | Menata Pemilihan kepala desa dan mengatur pencablosan                                                                                                                         | TBD | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.24 PEMERINTAHAN DAERAH      | RAL.01.21.03 PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PEDESAAN | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAL.083 | Kartu pencari kerja(Angka satu)                           | Pembuatan kartu pencari kerja                                                                                                                                                 | TBD | Dinas Koperasi, UKM, ketenagakerjaan dan transmigrasi                |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.13 KOPERASI                 | RAL.01.32.05 PERENCANAAN KETENAGAKERJAAN NASIONAL  | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAL.084 | -Pengaduan Perselisihan tenaga kerja dengan pemberi kerja | Melayani berupa penyelesaian masalah ketika terjadi perselisihan antara tenaga kerja dengan pemberi tenaga kerja                                                              | TBD | Dinas Koperasi, UKM, ketenagakerjaan dan transmigrasi                |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.13 KOPERASI                 | RAL.01.32.05 PERENCANAAN KETENAGAKERJAAN NASIONAL  | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAAN |

|                |                                 |                                                                                                                |     |                                                                |  |                             |                               |                                                            |                                               |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| SIDRAP-DAL.085 | Pelatihan<br>ketenagakerjaan    | Pemberian pelatihan kepada<br>calon tenaga kerja sesuai<br>ktp kabupaten sidrap                                | TBD | Dinas Koperasi,<br>UKM,<br>ketenagakerjaan dan<br>transmigrasi |  | RAL.01<br>LAYANAN<br>PUBLIK | RAL.01.13<br>KOPERASI         | RAL.01.32.05<br>PERENCANAAN<br>KETENAGAKERJAAN<br>NASIONAL | RAL.02.04.02.<br>01 SISTEM<br>KELEMBAGA<br>AN |
| SIDRAP-DAL.086 | Laporan data Koprasi            | Penyusunan laporan data<br>data koprasi kabupaten<br>sidrap                                                    | TBD | Dinas Koperasi,<br>UKM,<br>ketenagakerjaan dan<br>transmigrasi |  | RAL.01<br>LAYANAN<br>PUBLIK | RAL.01.13<br>KOPERASI         | RAL.01.13.01<br>PEMBINAAN KOPERASI                         | RAL.02.04.02.<br>01 SISTEM<br>KELEMBAGA<br>AN |
| SIDRAP-DAL.087 | Sosialisasi Koprasi             | Pemberian sosialisasi<br>mengenai koprasi                                                                      | TBD | Dinas Koperasi,<br>UKM,<br>ketenagakerjaan dan<br>transmigrasi |  | RAL.01<br>LAYANAN<br>PUBLIK | RAL.01.13<br>KOPERASI         | RAL.01.13.01<br>PEMBINAAN KOPERASI                         | RAL.02.04.02.<br>01 SISTEM<br>KELEMBAGA<br>AN |
| SIDRAP-DAL.088 | Pencetakana ktp                 |                                                                                                                | TBD | dinas kependudukan<br>dan catatan sipil                        |  | RAL.01<br>LAYANAN<br>PUBLIK | RAL.01.23<br>KEPENDUD<br>UKAN | RAL.01.23.01<br>PEMBINAAN<br>KEPENDUDUKAN<br>REGIONAL      | RAL.02.04.02.<br>01 SISTEM<br>KELEMBAGA<br>AN |
| SIDRAP-DAL.089 | perpindahan masuk dan<br>keluar | mentransformasikan sistem<br>korespondensi yang asalnya<br>berbasis kertas menjadi<br>berbasis elektronik.     | TBD | dinas kependudukan<br>dan catatan sipil                        |  | RAL.01<br>LAYANAN<br>PUBLIK | RAL.01.23<br>KEPENDUD<br>UKAN | RAL.01.23.01<br>PEMBINAAN<br>KEPENDUDUKAN<br>REGIONAL      | RAL.02.04.02.<br>01 SISTEM<br>KELEMBAGA<br>AN |
| SIDRAP-DAL.090 | menata Administrasi             | menata Administrasi<br>Kependudukan agar lebih<br>tertib, dan database yang<br>sebelumnya berada di<br>daerah, | TBD | dinas kependudukan<br>dan catatan sipil                        |  | RAL.01<br>LAYANAN<br>PUBLIK | RAL.01.23<br>KEPENDUD<br>UKAN | RAL.01.23.01<br>PEMBINAAN<br>KEPENDUDUKAN<br>REGIONAL      | RAL.02.04.02.<br>01 SISTEM<br>KELEMBAGA<br>AN |
| SIDRAP-DAL.091 | Pembuatan Akta<br>kelahiran     |                                                                                                                | TBD | dinas kependudukan<br>dan catatan sipil                        |  | RAL.01<br>LAYANAN<br>PUBLIK | RAL.01.23<br>KEPENDUD<br>UKAN | RAL.01.23.01<br>PEMBINAAN<br>KEPENDUDUKAN<br>REGIONAL      | RAL.02.04.02.<br>01 SISTEM<br>KELEMBAGA<br>AN |
| SIDRAP-DAL.092 | Pembuatan Kartu<br>keluarga     |                                                                                                                | TBD | dinas kependudukan<br>dan catatan sipil                        |  | RAL.01<br>LAYANAN<br>PUBLIK | RAL.01.23<br>KEPENDUD<br>UKAN | RAL.01.23.01<br>PEMBINAAN<br>KEPENDUDUKAN<br>REGIONAL      | RAL.02.04.02.<br>01 SISTEM<br>KELEMBAGA<br>AN |
| SIDRAP-DAL.093 | Pembuatan akta kematian         |                                                                                                                | TBD | dinas kependudukan<br>dan catatan sipil                        |  | RAL.01<br>LAYANAN<br>PUBLIK | RAL.01.23<br>KEPENDUD<br>UKAN | RAL.01.23.01<br>PEMBINAAN<br>KEPENDUDUKAN<br>REGIONAL      | RAL.02.04.02.<br>01 SISTEM<br>KELEMBAGA<br>AN |

|                |                                                         |                                                                                                                                                      |     |                                      |  |                       |                          |                                              |                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| SIDRAP-DAL.094 | Akta perkawinan                                         |                                                                                                                                                      | TBD | dinas kependudukan dan catatan sipil |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.23 KEPENDUD UKAN  | RAL.01.23.01 PEMBINAAN KEPENDUDUKAN REGIONAL | RAL.02.04.02. 01 SISTEM KELEMBAGA AN |
| SIDRAP-DAL.095 | KIA                                                     |                                                                                                                                                      | TBD | dinas kependudukan dan catatan sipil |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.23 KEPENDUD UKAN  | RAL.01.23.01 PEMBINAAN KEPENDUDUKAN REGIONAL | RAL.02.04.02. 01 SISTEM KELEMBAGA AN |
| SIDRAP-DAL.096 | Aktivasi Identitas Kependudukan Digital ASN dan Non ASN |                                                                                                                                                      | TBD | dinas kependudukan dan catatan sipil |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.23 KEPENDUD UKAN  | RAL.01.23.01 PEMBINAAN KEPENDUDUKAN REGIONAL | RAL.02.04.02. 01 SISTEM KELEMBAGA AN |
| SIDRAP-DAL.097 | Komisi irigasi                                          |                                                                                                                                                      | TBD | Dinas PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR    |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM | RAL.01.17.05 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR     | RAL.02.04.02. 01 SISTEM KELEMBAGA AN |
| SIDRAP-DAL.098 | pengawasan Kelompok tani                                |                                                                                                                                                      | TBD | Dinas PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR    |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM | RAL.01.17.05 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR     | RAL.02.04.02. 01 SISTEM KELEMBAGA AN |
| SIDRAP-DAL.099 | Komisi irigasi                                          |                                                                                                                                                      | TBD | Dinas PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR    |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM | RAL.01.17.05 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR     | RAL.02.04.02. 01 SISTEM KELEMBAGA AN |
| SIDRAP-DAL.100 | Komisi irigasi ke pusat                                 |                                                                                                                                                      | TBD | Dinas PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR    |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM | RAL.01.17.05 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR     | RAL.02.04.02. 01 SISTEM KELEMBAGA AN |
| SIDRAP-DAL.101 | Pembinaan Ip3a P3a Gp3a                                 | pelatihan ini membahas berbagai materi terkait dengan pembentukan perkumpulan petani pemakai air yang meliputi pembentukan Organisasi P3A/GP3A/IP3A, | TBD | Dinas PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR    |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM | RAL.01.17.05 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR     | RAL.02.04.02. 01 SISTEM KELEMBAGA AN |
| SIDRAP-DAL.102 | Pengamanan dan pengendalian                             |                                                                                                                                                      | TBD | Dinas PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR    |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM | RAL.01.17.05 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR     | RAL.02.04.02. 01 SISTEM KELEMBAGA AN |
| SIDRAP-DAL.103 | Pemuda pelopor                                          |                                                                                                                                                      | TBD | Dinas PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR    |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.34 PEMUDA         | RAL.01.17.05 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR     | RAL.02.04.02. 01 SISTEM KELEMBAGA AN |

|                |                                                                    |  |     |                                                                               |  |                                                   |                                 |                                                |                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| SIDRAP-DAL.104 | PEMUDA<br>KEWIRAUSAHAAN                                            |  | TBD | Dinas<br>PENGELOLAAN<br>SUMBER DAYA AIR                                       |  | RAL.01<br>LAYANAN<br>PUBLIK                       | RAL.01.34<br>PEMUDA             | RAL.01.17.05<br>PENGELOLAAN<br>SUMBER DAYA AIR | RAL.02.04.02.<br>01 SISTEM<br>KELEMBAGA<br>AN |
| SIDRAP-DAL.105 | -Pensiun<br>-Pengusulan pangkat<br>-Berkala kenaikan gaji<br>-Cuti |  | TBD | Dinas<br>PENGELOLAAN<br>SUMBER DAYA AIR                                       |  | RAL.02<br>LAYANAN<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN | RAL.02.04<br>APARATUR<br>NEGARA | RAL.01.17.05<br>PENGELOLAAN<br>SUMBER DAYA AIR | RAL.02.04.02.<br>01 SISTEM<br>KELEMBAGA<br>AN |
| SIDRAP-DAL.106 | Bantuan Pasangan usia<br>subur                                     |  | TBD | DINAS<br>KESEHATAN,<br>PENGENDALISAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  | RAL.01<br>LAYANAN<br>PUBLIK                       | RAL.01.25<br>KESEHATAN          | RAL.01.25.02<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT        | RAL.01.32.03.<br>01 JAMINAN<br>KESEHATAN      |
| SIDRAP-DAL.107 | Inzting sulsel                                                     |  | TBD | DINAS<br>KESEHATAN,<br>PENGENDALISAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  | RAL.01<br>LAYANAN<br>PUBLIK                       | RAL.01.25<br>KESEHATAN          | RAL.01.25.02<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT        | RAL.01.32.03.<br>01 JAMINAN<br>KESEHATAN      |
| SIDRAP-DAL.108 | P2k2                                                               |  | TBD | DINAS<br>KESEHATAN,<br>PENGENDALISAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  | RAL.01<br>LAYANAN<br>PUBLIK                       | RAL.01.25<br>KESEHATAN          | RAL.01.25.02<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT        | RAL.01.32.03.<br>01 JAMINAN<br>KESEHATAN      |
| SIDRAP-DAL.109 | Kpm pkh                                                            |  | TBD | DINAS<br>KESEHATAN,<br>PENGENDALISAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  | RAL.01<br>LAYANAN<br>PUBLIK                       | RAL.01.25<br>KESEHATAN          | RAL.01.25.02<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT        | RAL.01.32.03.<br>01 JAMINAN<br>KESEHATAN      |
| SIDRAP-DAL.110 | Pemantau INM                                                       |  | TBD | DINAS<br>KESEHATAN,<br>PENGENDALISAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  | RAL.01<br>LAYANAN<br>PUBLIK                       | RAL.01.25<br>KESEHATAN          | RAL.01.25.02<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT        | RAL.01.32.03.<br>01 JAMINAN<br>KESEHATAN      |
| SIDRAP-DAL.111 | Data riil<br>Untuk stanting                                        |  | TBD | DINAS<br>KESEHATAN,<br>PENGENDALISAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |  | RAL.01<br>LAYANAN<br>PUBLIK                       | RAL.01.25<br>KESEHATAN          | RAL.01.25.02<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT        | RAL.01.32.03.<br>01 JAMINAN<br>KESEHATAN      |
| SIDRAP-DAL.112 | Pemantau INM (pusat)                                               |  | TBD | DINAS<br>KESEHATAN,<br>PENGENDALISAN<br>PENDUDUK DAN                          |  | RAL.01<br>LAYANAN<br>PUBLIK                       | RAL.01.25<br>KESEHATAN          | RAL.01.25.02<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT        | RAL.01.32.03.<br>01 JAMINAN<br>KESEHATAN      |

|                |                                 |  |     |                                                                |  |                       |                     |                                   |                                   |
|----------------|---------------------------------|--|-----|----------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                |                                 |  |     | KELUARGA BERENCANA                                             |  |                       |                     |                                   |                                   |
| SIDRAP-DAL.113 | Laporan SPM                     |  | TBD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.25 KESEHATAN | RAL.01.25.02 KESEHATAN MASYARAKAT | RAL.01.32.03.01 JAMINAN KESEHATAN |
| SIDRAP-DAL.114 | Capaian spm bidang kesehatan    |  | TBD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.25 KESEHATAN | RAL.01.25.02 KESEHATAN MASYARAKAT | RAL.01.32.03.01 JAMINAN KESEHATAN |
| SIDRAP-DAL.115 | Pelaporan bulanan program       |  | TBD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.25 KESEHATAN | RAL.01.25.02 KESEHATAN MASYARAKAT | RAL.01.32.03.01 JAMINAN KESEHATAN |
| SIDRAP-DAL.116 | Control                         |  | TBD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.25 KESEHATAN | RAL.01.25.02 KESEHATAN MASYARAKAT | RAL.01.32.03.01 JAMINAN KESEHATAN |
| SIDRAP-DAL.117 | maintenance                     |  | TBD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.25 KESEHATAN | RAL.01.25.02 KESEHATAN MASYARAKAT | RAL.01.32.03.01 JAMINAN KESEHATAN |
| SIDRAP-DAL.118 | Rekam medic elektronik          |  | TBD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.25 KESEHATAN | RAL.01.25.02 KESEHATAN MASYARAKAT | RAL.01.32.03.01 JAMINAN KESEHATAN |
| SIDRAP-DAL.119 | Pelaporan gizi terpatu kemenkes |  | TBD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.25 KESEHATAN | RAL.01.25.02 KESEHATAN MASYARAKAT | RAL.01.32.03.01 JAMINAN KESEHATAN |

|                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                |  |                       |                     |                                   |                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SIDRAP-DAL.120 | Laporan kematian ibu dan bayi                          | sistem pencatatan secara digital data kematian Maternal dan Perinatal                                                                                                                                                                  | TBD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.25 KESEHATAN | RAL.01.25.02 KESEHATAN MASYARAKAT | RAL.01.32.03.01 JAMINAN KESEHATAN |
| SIDRAP-DAL.121 | Sistem Informasi Terpadu Kesehatan Kerja dan Olahraga. | setiap tingkat administrasi menghubungkan data dan informasi melalui sistem informasi ke program lain.                                                                                                                                 | TBD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.25 KESEHATAN | RAL.01.25.02 KESEHATAN MASYARAKAT | RAL.01.32.03.01 JAMINAN KESEHATAN |
| SIDRAP-DAL.122 | Monitoring TFU                                         | CAPAIAN TFU YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR (IKL)                                                                                                                                                                             | TBD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.25 KESEHATAN | RAL.01.25.02 KESEHATAN MASYARAKAT | RAL.01.32.03.01 JAMINAN KESEHATAN |
| SIDRAP-DAL.123 | Monitoring Hsp                                         | executor dalam memverifikasi TPP yang sudah berstatus MS dari hasil IKL yang dilakukan oleh puskesmas/wilker KKP, sebagai tindak lanjut dalam proses penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi pangan / sertifikat laik sehat (SLS). | TBD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.25 KESEHATAN | RAL.01.25.02 KESEHATAN MASYARAKAT | RAL.01.32.03.01 JAMINAN KESEHATAN |
| SIDRAP-DAL.124 | Monitoring stbm                                        | pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan.                                                                                                                         | TBD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.25 KESEHATAN | RAL.01.25.02 KESEHATAN MASYARAKAT | RAL.01.32.03.01 JAMINAN KESEHATAN |
| SIDRAP-DAL.125 | Sistim Informasi Pengawasan Kualitas Air Minum Aman    | Upaya peningkatan pengawasan kualitas air minum aman berkelanjutan, untuk mendapatkan air minum yang aman sampai dengan tingkat Rumah Tangga,                                                                                          | TBD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.25 KESEHATAN | RAL.01.25.02 KESEHATAN MASYARAKAT | RAL.01.32.03.01 JAMINAN KESEHATAN |

|                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                |  |                                          |                                      |                                         |                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| SIDRAP-DAL.126 | pengawasan dan pelaporan pengelolaan Limbah Medis dilakukan secara elektronik | pengawasan dan pelaporan pengelolaan Limbah Medis dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SIKELIM                                                                                                     | TBD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.25 KESEHATAN                  | RAL.01.25.02 KESEHATAN MASYARAKAT       | RAL.01.32.03.01 JAMINAN KESEHATAN  |
| SIDRAP-DAL.127 | Penyusunan sop                                                                | penyusunan kesepakatan tertulis yang berisi aturan, kebijakan, spesifikasi teknis yang harus digunakan secara konsisten untuk menjamin proses                                                                  | TBD | Bagian organisasi                                              |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.08 ORGANISASI DAN TATA KELOLA | RAL.02.04.04 MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK | RAL.02.04.02.02 TATA LAKSANA       |
| SIDRAP-DAL.128 | Penyusunan analisis jabatan                                                   | proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/ penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan | TBD | Bagian organisasi                                              |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.08 ORGANISASI DAN TATA KELOLA | RAL.02.04.03 MANAJEMEN ASN              | RAL.02.04.02.02 TATA LAKSANA       |
| SIDRAP-DAL.129 | Analisis beban kerja                                                          | proses untuk menetapkan jumlah jam kerja yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu                                                                                | TBD | Bagian organisasi                                              |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.08 ORGANISASI DAN TATA KELOLA | RAL.02.04.03 MANAJEMEN ASN              | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAL.130 | Pemantau dan evaluasi pelayanan publik                                        | mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang bijak dan meningkatkan kualitas pelayanan.                                                                                                 | TBD | Bagian organisasi                                              |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.08 ORGANISASI DAN TATA KELOLA | RAL.02.04.04 MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAAN |

|                |                                                  |                                                                                                                                                                                                            |     |                                          |  |                                          |                                      |                                          |                                   |
|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|--|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| SIDRAP-DAL.131 | Penyusunan LAjlp                                 | penyusunan gambaran kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. | TBD | Bagian organisasi                        |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.08 ORGANISASI DAN TATA KELOLA | RAL.02.04.04 MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK  | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.132 | Pembentukan organisasi perangkat daerah          | unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.                                     | TBD | Bagian organisasi                        |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.08 ORGANISASI DAN TATA KELOLA | RAL.02.05.04 PENGAWASAN PEMERINTAHAN     | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.133 | Koordinasi dan konsultasi                        |                                                                                                                                                                                                            | TBD | Bagian organisasi                        |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.08 ORGANISASI DAN TATA KELOLA | RAL.02.05.04 PENGAWASAN PEMERINTAHAN     | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.134 | Pemberian tambahan pengasihan                    |                                                                                                                                                                                                            | TBD | Bagian organisasi                        |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.08 ORGANISASI DAN TATA KELOLA | RAL.02.05.04 PENGAWASAN PEMERINTAHAN     | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.135 | Permintaan data                                  |                                                                                                                                                                                                            | TBD | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.04 EKONOMI                    | RAL.02.04.02 KELEMBAGAN DAN TATA LAKSANA | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.136 | BBM                                              |                                                                                                                                                                                                            | TBD | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.04 EKONOMI                    | RAL.01.06.02 PENGELOLAAN PERDAGANGAN     | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.137 | Implasi Harga kebutuhan pokok dan penanggulannya |                                                                                                                                                                                                            | TBD | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.04 EKONOMI                    | RAL.01.06.02 PENGELOLAAN PERDAGANGAN     | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.138 | Permintaan data kouta gas dan sektor pertanian   |                                                                                                                                                                                                            | TBD | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.04 EKONOMI                    | RAL.01.06.02 PENGELOLAAN PERDAGANGAN     | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.139 | Penyusunan Renstra dan Renja                     | Perencanaan penyusunan Renstra dan Renja                                                                                                                                                                   | TBD | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.04 EKONOMI                    | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH             | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |

|                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                          |  |                                          |                    |                              |                               |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|--|------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
| SIDRAP-DAL.140 | Laporan keuangan                 | Perencanaan laporan keuangan                                                                                                                                                                                                             | TBD | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.04 EKONOMI  | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN |
| SIDRAP-DAL.141 | pengelolaan keuangan daerah      | pengelolaan segala kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah.                                                                                                      | TBD | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.04 EKONOMI  | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN |
| SIDRAP-DAL.142 | Laporan realisasi triwulan       | ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja dalam kurun waktu tiga bulan yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). | TBD | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.04 EKONOMI  | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN |
| SIDRAP-DAL.143 | Laporan progress kegiatan DAK    |                                                                                                                                                                                                                                          | TBD | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT              |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.02 KEUANGAN | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN |
| SIDRAP-DAL.144 | Kegiatan PU DAN PSDA             | Layanan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi                                                                                                                                                                                         | TBD | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT              |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.02 KEUANGAN | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN |
| SIDRAP-DAL.145 | laporaan hasil semua layanan     |                                                                                                                                                                                                                                          | TBD | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT              |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.02 KEUANGAN | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN |
| SIDRAP-DAL.146 | EVALUASI PELAPORAN DARI DANA DAK |                                                                                                                                                                                                                                          | TBD | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT              |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.02 KEUANGAN | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN |
| SIDRAP-DAL.147 | PENGANGGARAN APBD Pencarian APBD |                                                                                                                                                                                                                                          | TBD | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT              |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.02 KEUANGAN | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN |
| SIDRAP-DAL.148 | PENGANGGARAN APBD Pencarian APBD |                                                                                                                                                                                                                                          | TBD | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT              |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.02 KEUANGAN | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN |

|                |                           |                                                                                    |     |                             |  |                                          |                                      |                                                      |                                   |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| SIDRAP-DAL.149 | Realisasi Anggaran APBD   |                                                                                    | TBD | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.02 KEUANGAN                   | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH                         | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN     |
| SIDRAP-DAL.150 | Asistensi sk perbuk perda |                                                                                    | TBD | Bagian Hukum                |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.08 ORGANISASI DAN TATA KELOLA | RAL.02.08.04 PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.151 | Instruksi darft           |                                                                                    | TBD | Bagian Hukum                |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.08 ORGANISASI DAN TATA KELOLA | RAL.02.08.04 PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.152 | Hasil harmonisasi         | pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan | TBD | Bagian Hukum                |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.08 ORGANISASI DAN TATA KELOLA | RAL.02.08.04 PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.153 | Evaluasi perencanaan      | Peraturan daerah terkait keuangan dan perencanaan                                  | TBD | Bagian Hukum                |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.02 KEUANGAN                   | RAL.02.08.04 PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.154 | Fasilitasi dan Konsultasi |                                                                                    | TBD | Bagian Hukum                |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.08 ORGANISASI DAN TATA KELOLA | RAL.02.08.04 PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.155 | harmonisasi               | wadah pengajuan permohonan harmonisasi                                             | TBD | Bagian Hukum                |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.08 ORGANISASI DAN TATA KELOLA | RAL.02.08.04 PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.156 | Bantuan hukum             |                                                                                    | TBD | Bagian Hukum                |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.08 ORGANISASI DAN TATA KELOLA | RAL.02.08.04 PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |

|                |                            |                                                        |     |                          |  |                                          |                                           |                                                      |                                    |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------|--|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| SIDRAP-DAL.157 | Bantuan hukum fakir miskin |                                                        | TBD | Bagian Hukum             |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.08 ORGANISASI DAN TATA KELOLA      | RAL.02.08.04 PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAL.158 | Jaringan peraturan         |                                                        | TBD | Bagian Hukum             |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.08 ORGANISASI DAN TATA KELOLA      | RAL.02.08.04 PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAL.159 | Penyusunan laporan Lkpj    |                                                        | TBD | Bagian Tata Pemerintahan |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN | RAL.01.24.04 PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH     | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN      |
| SIDRAP-DAL.160 | Penyusunan laporan Lppd    | Proses Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan | TBD | Bagian Tata Pemerintahan |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN | RAL.01.24.04 PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH     | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN      |
| SIDRAP-DAL.161 | laporan spm                |                                                        | TBD | Bagian Tata Pemerintahan |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN | RAL.01.24.04 PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH     | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN      |
| SIDRAP-DAL.162 | Laporan lkpd               |                                                        | TBD | Bagian Tata Pemerintahan |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN | RAL.01.24.04 PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH     | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN      |
| SIDRAP-DAL.163 | Laporan keuangan           | Perencanaan laporan keuangan                           | TBD | Bagian Tata Pemerintahan |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.02 KEUANGAN                        | RAL.01.24.04 PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH     | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN      |
| SIDRAP-DAL.164 | Laporan RUP                | sarana atau alat untuk mengumumkan RUP                 | TBD | Bagian Tata Pemerintahan |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN | RAL.01.24.04 PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH     | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN      |

|                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                     |  |                                          |                          |                                             |                                   |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| SIDRAP-DAL.165 | Izin bangunan                                    | produk hukum yang berisi persetujuan atau perizinan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Setempat (Pemerintah kabupaten / kota) dan wajib dimiliki / diurus pemilik bangunan yang ingin membangun, merobohkan, menambah / mengurangi luas, ataupun merenovasi suatu bangunan | TBD | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata ruang, Pertanahan dan Perumahan |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.22 PERTANAHAN     | RAL.01.21.01 PEMBINAAN PEMBANGUNAN REGIONAL | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.166 | Pengaduan Pelaporan Zakat bumi bangunan ke dinas | Pengaduan zakat bumi bangunan zakat yang diwajibkan atas kepemilikan tanah, rumah, dan properti lainnya.                                                                                                                                                                    | TBD | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata ruang, Pertanahan dan Perumahan |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.22 PERTANAHAN     | RAL.01.21.01 PEMBINAAN PEMBANGUNAN REGIONAL | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.167 | PSU (Prasarana sarana utilitas umum)             | Pengadaan prasarana dan sarana untuk utilitas umum                                                                                                                                                                                                                          | TBD | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata ruang, Pertanahan dan Perumahan |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM | RAL.01.21.01 PEMBINAAN PEMBANGUNAN REGIONAL | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.168 | Pendataan rumah tidak layak huni                 | Pendataan rumah tidak layak huni yang akan diberikan bantuan bedah rumah                                                                                                                                                                                                    | TBD | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata ruang, Pertanahan dan Perumahan |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.20 PERUMAHAN      | RAL.01.21.01 PEMBINAAN PEMBANGUNAN REGIONAL | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.169 | PSU (Prasarana Sarana Utilita ) Rusun            | Pendataan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) pada Rusun (Rumah Susun) melibatkan pengelolaan data yang terkait dengan infrastruktur dan fasilitas umum yang ada di kompleks rusun                                                                                              | TBD | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata ruang, Pertanahan dan Perumahan |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.20 PERUMAHAN      | RAL.01.21.01 PEMBINAAN PEMBANGUNAN REGIONAL | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.170 | Pengelolaan utang daerah                         | Pendataan atau pencatatan pengelolaan utang daerah                                                                                                                                                                                                                          | TBD | Badan Keuangan dan Aset Daerah                                      |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.02 KEUANGAN       | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH                | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN     |
| SIDRAP-DAL.171 | Perjalanan dinas                                 | Pendataan tentang perjalanan dinas                                                                                                                                                                                                                                          | TBD | Badan Keuangan dan Aset Daerah                                      |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.02 KEUANGAN       | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH                | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN     |

|                |                                        |                                                                                     |     |                                     |  |                                          |                               |                                           |                                   |
|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|--|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| SIDRAP-DAL.172 | Pengelolaan Anggaran daerah            | Pengelolaan anggaran daerah kabupaten sidrap                                        | TBD | Badan Keuangan dan Aset Daerah      |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.02 KEUANGAN            | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH              | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN     |
| SIDRAP-DAL.173 | Pengelolaan barang milik daerah        | Pengelolaan barang barang milik daerah                                              | TBD | Badan Keuangan dan Aset Daerah      |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |                               | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH              | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN     |
| SIDRAP-DAL.174 | Pengelolaan Kas daerah                 | Pengelolaan kas daerah kabupaten sidrap                                             | TBD | Badan Keuangan dan Aset Daerah      |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.02 KEUANGAN            | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH              | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN     |
| SIDRAP-DAL.175 | Layanan prabencana                     | Layanan dalam proses prabencana dan pengelolaan resiko bencana                      | TBD | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.29 KEAMANAN            | RAL.01.29.03 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.176 | Layanan Kedaruratan Bencana            | Layanan dalam keadaan kedaruratan bencana                                           | TBD | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.29 KEAMANAN            | RAL.01.29.03 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.177 | Layanan pasca bencana                  | Laya pasca bencana seperti pengadaan perlatana dan logistik serta pengadaan bantuan | TBD | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.29 KEAMANAN            | RAL.01.29.03 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.178 | Pengelolaan paskibraka                 | Layanan yang ditujukan untuk pengelolaan peserta paskibraka                         | TBD | Badan Kesbang dan Politik           |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.29 KEAMANAN            | RAL.01.29.03 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.179 | SKT (surat keterangan terdaftar ormas) | Layanan surat terdaptarnya Organisasi Masyarakat                                    | TBD | Badan Kesbang dan Politik           |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.29 KEAMANAN            | RAL.01.29.03 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.180 | Pengadaan Barang dan jasa              | Adalah sebuah layanan untuk pengadaan barang dan jasa                               | TBD | Badan Kesbang dan Politik           |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.24 PEMERINTAHAN DAERAH | RAL.02.06.07 SARANA DAN PRASARANA         | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.181 | Pelayanan MoU                          | Pelayaan terkait kerjasama atau MoU dengan berbagai lembaga                         | TBD | Bagian Kerjasama                    |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.24 PEMERINTAHAN DAERAH | RAL.02.06.07 SARANA DAN PRASARANA         | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.182 | Rekomendasi KKN                        | Pelayanan terkait rekomendasi Kuliah Kerja Nyata Kampus-Kampus                      | TBD | Bagian Kerjasama                    |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.24 PEMERINTAHAN DAERAH | RAL.02.04.02 KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.183 | Pengelolaan keuangan lingkup sekda     | Mengelola keuangan di lingkup sekretariat daerah                                    | TBD | Bagian Perencanaan dan Keuangan     |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.24 PEMERINTAHAN DAERAH | RAL.02.04.02 KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |

|                |                                                                     |                                                                       |     |                                 |  |                                          |                               |                                           |                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| SIDRAP-DAL.184 | Pengadaan Barang dan Jasa                                           | Mengadakan barang dan jasa di lingkup sekretariat daerah              | TBD | Bagian Perencanaan dan Keuangan |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.24 PEMERINTAHAN DAERAH | RAL.02.06.07 SARANA DAN PRASARANA         | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.185 | Evaluasi Perencanaan dan anggaran                                   | Perencanaan pengelolaan program serta mengintegrasikan aspek keuangan | TBD | Bagian Perencanaan dan Keuangan |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.24 PEMERINTAHAN DAERAH | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH              | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.186 | Persuratan                                                          | Pengarsipan segala persuratan                                         | TBD | Bagian Umum dan Protokol        |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.24 PEMERINTAHAN DAERAH | RAL.02.05.06 PEMBINAAN ARSIP DINAMIS      | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.187 | Peminjaman perlengkapan                                             | Pengadaan perlengkapan yang dibutuhkan dalam acara acara              | TBD | Bagian Umum dan Protokol        |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.24 PEMERINTAHAN DAERAH | RAL.02.06.07 SARANA DAN PRASARANA         | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.188 | Peminjaman kendaraan                                                | Pengadaan fasilitas kendaraan                                         | TBD | Bagian Umum dan Protokol        |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.24 PEMERINTAHAN DAERAH | RAL.02.06.07 SARANA DAN PRASARANA         | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.189 | Pelayanan kepegawaian lingkup Sekretariat daerah                    | Memberikan pelayanan kepegawa                                         | TBD | Bagian Umum dan Protokol        |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.24 PEMERINTAHAN DAERAH | RAL.02.04.02 KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.190 | Pendataan ASN dan evaluasi kinerja                                  | Mengintegrasikan data ASN secara Nasional                             | TBD | Bagian Umum dan Protokol        |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.24 PEMERINTAHAN DAERAH | RAL.02.04.02 KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.191 | Tim Teknis pada Layanan Perizinan online terkait Dokumen Lingkungan | Perizinan tentang dokumen lingkungan                                  | TBD | Dinas Lingkungan Hidup          |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.24 PEMERINTAHAN DAERAH | RAL.02.04.02 KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.192 | Layanan bantuan Tabungan Perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil        | Layanan bantuan tabungan rumah bagi ASN                               | TBD | Dinas Lingkungan Hidup          |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.24 PEMERINTAHAN DAERAH | RAL.02.04.02 KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.193 | Laporan Pajak Tahunan                                               | Layanan pelaporan pajak tahunan pegawai                               | TBD | Dinas Lingkungan Hidup          |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.24 PEMERINTAHAN DAERAH | RAL.02.04.03 MANAJEMEN ASN                | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN     |
| SIDRAP-DAL.194 | Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara                               | Layanan laporan mengenai harta kekayaan pejabat negara                | TBD | Dinas Lingkungan Hidup          |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.24 PEMERINTAHAN DAERAH | RAL.02.04.03 MANAJEMEN ASN                | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN     |
| SIDRAP-DAL.195 | Data Kepegawaian                                                    | Layanan pendataan pegawai                                             | TBD | Dinas Lingkungan Hidup          |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.24 PEMERINTAHAN DAERAH | RAL.02.04.03 MANAJEMEN ASN                | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |

|                |                                            |                                                                                                                                                                               |     |                        |  |                                          |                                          |                                                                         |                                   |
|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|--|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| SIDRAP-DAL.196 | Layanan pengelolaan sampah                 | sistem jejaring yang mengelola data yang bersumber dari beberapa data dasar yang terintegrasi menjadi sebuah kumpulan informasi Pengelolaan Sampah.                           | TBD | Dinas Lingkungan Hidup |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM                 | RAL.01.40.05 PENGELOLAAN LIMBAH, SAMPAH DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.197 | Pendataan perubahan iklim                  | pendataan dan pelaporan mobilisasi dukungan dan atau aksi pengendalian perubahan iklim yang konsisten dengan unsur-unsur data aksi pengendalian perubahan iklim yang terukur. | TBD | Dinas Lingkungan Hidup |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.33 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI | RAL.01.40.03 MANAJEMEN IKLIM DAN CUACA                                  | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.198 | Pendataan Emisi gas rumah kaca             | Penghitungan data emisi gas rumah kaca                                                                                                                                        | TBD | Dinas Lingkungan Hidup |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.33 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI | RAL.01.40.01 PEMBINAAN LINGKUNGAN HIDUP REGIONAL                        | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.199 | Indeks lingkungan hidup                    | Pendataan tentang indeks kualitas lingkungan hidup                                                                                                                            | TBD | Dinas Lingkungan Hidup |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP               | RAL.01.40.01 PEMBINAAN LINGKUNGAN HIDUP REGIONAL                        | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.200 | Temu keuangan setiap opd                   |                                                                                                                                                                               | TBD | INSPEKTORAT            |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.07 AKUNTABILITAS KINERJA          | RAL.02.02.10 AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN                          | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.201 | Realisasi anggaran kinerja                 |                                                                                                                                                                               | TBD | INSPEKTORAT            |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.07 AKUNTABILITAS KINERJA          | RAL.02.02.10 AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN                          | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN     |
| SIDRAP-DAL.202 | Laporan Temu keuangan yang kurang disiplin |                                                                                                                                                                               | TBD | INSPEKTORAT            |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.07 AKUNTABILITAS KINERJA          | RAL.02.02.10 AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN                          | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.203 | Pemeriksaan dan laporan Temuan keuangan    | Temu keuangan yang kurang disiplin                                                                                                                                            | TBD | INSPEKTORAT            |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.07 AKUNTABILITAS KINERJA          | RAL.02.02.10 AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN                          | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |

|                |                                      |                           |     |                                                                 |  |                                                   |                                           |                                                        |                                               |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| SIDRAP-DAL.204 | Daftar temuan keuangan               |                           | TBD | INSPEKTORAT                                                     |  | RAL.02<br>LAYANAN<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN | RAL.02.07<br>AKUNTABILI<br>TAS<br>KINERJA | RAL.02.02.10<br>AKUNTABILITAS<br>PENGUNAAN<br>ANGGARAN | RAL.02.04.02.<br>01 SISTEM<br>KELEMBAGA<br>AN |
| SIDRAP-DAL.205 | Pengelolaan keuangan                 | Mengelola keuangan daerah | TBD | INSPEKTORAT                                                     |  | RAL.02<br>LAYANAN<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN | RAL.02.07<br>AKUNTABILI<br>TAS<br>KINERJA | RAL.02.02.10<br>AKUNTABILITAS<br>PENGUNAAN<br>ANGGARAN | RAL.02.04.02.<br>01 SISTEM<br>KELEMBAGA<br>AN |
| SIDRAP-DAL.206 | Informasi kepegawaian                |                           | TBD | Badan kepegawaian<br>dan pengembangan<br>sumber daya<br>manusia |  | RAL.02<br>LAYANAN<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN | RAL.02.04<br>APARATUR<br>NEGARA           | RAL.02.04.03<br>MANAJEMEN ASN                          | RAL.02.04.02.<br>01 SISTEM<br>KELEMBAGA<br>AN |
| SIDRAP-DAL.207 | Data kinerja                         |                           | TBD | Badan kepegawaian<br>dan pengembangan<br>sumber daya<br>manusia |  | RAL.02<br>LAYANAN<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN | RAL.02.04<br>APARATUR<br>NEGARA           | RAL.02.04.03<br>MANAJEMEN ASN                          | RAL.02.04.02.<br>01 SISTEM<br>KELEMBAGA<br>AN |
| SIDRAP-DAL.208 | Hasil Pendidikan dan<br>pelatihan    |                           | TBD | Badan kepegawaian<br>dan pengembangan<br>sumber daya<br>manusia |  | RAL.02<br>LAYANAN<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN | RAL.02.04<br>APARATUR<br>NEGARA           | RAL.02.04.03<br>MANAJEMEN ASN                          | RAL.02.04.02.<br>01 SISTEM<br>KELEMBAGA<br>AN |
| SIDRAP-DAL.209 | Seleksi terbuka jabatan              |                           | TBD | Badan kepegawaian<br>dan pengembangan<br>sumber daya<br>manusia |  | RAL.02<br>LAYANAN<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN | RAL.02.04<br>APARATUR<br>NEGARA           | RAL.02.04.03<br>MANAJEMEN ASN                          | RAL.02.04.02.<br>01 SISTEM<br>KELEMBAGA<br>AN |
| SIDRAP-DAL.210 | Indicator system merit               |                           | TBD | Badan kepegawaian<br>dan pengembangan<br>sumber daya<br>manusia |  | RAL.02<br>LAYANAN<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN | RAL.02.04<br>APARATUR<br>NEGARA           | RAL.02.04.03<br>MANAJEMEN ASN                          | RAL.02.04.02.<br>01 SISTEM<br>KELEMBAGA<br>AN |
| SIDRAP-DAL.211 | Informati tentang layanan<br>terpatu |                           | TBD | Badan kepegawaian<br>dan pengembangan<br>sumber daya<br>manusia |  | RAL.02<br>LAYANAN<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN | RAL.02.04<br>APARATUR<br>NEGARA           | RAL.02.04.03<br>MANAJEMEN ASN                          | RAL.02.04.02.<br>01 SISTEM<br>KELEMBAGA<br>AN |
| SIDRAP-DAL.212 | Riview mempan                        |                           | TBD | Badan kepegawaian<br>dan pengembangan<br>sumber daya<br>manusia |  | RAL.02<br>LAYANAN<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN | RAL.02.04<br>APARATUR<br>NEGARA           | RAL.02.04.03<br>MANAJEMEN ASN                          | RAL.02.04.02.<br>01 SISTEM<br>KELEMBAGA<br>AN |

|                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                   |  |                                          |                               |                              |                                   |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| SIDRAP-DAL.213 | Laporan kinerja instansi           | sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. | TBD | Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia            |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.04 APARATUR NEGARA     | RAL.02.04.03 MANAJEMEN ASN   | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.214 | laporna kinerja                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | TBD | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.04 APARATUR NEGARA     | RAL.02.04.03 MANAJEMEN ASN   | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.215 | laporan keuangan                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | TBD | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.02 KEUANGAN            | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN     |
| SIDRAP-DAL.216 | Renja (perencanaan tingkat daerah  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | TBD | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.02 KEUANGAN            | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.217 | pengumpulan index penguaran daerah |                                                                                                                                                                                                                                                                               | TBD | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.02 KEUANGAN            | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.218 | Survei monev pendampingan inovasi  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | TBD | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.24 PEMERINTAHAN DAERAH | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.219 | - Laporan kinerja                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | TBD | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN                     |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.24 PEMERINTAHAN DAERAH | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |

|                |                                            |  |     |                                                                   |  |                                          |                               |                              |                                   |
|----------------|--------------------------------------------|--|-----|-------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|                |                                            |  |     | PENGEMBANGAN DAERAH                                               |  |                                          |                               |                              |                                   |
| SIDRAP-DAL.220 | - Laporan keuangan                         |  | TBD | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.02 KEUANGAN            | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN     |
| SIDRAP-DAL.221 | - DAK(Dana Alokasi Khusus)                 |  | TBD | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.02 KEUANGAN            | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.222 | laporan index penguaran daerah             |  | TBD | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.02 KEUANGAN            | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.223 | laporan Survei emonev pendampingan inovasi |  | TBD | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.24 PEMERINTAHAN DAERAH | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.224 | laporan DAK fisik(setiap opd)              |  | TBD | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.02 KEUANGAN            | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.225 | Laporan IPKD                               |  | TBD | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.24 PEMERINTAHAN DAERAH | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.226 | Dokumen rkpd                               |  | TBD | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.24 PEMERINTAHAN DAERAH | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |

|                |                                                   |                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                   |  |                                          |                                            |                                                  |                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| SIDRAP-DAL.227 | Kinerja, keuangan, titik koordinat kegiatan fisik | Monitoring dan evaluasi teraika kinerja dan kegiatan                                                                                                                                                       | TBD | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.02 KEUANGAN                         | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH                     | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.228 | Usulan DAK                                        | dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. | TBD | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.02 KEUANGAN                         | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH                     | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.229 | Perencanaan program kegiatan RKA                  | penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan.                                                                | TBD | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.02 KEUANGAN                         | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH                     | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.230 | Skem unik pelayanan publik                        |                                                                                                                                                                                                            | TBD | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | RAL.02.04.04 MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK          | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.231 | Pendampingan inovasi -Teknis pelayanan -adlokasi  |                                                                                                                                                                                                            | TBD | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | RAL.02.01.05 PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.232 | Pelayanan data perencanaan pembangunan            |                                                                                                                                                                                                            | TBD | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | RAL.02.01.05 PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.233 | Riset/penelitian pengkajian                       |                                                                                                                                                                                                            | TBD | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | RAL.02.01.05 PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |

|                |                                       |  |     |                                  |  |                                          |                                            |                                            |                                   |
|----------------|---------------------------------------|--|-----|----------------------------------|--|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| SIDRAP-DAL.234 | Laporan kinerja instansi              |  | TBD | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.07 AKUNTABILITAS KINERJA            | RAL.01.44.01 PEMBINAAN KOMUNIKASI REGIONAL | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.235 | LAPORAN KEGIATAN                      |  | TBD | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.07 AKUNTABILITAS KINERJA            | RAL.01.44.01 PEMBINAAN KOMUNIKASI REGIONAL | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.236 | DOKUMEN PERANCANAAN                   |  | TBD | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | RAL.01.44.01 PEMBINAAN KOMUNIKASI REGIONAL | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.237 | DOKUMEN INSTANSI                      |  | TBD | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN  | RAL.01.44.01 PEMBINAAN KOMUNIKASI REGIONAL | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.238 | Data masing2 opd                      |  | TBD | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN  | RAL.01.44.01 PEMBINAAN KOMUNIKASI REGIONAL | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.239 | Layanan pengaduan masyarakat          |  | TBD | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN  | RAL.01.44.01 PEMBINAAN KOMUNIKASI REGIONAL | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.240 | Layanan aspirasi DAERAH               |  | TBD | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN  | RAL.01.44.01 PEMBINAAN KOMUNIKASI REGIONAL | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.241 | PEJABATAN PENGELOLAAN APLIKASI PUBLIK |  | TBD | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN  | RAL.01.44.01 PEMBINAAN KOMUNIKASI REGIONAL | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.242 | LAYANAN ADUAN SPBE                    |  | TBD | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN  | RAL.01.44.01 PEMBINAAN KOMUNIKASI REGIONAL | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |

|                |                                   |                                                                                                                                             |     |                                            |  |                                          |                                           |                                                     |                                    |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|--|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| SIDRAP-DAL.243 | LAYANAN DATA KAB SIDRAP           |                                                                                                                                             | TBD | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA           |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN | RAL.01.44.01 PEMBINAAN KOMUNIKASI REGIONAL          | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAL.244 | LAYANAN INFORMASI                 |                                                                                                                                             | TBD | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA           |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN | RAL.01.44.01 PEMBINAAN KOMUNIKASI REGIONAL          | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAL.245 | Pengembangan Destinasi Pariwisata | Pengembangan daerah tujuan wisata                                                                                                           | TBD | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.15 PARIWISATA                      | RAL.01.15.03 SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAL.246 | DUTA WISATA                       | duta wisata berarti seseorang yang diutus untuk membantu urusan kepariwisataan, terutama dalam aspek edukasi, pengembangan, hingga promosi. | TBD | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.15 PARIWISATA                      | RAL.01.15.03 SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAL.247 | PEMUDA PELOPOR                    | Untuk mewujudkan pemuda yang berkapasitas, berkarakter, dan berdaya saing.                                                                  | TBD | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.15 PARIWISATA                      | RAL.01.15.03 SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAL.248 | PEMUDA KEWIRUSAHAAN               | Pemuda yang memiliki jiwa Kewirausahaan dan menjalankan Kewirausahaan                                                                       | TBD | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.15 PARIWISATA                      | RAL.01.15.03 SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAL.249 | Pengelolaan paskibraka            | Layanan yang ditujukan untuk pengelolaan peserta paskibraka                                                                                 | TBD | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.15 PARIWISATA                      | RAL.01.15.03 SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAL.250 | Persuratan                        | Pengarsipan segala persuratan                                                                                                               | TBD | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN            |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.08 ORGANISASI DAN TATA KELOLA      | RAL.02.04.02 KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA           | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAL.251 | Laporan keuangan                  | Perencanaan laporan keuangan                                                                                                                | TBD | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN            |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.02 KEUANGAN                        | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH                        | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN      |

|                |                                                     |                                                                                                                                                           |     |                                  |  |                                          |                                           |                                           |                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|--|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| SIDRAP-DAL.252 | permintaan data/informasi                           |                                                                                                                                                           | TBD | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN | RAL.02.04.02 KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA |                                    |
| SIDRAP-DAL.253 | Realisasi Anggaran APBD                             |                                                                                                                                                           | TBD | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.02 KEUANGAN                        | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH              | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN      |
| SIDRAP-DAL.254 | Registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa LPSE | unit kerja yang dibentuk untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia/Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik. | TBD | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.24 PEMERINTAHAN DAERAH             | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH              | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAL.255 | Persuratan                                          | Pengarsipan segala persuratan                                                                                                                             | TBD | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.08 ORGANISASI DAN TATA KELOLA      | RAL.02.04.02 KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAL.256 | Laporan keuangan                                    | Perencanaan laporan keuangan                                                                                                                              | TBD | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.02 KEUANGAN                        | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH              | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN      |
| SIDRAP-DAL.257 | Pengadaan Barang dan jasa                           | Adalah sebuah layanan untuk pengadaan barang dan jasa                                                                                                     | TBD | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.24 PEMERINTAHAN DAERAH             | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH              | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN      |
| SIDRAP-DAL.258 | laporan keuangan                                    |                                                                                                                                                           | TBD | BADAN PENDAPATAN DAERAH          |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.02 KEUANGAN                        | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH              | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN      |
| SIDRAP-DAL.259 | pengumpulan index penguaran daerah                  |                                                                                                                                                           | TBD | BADAN PENDAPATAN DAERAH          |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.24 PEMERINTAHAN DAERAH             | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH              | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN      |
| SIDRAP-DAL.260 | - Laporan kinerja                                   |                                                                                                                                                           | TBD | BADAN PENDAPATAN DAERAH          |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.24 PEMERINTAHAN DAERAH             | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH              | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN      |
| SIDRAP-DAL.261 | Pengadaan Barang dan jasa                           | Adalah sebuah layanan untuk pengadaan barang dan jasa                                                                                                     | TBD | BADAN PENDAPATAN DAERAH          |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.02 KEUANGAN                        | RAL.02.01.06 KEUANGAN DAERAH              | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN      |

|                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                          |  |                                          |                                           |                                                  |                                   |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|--|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| SIDRAP-DAL.262 | Renja (perencanaan tingkat daerah) |                                                                                                                                                                                                                                                                               | TBD | BADAN PENDAPATAN DAERAH  |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.24 PEMERINTAHAN DAERAH             | RAL.01.24.04 PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.263 | Laporan kinerja instansi           | sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. | TBD | BADAN PENDAPATAN DAERAH  |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.01.24 PEMERINTAHAN DAERAH             | RAL.01.24.04 PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH | RAL.02.04.02.01 SISTEM KELEMBAGAN |
| SIDRAP-DAL.264 | Pengelolaan Anggaran daerah        | Pengelolaan anggaran daerah kabupaten sidrap                                                                                                                                                                                                                                  | TBD | BADAN PENDAPATAN DAERAH  |  | RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | RAL.02.02 KEUANGAN                        | RAL.01.24.04 PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH | RAL.02.09.03.03 DATA KEUANGAN     |
| SIDRAP-DAL.265 | Pusat Layanan                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | TBD | RUMAH SAKIT NENE'MALLOMO |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN | RAL.01.25.02 KESEHATAN MASYARAKAT                | RAL.01.32.03.01 JAMINAN KESEHATAN |
| SIDRAP-DAL.266 | Pelayanan medik dasar / umum       | mencakup berbagai jenis layanan medis dasar yang diberikan kepada pasien untuk merawat, mendiagnosis, atau mengatasi masalah kesehatan umum.                                                                                                                                  | TBD | RUMAH SAKIT NENE'MALLOMO |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK                    | RAL.01.25 KESEHATAN                       | RAL.01.25.02 KESEHATAN MASYARAKAT                | RAL.01.32.03.01 JAMINAN KESEHATAN |

|                |                                                       |                                                                                                                                                                                                               |     |                          |  |                       |                     |                                   |                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SIDRAP-DAL.267 | Pelayanan medik gigi mulut                            | merujuk pada serangkaian pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter gigi atau ahli kedokteran gigi untuk merawat, mendiagnosis, mencegah, dan memperbaiki masalah kesehatan gigi, gusi, dan mulut pasien. | TBD | RUMAH SAKIT NENE'MALLOMO |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.25 KESEHATAN | RAL.01.25.02 KESEHATAN MASYARAKAT | RAL.01.32.03.01 JAMINAN KESEHATAN |
| SIDRAP-DAL.268 | Pelayanan KIA/KB                                      | Program ini merupakan bagian dari upaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu, anak, dan keluarga untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan mereka.                                                | TBD | RUMAH SAKIT NENE'MALLOMO |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.25 KESEHATAN | RAL.01.25.02 KESEHATAN MASYARAKAT | RAL.01.32.03.01 JAMINAN KESEHATAN |
| SIDRAP-DAL.269 | Pelayanan Gawat Darurat Umum 24 jam & 7 hari seminggu | Layanan ini diselenggarakan untuk memberikan perawatan dan penanganan segera kepada pasien yang mengalami kondisi medis mendesak atau keadaan darurat.                                                        | TBD | RUMAH SAKIT NENE'MALLOMO |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.25 KESEHATAN | RAL.01.25.02 KESEHATAN MASYARAKAT | RAL.01.32.03.01 JAMINAN KESEHATAN |
| SIDRAP-DAL.270 | Penyakit dalam                                        | layanan medis yang diberikan kepada pasien dengan penyakit-penyakit dalam (internal medicine) yang mempengaruhi organ-organ internal tubuh manusia                                                            | TBD | RUMAH SAKIT NENE'MALLOMO |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.25 KESEHATAN | RAL.01.25.02 KESEHATAN MASYARAKAT | RAL.01.32.03.01 JAMINAN KESEHATAN |
| SIDRAP-DAL.271 | Kesehatan anak                                        | Pelayanan ini dirancang untuk memahami dan mengatasi kebutuhan kesehatan yang unik dari anak-anak, termasuk diagnosis, pengobatan, dan perawatan yang berspesialisasi.                                        | TBD | RUMAH SAKIT NENE'MALLOMO |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.25 KESEHATAN | RAL.01.25.02 KESEHATAN MASYARAKAT | RAL.01.32.03.01 JAMINAN KESEHATAN |

|                |                                                     |                                                                                                                                                                                             |     |                          |  |                       |                     |                                   |                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SIDRAP-DAL.272 | Bedah                                               | merujuk pada rangkaian layanan medis yang melibatkan tindakan pembedahan atau operasi.                                                                                                      | TBD | RUMAH SAKIT NENE'MALLOMO |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.25 KESEHATAN | RAL.01.25.02 KESEHATAN MASYARAKAT | RAL.01.32.03.01 JAMINAN KESEHATAN |
| SIDRAP-DAL.273 | Obstetri dan ginekologi                             | adalah rangkaian layanan medis yang disediakan untuk perempuan, yang mencakup perawatan kesehatan reproduksi, pemantauan kehamilan, persalinan, dan penanganan berbagai kondisi ginekologi. | TBD | RUMAH SAKIT NENE'MALLOMO |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.25 KESEHATAN | RAL.01.25.02 KESEHATAN MASYARAKAT | RAL.01.32.03.01 JAMINAN KESEHATAN |
| SIDRAP-DAL.274 | Radiologi                                           | merujuk pada rangkaian layanan yang melibatkan penggunaan teknologi pencitraan medis untuk mendiagnosis penyakit, mengawasi perkembangan penyakit, dan merencanakan pengobatan.             | TBD | RUMAH SAKIT NENE'MALLOMO |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.25 KESEHATAN | RAL.01.25.02 KESEHATAN MASYARAKAT | RAL.01.32.03.01 JAMINAN KESEHATAN |
| SIDRAP-DAL.275 | Patologi Klinik                                     | merujuk pada layanan medis yang berkaitan dengan diagnosis penyakit melalui pemeriksaan laboratorium dari sampel-sampel biologis seperti darah, urin, jaringan, dan cairan tubuh lainnya.   | TBD | RUMAH SAKIT NENE'MALLOMO |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.25 KESEHATAN | RAL.01.25.02 KESEHATAN MASYARAKAT | RAL.01.32.03.01 JAMINAN KESEHATAN |
| SIDRAP-DAL.276 | Elektromedik diagnostik (EKG/EEG/EEG Brain Mapping) | serangkaian layanan medis yang melibatkan penggunaan peralatan elektronik untuk mendeteksi, merekam, dan menganalisis aktivitas listrik dalam tubuh manusia.                                | TBD | RUMAH SAKIT NENE'MALLOMO |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.25 KESEHATAN | RAL.01.25.02 KESEHATAN MASYARAKAT | RAL.01.32.03.01 JAMINAN KESEHATAN |

|                |                   |                                                                                                                                                                                                              |     |                          |  |                       |                     |                                   |                                   |
|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SIDRAP-DAL.277 | Pelayanan farmasi | Pelayanan farmasi pada rumah sakit merujuk pada serangkaian kegiatan dan layanan farmasi yang disediakan di rumah sakit untuk memastikan penggunaan obat-obatan yang aman, efektif, dan efisien bagi pasien. | TBD | RUMAH SAKIT NENE'MALLOMO |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.25 KESEHATAN | RAL.01.25.02 KESEHATAN MASYARAKAT | RAL.01.32.03.01 JAMINAN KESEHATAN |
| SIDRAP-DAL.278 | Kritik Dan saran  | proses evaluasi pelayanan FKRTL yang dilaksanakan melalui mekanisme survei untuk memperoleh umpan balik atau kesan pengalaman peserta JKN setelah menerima layanan dari fasilitas kesehatan.                 | TBD | RUMAH SAKIT NENE'MALLOMO |  | RAL.01 LAYANAN PUBLIK | RAL.01.25 KESEHATAN | RAL.01.25.02 KESEHATAN MASYARAKAT | RAL.01.32.03.01 JAMINAN KESEHATAN |

## LAMPIRAN 2 METADATA ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI

| ID            | Nama Data                                    | Uraian Data                                                                                          | → Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency) | → RAD Level 1 (Dependency)                       | → RAD Level 2 (Dependency) | → RAD Level 3 (Dependency)    | → RAD Level 4 (Dependency)         |
|---------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| SIDRAP-DAD.01 | Laporan Inflasi pangan                       | Ketersediaan pangan                                                                                  | Dinas Peternakan dan Perikanan                  | RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM | RAD.02.03 DATA PERTANIAN   | RAD.02.03.04 KETAHANAN PANGAN | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.02 | Laporan ketersediaan jumlah pangan           | -Jumlah peternak<br>-Jumlah Hewan ternak                                                             | Dinas Peternakan dan Perikanan                  | RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM | RAD.02.03 DATA PERTANIAN   | RAD.02.03.04 KETAHANAN PANGAN | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.03 | -Laporan ketersediaan jumlah pangan nasional | -Jumlah daerah penghasil pangan<br>-Data Inflasi pangan yang turun<br>-Data Daerah kekurangan pangan | Dinas Peternakan dan Perikanan                  | RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM | RAD.02.03 DATA PERTANIAN   | RAD.02.03.04 KETAHANAN PANGAN | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |

|               |                                                          |                                                                                                                          |                                                                    |                                                  |                                               |                                           |                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| SIDRAP-DAD.04 | Laporan produksi pangan                                  | -Jumlah ketersediaan pangan yang ada di pihak swasta                                                                     | Dinas Peternakan dan Perikanan                                     | RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM | RAD.02.03 DATA PERTANIAN                      | RAD.02.03.04 KETAHANAN PANGAN             | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.05 | Dokumen perencanaan penbangan disektor pertanian         | -Data Agro klimatologi<br>-Data tanah<br>-Ketersediaan air<br>-Data tanaman<br>-Data populasi petani<br>-Data Pasar      | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan | RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM | RAD.02.03 DATA PERTANIAN                      | RAD.02.03.04 KETAHANAN PANGAN             | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.06 | Usulan kegiatan                                          | Hasil Musrembang<br>-Pokok pikiran anggota DPR                                                                           | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM               |                                               | RAD.02.03.04 KETAHANAN PANGAN             | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.07 | Laporan Luas Tanah                                       | -Luas tanam perkomoditi<br>-produktifitas<br>-Hama penyakit                                                              | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan | RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM | RAD.02.03 DATA PERTANIAN                      | RAD.02.03.04 KETAHANAN PANGAN             | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.08 | Laporan perkembangan kegiatan dan permasalahan           | -Data kegiatan<br>-Progres kegiatan<br>-personil yang terlibat<br>-permasalahn yang dihadapi<br>-upaya pemecahan masalah | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM               | RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN             | RAD.02.03.04 KETAHANAN PANGAN             | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.09 | Laporan Potensi lahan                                    | -Luas Lahan<br>-Komoditi apa yang dikembangkan<br>-Kebutuhan apa yang mereka butuhkan                                    | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan | RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM | RAD.02.03 DATA PERTANIAN                      | RAD.02.03.04 KETAHANAN PANGAN             | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.10 | Laporan hasil rapat dan Dokumen yang dibutuhkan OPD lain | -Data hasil rapat<br>-Undangan rapat<br>-Data yang dibutuhkan                                                            | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                   | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM               | RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN             | RAD.09.06.03 KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.11 | Laporan keuangan                                         | -Anggaran dan pengeluaran<br>-Biaya oprasional                                                                           | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                   | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM               | RAD.09.02 DATA KEUANGAN                       | RAD.09.06.03 KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.12 | Laporan Koleksi buku                                     | -Jumlah koleksi buku                                                                                                     | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                   | RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM                       | RAD.06.03 DATA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI | RAD.08.02.05 PEMBINAAN KEPUSTAKAAN        | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.13 | Laporan Koleksi buku                                     | -Jumlah koleksi buku                                                                                                     | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                   | RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM                       | RAD.06.03 DATA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI | RAD.08.02.05 PEMBINAAN KEPUSTAKAAN        | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.14 | Laporan kegiatan penggiat literasi                       | -Dokumentasi<br>-Jumlah peserta<br>-Nama peserta                                                                         | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                   | RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM                       | RAD.06.03 DATA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI | RAD.08.02.05 PEMBINAAN KEPUSTAKAAN        | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |

|               |                                                           |                                                                                                        |                                                  |                                                  |                             |                                                                |                                |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| SIDRAP-DAD.15 | Pendampingan Semua OPD                                    | -Perda<br>-Izin Reklame<br>-perizinan yang tidak sesuai                                                | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM               | RAD.05.02 DATA KEAMANAN     | RAD.05.02.01 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                   | RAD.09.06.03.02 TATA LAKSANA   |
| SIDRAP-DAD.16 | Laporan Korban                                            | -Nama Korban<br>-Jumlah kerugian<br>-Lokasi kejadian                                                   | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN | RAD.05.02 DATA KEAMANAN     | RAD.05.02.01 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                   | RAD.09.06.03.02 TATA LAKSANA   |
| SIDRAP-DAD.17 | Penegakan Perda Pengawasan Peredaran cukai                | -Perda<br>-Surat permohonan Pendampingan<br>-IMB                                                       | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM               | RAD.05.02 DATA KEAMANAN     | RAD.05.02.01 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                   | RAD.09.06.03.02 TATA LAKSANA   |
| SIDRAP-DAD.18 | Laporan Kejadian ketertiban                               | -Perda<br>-Jumlah kasus<br>-Jumlah penyelesaian<br>-Nama<br>-No.KTP                                    | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN | RAD.05.02 DATA KEAMANAN     | RAD.05.02.01 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                   | RAD.09.06.03.02 TATA LAKSANA   |
| SIDRAP-DAD.19 | Operasi bersama Pengawasan Peredaran cukai rokok          | -Lokasi pendataan<br>-Nama pemilik toko<br>-Jenis rokok ilegal/legal<br>-Jumlah Rokok<br>-Pita Cukai - | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN | RAD.05.02 DATA KEAMANAN     | RAD.05.02.01 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                   | RAD.09.06.03.02 TATA LAKSANA   |
| SIDRAP-DAD.20 | Pelatihan SDM                                             | -Data satuan<br>-Nik<br>-NIP                                                                           | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM               | RAD.05.02 DATA KEAMANAN     | RAD.05.02.01 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                   | RAD.09.06.03.02 TATA LAKSANA   |
| SIDRAP-DAD.21 | Masyarakat peduli api                                     | -Nama anggota<br>-NIK<br>-Lokasi                                                                       | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN | RAD.05.02 DATA KEAMANAN     | RAD.05.02.01 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                   | RAD.09.06.03.02 TATA LAKSANA   |
| SIDRAP-DAD.22 | Laporan data Kendaraan bermotor                           | -Nomor rangka<br>-Nomor plat kendaraan<br>-Jenis kendaraan                                             | Dinas Perhubungan                                | RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM                       | RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI | RAD.03.03.02 PENGELOLAAN TRANSPORTASI                          | RAD.09.06.03.03 PENERAPAN SPBE |
| SIDRAP-DAD.23 | Laporan pengelolaan transportasi dan mobilitas masyarakat | -Data kendaraan<br>-Perizinan<br>-Manajemen lalu lintas<br>-pemantauan pajak                           | Dinas Perhubungan                                | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM               | RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI | RAD.03.03.03 PENGELOLAAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI | RAD.09.06.03.03 PENERAPAN SPBE |
| SIDRAP-DAD.24 | Laporan Titik kemacetan jalan nasional                    | -lokasi<br>-Kondisi kemacetan<br>-Penyebab kemacetan                                                   | Dinas Perhubungan                                | RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN | RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI | RAD.03.03.03 PENGELOLAAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI | RAD.09.06.03.03 PENERAPAN SPBE |

|               |                                                               |                                                                                                                                |                                                              |                                                        |                                      |                                                                            |                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| SIDRAP-DAD.25 | Laporan Andalin                                               | -Data kemacetan<br>-Data lokasi<br>-Data dampak                                                                                | Dinas Perhubungan                                            | RAD.05 INFORMASI<br>KETERTIBAN UMUM<br>DAN KESELAMATAN | RAD.03.03 DATA<br>TRANSPORTASI       | RAD.03.03.03<br>PENGELOLAAN<br>KEAMANAN DAN<br>KESELAMATAN<br>TRANSPORTASI | RAD.09.06.03.03<br>PENERAPAN SPBE     |
| SIDRAP-DAD.26 | Stok Kebutuhan barang<br>pokok                                | -Jumlah stok di distributor                                                                                                    | Dinas Perhubungan                                            | RAD.10 DATA<br>PENDUKUNG UMUM                          | RAD.03.03 DATA<br>TRANSPORTASI       | RAD.03.03.03<br>PENGELOLAAN<br>KEAMANAN DAN<br>KESELAMATAN<br>TRANSPORTASI | RAD.09.06.03.03<br>PENERAPAN SPBE     |
| SIDRAP-DAD.27 | Data SIPD                                                     | -Data izin usaha<br>-Data pelaku usaha<br>-status perizinan                                                                    | Dinas Perhubungan                                            | RAD.09 INFORMASI<br>PEMERINTAHAN UMUM                  | RAD.02.02 DATA<br>PERDAGANGAN        | RAD.03.03.03<br>PENGELOLAAN<br>KEAMANAN DAN<br>KESELAMATAN<br>TRANSPORTASI | RAD.09.06.03.03<br>PENERAPAN SPBE     |
| SIDRAP-DAD.28 | Laporan harga barang<br>pokok                                 | Harga pokok dari pasar-<br>pasar                                                                                               | Dinas Perhubungan                                            | RAD.02 INFORMASI<br>EKONOMI DAN<br>INDUSTRI            | RAD.02.02 DATA<br>PERDAGANGAN        | RAD.03.03.03<br>PENGELOLAAN<br>KEAMANAN DAN<br>KESELAMATAN<br>TRANSPORTASI | RAD.09.06.03.03<br>PENERAPAN SPBE     |
| SIDRAP-DAD.29 | Data IKM                                                      | "-Data identifikasi<br>perusahaan<br>-data pemilik<br>-data keuangan<br>-data produksi<br>Data tenaga kerja<br>Data pemasaran" | Dinas Perhubungan                                            | RAD.02 INFORMASI<br>EKONOMI DAN<br>INDUSTRI            | RAD.10.02 DATA<br>MANAJEMEN KEGIATAN | RAD.03.03.03<br>PENGELOLAAN<br>KEAMANAN DAN<br>KESELAMATAN<br>TRANSPORTASI | RAD.09.06.03.02 TATA<br>LAKSANA       |
| SIDRAP-DAD.30 | Dana DAK                                                      | -Proposal proyek DAK<br>-Data keuangan<br>-data pihak terlibat<br>-Laporan keuangan dan<br>pertanggung jawaban                 | Dinas Perhubungan                                            | RAD.09 INFORMASI<br>PEMERINTAHAN UMUM                  | RAD.10.02 DATA<br>MANAJEMEN KEGIATAN | RAD.09.01.06<br>KEUANGAN DAERAH                                            | RAD.09.06.03.02 TATA<br>LAKSANA       |
| SIDRAP-DAD.31 | Data IKM                                                      | -Data identifikasi<br>perusahaan<br>-data pemilik<br>-data keuangan<br>-data produksi<br>Data tenaga kerja<br>Data pemasaran   | Dinas Perhubungan                                            | RAD.02 INFORMASI<br>EKONOMI DAN<br>INDUSTRI            | RAD.10.02 DATA<br>MANAJEMEN KEGIATAN | RAD.03.03.03<br>PENGELOLAAN<br>KEAMANAN DAN<br>KESELAMATAN<br>TRANSPORTASI | RAD.09.06.03.02 TATA<br>LAKSANA       |
| SIDRAP-DAD.32 | Harga-harga barang<br>pokok di pasar                          | -harga pasar<br>-Jumlah stok<br>-Data pribadi pelaku<br>usaha                                                                  | Dinas Perhubungan                                            | RAD.02 INFORMASI<br>EKONOMI DAN<br>INDUSTRI            | RAD.02.02 DATA<br>PERDAGANGAN        | RAD.09.06.03<br>KELEMBAGAAN DAN<br>TATA LAKSANA                            | RAD.09.06.03.03<br>PENERAPAN SPBE     |
| SIDRAP-DAD.33 | Laporan hasil rapa dan<br>Dokumen yang<br>dibutuhkan OPD lain | -Data hasil rapat<br>-Undangan rapat<br>-Data yang dibutuhkan                                                                  | Dinas Penanaman modal<br>dan pelayanan terpadu<br>satu pintu | RAD.09 INFORMASI<br>PEMERINTAHAN UMUM                  | RAD.10.02 DATA<br>MANAJEMEN KEGIATAN | RAD.09.06.03<br>KELEMBAGAAN DAN<br>TATA LAKSANA                            | RAD.09.06.03.01<br>SISTEM KELEMBAGAAN |

|               |                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                      |                                       |                                         |                                           |                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| SIDRAP-DAD.34 | Laporan Kinerja                                          | -Hasil kinerja<br>-Analisis kinerja<br>-Indikator kinerja                                                                                              | Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu               | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM    | RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN       | RAD.09.06.04 MANAJEMEN ASN                | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.35 | Siskudes online                                          | -APBD Desa<br>-Perencanaan Desa<br>-KPDD Desa                                                                                                          | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM    | RAD.09.02 DATA KEUANGAN                 | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH              | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.36 | Kompilasi Data                                           | -Transaksi Dana di desa<br>-Pembayaran pajak                                                                                                           | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM    | RAD.09.02 DATA KEUANGAN                 | RAD.09.06.03 KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.37 | Laporan Dana                                             | -rekap dana laporan dana desa<br>-APBD desa                                                                                                            | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM    | RAD.09.02 DATA KEUANGAN                 | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH              | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.38 | Daftar perusahaan di PTSP (Pelayanan Terpadu satu pintu) | -Nama perusahaan<br>-Alamat<br>-Jumlah pekerja<br>-Jenis kelamin pekerja<br>-Jumlah UPAH<br>-Jenis Usaha<br>-Nama Pimpinan<br>-Nomor telfon perusahaan | Dinas Koperasi, UKM, ketenagakerjaan dan transmigrasi                | RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI | RAD.02.10 DATA USAHA KECIL DAN MENENGAH | RAD.09.06.03 KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.39 | Laporan Koprasi                                          | Nama-Nama Koprasi                                                                                                                                      | Dinas Koperasi, UKM, ketenagakerjaan dan transmigrasi                | RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI | RAD.02.09 DATA KOPERASI                 | RAD.02.09.04 PENGAWASAN KOPERASI          | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.40 | Rapat Koordinasi                                         | Asistensi dan Perencanaan                                                                                                                              | Dinas Koperasi, UKM, ketenagakerjaan dan transmigrasi                | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM    | RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN       | RAD.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI           | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.41 | Daftar perusahaan                                        | -Nama perusahaan<br>-Alamat<br>-Jumlah pekerja<br>-Jenis kelamin pekerja<br>-Jumlah UPAH<br>-Jenis Usaha<br>-Nama Pimpinan<br>-Nomor telfon perusahaan | Dinas Koperasi, UKM, ketenagakerjaan dan transmigrasi                | RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI | RAD.02.10 DATA USAHA KECIL DAN MENENGAH | RAD.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI           | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |

|               |                                   |                                                                                                                                                               |                                                                     |                                          |                                   |                                                  |                                    |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| SIDRAP-DAD.42 | Laporan Pengawasan Koperasi       | -Nama-Nama koperasi<br>-Data keuangan<br>-Data anggota<br>-Data transaksi                                                                                     | Dinas Koperasi, UKM, ketenagakerjaan dan transmigrasi               | RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI    | RAD.02.09 DATA KOPERASI           | RAD.02.09.04 PENGAWASAN KOPERASI                 | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.43 | Sosialisasi                       | -Nama<br>-TTL<br>-Jabatan<br>-NIP<br>-No.Nik                                                                                                                  | Dinas Koperasi, UKM, ketenagakerjaan dan transmigrasi               | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM       | RAD.02.09 DATA KOPERASI           | RAD.02.09.04 PENGAWASAN KOPERASI                 | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.44 | Laporan Pengawasan Koperasi       | -Data keuangan<br>-Data Anggota<br>-Data transaksi<br>-data produksi dan layanan<br>- data pengelolaan stok<br>-data kepegawaian<br>-data pinjaman dan kredit | Dinas Koperasi, UKM, ketenagakerjaan dan transmigrasi               | RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI    | RAD.02.09 DATA KOPERASI           | RAD.02.09.04 PENGAWASAN KOPERASI                 | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.45 | Data Terpadu kesejahteraan sosial | -KK<br>-Nip<br>-NIK<br>-Jumlah keluarga<br>-Alamat                                                                                                            | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata ruang, Pertanahan dan Perumahan | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM       | RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN |                                                  | RAD.09.06.03.03 PENERAPAN SPBE     |
| SIDRAP-DAD.46 | DAK                               | -Progres fisik<br>-Keuangan<br>-Kordinat<br>-Dokumentasi                                                                                                      | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata ruang, Pertanahan dan Perumahan | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM       | RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM     | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH                     | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.47 | Laporan Izin Bangunan             | -Data identifikasi seperti nama, alamat, kontak<br>-IMB<br>-Deskripsi propyek<br>-Gambar struktur bangunan<br>-Rencana keuangan<br>-Perizinan lingkungan      | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata ruang, Pertanahan dan Perumahan | RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN | RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM     | RAD.02.08.03 MANAJEMEN PERIZINAN PENANAMAN MODAL | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |

|               |                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                  |                         |                                     |                                                          |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| SIDRAP-DAD.48 | Laporan keuangan kabupaten                 | -APBD<br>-Realisasi Anggaran<br>-Laporan Keuangan<br>-Rincian sumber pendapatan dan pengeluaran<br>-Data perencanaan keuangan<br>-Data transaksi<br>-Data alokasi anggaran                                             | Badan Keuangan dan Aset Daerah      | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM               | RAD.09.02 DATA KEUANGAN | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH        | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN                       |
| SIDRAP-DAD.49 | Perda pertanggung jawaban pelaksanaan OPD  | -Renja OPD<br>-Realisasi pelaksanaan kegiatan<br>-Indikator<br>-Laporan keuangan<br>-Evaluasi kinerja                                                                                                                  | Badan Keuangan dan Aset Daerah      | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM               | RAD.09.02 DATA KEUANGAN | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH        | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN                       |
| SIDRAP-DAD.50 | Laporan realisasi APBD Bulanan dan tahunan | -Rincian Anggaran<br>-Realisasi pendapatan dan belanja<br>-Capaian kinerja dan indikator kinerja utama (IKU)<br>-Laporan keuangan bulanan dan tahunan<br>-Revisi APBD<br>-Bukti pembayaran<br>-Bukti transfer keuangan | Badan Keuangan dan Aset Daerah      | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM               | RAD.09.02 DATA KEUANGAN | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH        | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN                       |
| SIDRAP-DAD.51 | Laporan Kejadian bencana                   | -Deskripsi kejadian<br>-Korban dan kerugian<br>-Kondisi Geografis<br>-Kebutuhan darurat dan layanan kesehatan<br>-Data logistik<br>-Rencana tanggap darurat<br>-Evaluasi respon dan tindak lanjut                      | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN | RAD.05.02 DATA KEAMANAN | RAD.04.02.06 PENANGGULANGAN BENCANA | RAD.07.05.04.02 PENGAWASAN DAN KEAMANAN SUMBER DAYA ALAM |
| SIDRAP-DAD.52 | Laporan Kejadian bencana                   | -Deskripsi kejadian<br>-Korban dan kerugian<br>-Kondisi Geografis<br>-Kebutuhan darurat dan layanan kesehatan<br>-Data logistik<br>-Rencana tanggap darurat<br>-Evaluasi respon dan tindak lanjut                      | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN | RAD.05.02 DATA KEAMANAN | RAD.04.02.06 PENANGGULANGAN BENCANA | RAD.07.05.04.02 PENGAWASAN DAN KEAMANAN SUMBER DAYA ALAM |

|               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                  |                         |                                     |                                                          |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| SIDRAP-DAD.53 | Laporan Kejadian bencana             | -Deskripsi kejadian<br>-Korban dan kerugian<br>-Kondisi Geografis<br>-Kebutuhan darurat dan layanan kesehatan<br>-Data logistik<br>-Rencana tanggap darurat<br>-Evaluasi respon dan tindak lanjut                                                           | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN | RAD.05.02 DATA KEAMANAN | RAD.04.02.06 PENANGGULANGAN BENCANA | RAD.07.05.04.02 PENGAWASAN DAN KEAMANAN SUMBER DAYA ALAM |
| SIDRAP-DAD.54 | Laporan paskibraka                   | "-Data Identitas peserta<br>-Riwayat pendidikan dan prestasi<br>-Seleksi dan penilaian<br>-Informasi kesehatan<br>-Pengelolaan administrasi dan logistik<br>-Kontak peserta dan kontak darurat"                                                             | Badan Kesbang dan Politik           | RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM                       | RAD.06.04 DATA PEMUDA   | RAD.06.04.03 PENGEMBANGAN PEMUDA    | RAD.09.07.05.03 PEMASYARAKATAN UUD 45 DAN PANCASILA      |
| SIDRAP-DAD.55 | Laporan pemantauan Pilpres dan Pileg | -Informasi pemilih dan daftar pemilih tetap (DPT)<br>-Data ketersediaan distribusi surat suara dll<br>-Informasi pengawasan saat proses pemungutan suara<br>-Pengawasan perhitungan suara<br>-Laporan keberhasilan dan kendala<br>-Hasil suara<br>-Evaluasi | Badan Kesbang dan Politik           | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM               | RAD.04.02 DATA SOSIAL   | RAD.05.02.02 PENGAYOMAN MASYARAKAT  | RAD.09.07.05.03 PEMASYARAKATAN UUD 45 DAN PANCASILA      |
| SIDRAP-DAD.56 | Laporan pemantauan Pilpres dan Pileg | -Informasi pemilih dan daftar pemilih tetap (DPT)<br>-Data ketersediaan distribusi surat suara dll<br>-Informasi pengawasan saat proses pemungutan suara<br>-Pengawasan perhitungan suara<br>-Laporan keberhasilan dan kendala<br>-Hasil suara<br>-Evaluasi | Badan Kesbang dan Politik           | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM               | RAD.04.02 DATA SOSIAL   | RAD.05.02.02 PENGAYOMAN MASYARAKAT  | RAD.09.07.05.03 PEMASYARAKATAN UUD 45 DAN PANCASILA      |

|               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                  |                                 |                                                  |                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| SIDRAP-DAD.57 | -Laporan keuangan kabupaten                                                                                             | -Pendapatan dan pengeluaran<br>-Anggaran<br>-Rincian proyek kerjasama<br>-Catatan transaksi<br>-Audit dan revisi<br>-Dokumen kontrak<br>-Pelaporan kepatuhan regulasi                                                       | Bagian Kerjasama         | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM               | RAD.09.02 DATA KEUANGAN         | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH                     | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.58 | Perda pertanggung jawaban pelaksanaan OPD                                                                               | -Renja OPD<br>-Realisasi kinerja<br>-Evaluasi kinerja<br>-Laporan keuangan<br>-Dokumentasi kegiatan<br>-Pemantauan dan evaluasi<br>-Capaian tujuan<br>-Catatan-catatan rapat                                                | Bagian Kerjasama         | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM               |                                 | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH                     | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.59 | Laporan realisasi APBD Bulanan dan tahunan                                                                              | -Realisasi pendapatan<br>-Realisasi belanja<br>-pencapaian proyek yang dibiayai APBD<br>-Perencanaan dan realisasi anggaran<br>-Dokumentasi transaksi<br>-Evaluasi dan analisis kinerja keuangan<br>-Laporan keuangan resmi | Bagian Kerjasama         | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM               | RAD.09.02 DATA KEUANGAN         | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH                     | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.60 | Laporan rencana anggaran                                                                                                | -Data anggaran<br>-Data realisasi                                                                                                                                                                                           | Bagian Umum dan Protokol | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM               | RAD.09.02 DATA KEUANGAN         | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH                     | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.61 | Laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. | -Informasi izin lingkungan hidup<br>-Data perusahaan atau entitas<br>-Rincian kewajiban persyaratan<br>-Riwayat pelanggaran<br>-Tindak lanjut dan rekomendasi<br>-Statistik kepatuhan kinerja lingkungan                    | Dinas Lingkungan Hidup   | RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM | RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP | RAD.07.05.01 PEMBINAAN LINGKUNGAN HIDUP REGIONAL | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |

|               |                                     |                                                                                                              |                                                                   |                                                  |                                   |                                                  |                                                          |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| SIDRAP-DAD.62 | Laporan pengaduan masyarakat        | -Detail pengaduan<br>-Identitas pelapor<br>-Lokasi kejadian                                                  | Dinas Lingkungan Hidup                                            | RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN | RAD.05.02 DATA KEAMANAN           | RAD.07.05.01 PEMBINAAN LINGKUNGAN HIDUP REGIONAL | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN                       |
| SIDRAP-DAD.63 | Laporan BAST Pengadaan Sarana DAK   | Pengajuan Tagihan Pengadaan Sarana DAK                                                                       | Dinas Lingkungan Hidup                                            | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM               | RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN | RAD.07.05.01 PEMBINAAN LINGKUNGAN HIDUP REGIONAL | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN                       |
| SIDRAP-DAD.64 | Laporan persetujuan lingkungan      | Izin Usaha Yang Masuk                                                                                        | Dinas Lingkungan Hidup                                            | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM               | RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN | RAD.07.05.01 PEMBINAAN LINGKUNGAN HIDUP REGIONAL | RAD.07.05.04.02 PENGAWASAN DAN KEAMANAN SUMBER DAYA ALAM |
| SIDRAP-DAD.65 | Laporan Pencemaran lingkungan hidup | -Jenis pencemaran<br>-Sumber pencemaran<br>-Tingkat pencemaran<br>-Lokasi pencemaran<br>-Pengaruh pencemaran | Dinas Lingkungan Hidup                                            | RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM | RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP   | RAD.07.05.01 PEMBINAAN LINGKUNGAN HIDUP REGIONAL | RAD.07.05.04.02 PENGAWASAN DAN KEAMANAN SUMBER DAYA ALAM |
| SIDRAP-DAD.66 | - laporna kinerja                   | -tujuan Sasaran<br>-target dan capaian<br>-analisis anggaran                                                 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM               | RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA    | RAD.09.06.04 MANAJEMEN ASN                       | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN                       |
| SIDRAP-DAD.67 | laporan keuangan                    | -tujuan Sasaran<br>-target dan capaian<br>-analisis anggaran                                                 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM               | RAD.09.02 DATA KEUANGAN           | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH                     | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN                       |
| SIDRAP-DAD.68 | Renja (perencanaan tingkat daerah   | -tujuan Sasaran<br>-target dan capaian<br>-analisis anggaran                                                 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM               | RAD.09.02 DATA KEUANGAN           | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH                     | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN                       |
| SIDRAP-DAD.69 | pengumpulan index penguaran daerah  | -tujuan Sasaran<br>-target dan capaian<br>-analisis anggaran                                                 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM               | RAD.09.02 DATA KEUANGAN           | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH                     | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN                       |

|               |                                            |                                                                                   |                                                                   |                                    |                                |                              |                                    |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| SIDRAP-DAD.70 | Survei monev pendampingan inovasi          | Pendampingan dan dorongan kepada inovator<br>Hasil inovasi<br>Proses pengembangan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA | RAD.09.06.04 MANAJEMEN ASN   | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.71 | Laporan kinerja                            | tujuan Sasaram<br>-target dan capaian<br>-analisis anggaran                       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA | RAD.09.06.04 MANAJEMEN ASN   | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.72 | Laporan keuangan                           | tujuan Sasaram<br>-target dan capaian<br>-analisis anggaran                       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.09.02 DATA KEUANGAN        | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.73 | DAK(Dana Alokasi Khusus)                   | tujuan Sasaram<br>-target dan capaian<br>-analisis anggaran                       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.09.02 DATA KEUANGAN        | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.74 | laporan index penguraian daerah            | tujuan Sasaram<br>-target dan capaian<br>-analisis anggaran                       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.09.02 DATA KEUANGAN        | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.75 | laporan Survei emonev pendampingan inovasi | Pendampingan dan dorongan kepada inovator<br>Hasil inovasi<br>Proses pengembangan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |

|               |                                          |                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                    |                                |                                        |                                    |
|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| SIDRAP-DAD.76 | laporan DAK fisik(setiap opd)            | Laporan kegiatan                                                                                                                                                                              | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH           | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.77 | Laporan IPKD                             | Dokumen perencanaan dan penganggaran Elokasi penganggaran Transparansi pengolahan pengeluaran ada daerah Penyerapan anggaran Kondisi keuangan daerah Opini badan pemeriksa keuangan atas Ikpd | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.09.02 DATA KEUANGAN        | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH           | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.78 | Dokumen rkpd                             |                                                                                                                                                                                               | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.09.02 DATA KEUANGAN        | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH           | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.79 | penerima segala jenis bantuan pemerintah | data peserta didikan<br>-nama<br>-Alamat<br>-Nik<br>-kk<br>-Pekerjaan org tua                                                                                                                 | Dinas Sosial                                                      |                                    | RAD.04.02 DATA SOSIAL          | RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.80 | Koordinasi Ke provinsi                   | nama<br>Alamat<br>Nik<br>kk<br>ket. Berbadan sehat<br>ket. Bebas narkoba                                                                                                                      | Dinas Sosial                                                      | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.04.02 DATA SOSIAL          | RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |

|               |                                                                          |                                                                                                                   |                                  |                                                  |                                |                                                    |                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| SIDRAP-DAD.81 | permintaan bantuan social<br>-Lansi<br>-Anak<br>-disabilitas<br>-bencana | Surat permohonan bantuan<br>Hasil asesmen<br>-nama<br>-usia<br>-nik<br>-alamat<br>-kebutuhannya<br>-pengasilannya | Dinas Sosial                     | RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN | RAD.04.02 DATA SOSIAL          | RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL             | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.82 | BANTUAN yatimpiatu, bpnt,bantuan pkh                                     | Jadwal penyaluran bantuan                                                                                         | Dinas Sosial                     | RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN | RAD.04.02 DATA SOSIAL          | RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL             | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.83 | Penyaluran beras                                                         | Alamat<br>Nama<br>Nik<br>Kk                                                                                       | Dinas Sosial                     | RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN | RAD.04.02 DATA SOSIAL          | RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL             | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.84 | Laporan kinerja instansi                                                 | "tujuan Sasaran<br>-target dan capaian<br>-analisis anggaran "                                                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM               | RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA | RAD.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.85 | LAPORAN KEGIATAN                                                         | "tujuan Sasaran<br>-target dan capaian<br>-analisis anggaran "                                                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM               | RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA | RAD.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.86 | DOKUMEN PERANCANAAN                                                      | "tujuan Sasaran<br>-target dan capaian<br>-analisis anggaran "                                                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM               | RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA | RAD.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.87 | DOKUMEN INSTANSI                                                         | "tujuan Sasaran<br>-target dan capaian<br>-analisis anggaran "                                                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM               | RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA | RAD.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.88 | Data masing2 opd                                                         | "-laporan kinerja<br>-laporan apbd"                                                                               | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM               | RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA | RAD.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |

|               |                              |                                                                                                                                   |                                      |                                              |                             |                                              |                                    |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| SIDRAP-DAD.89 | laporan KIA                  | "data identitas Anak<br>-nama<br>-Alamat<br>-Nik<br>-kk<br>"                                                                      | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan      | RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM                   | RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN | RAD.06.01.01 PEMBINAAN PENDIDIKAN REGIONAL   | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.90 | Laporan KIP                  | "data identitas Anak<br>-nama<br>-Alamat<br>-Nik<br>-kk<br>"                                                                      | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan      | RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM                   | RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN | RAD.06.01.01 PEMBINAAN PENDIDIKAN REGIONAL   | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.91 | koordinasi                   | "Data Anak tidak sekolah dan putus sekolah<br>-nama<br>-Alamat<br>-Nik<br>-kk<br>-Pekerjaan org tua<br>-Alasan putus sekolah<br>" | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan      | RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM                   | RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN | RAD.06.01.01 PEMBINAAN PENDIDIKAN REGIONAL   | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.92 | Data pokok pendidikan        | "Nip/nik<br>Nama<br>Lokasi sekolah<br>Masa kerja<br>"                                                                             | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan      | RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA | RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN   | RAD.06.01.01 PEMBINAAN PENDIDIKAN REGIONAL   | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.93 | manajemen kinerja pegawai    | -nuptk<br>-Sk dinas                                                                                                               | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan      | RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA | RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN   | RAD.06.01.02 MANAJEMEN TENAGA PENDIDIKAN     | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.94 | Bantuan dari BRI             | No. rek siswa<br>Ferifikasi layak bantuan                                                                                         | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan      | RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA | RAD.04.02 DATA SOSIAL       | RAD.04.02.01 PEMBINAAN SOSIAL REGIONAL       | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.95 | Pencetakana ktp              | Kk<br>nik<br>alamat<br>agama                                                                                                      | dinas kependudukan dan catatan sipil | RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM                   | RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN | RAD.03.07.01 PEMBINAAN KEPENDUDUKAN REGIONAL | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.96 | perpindahan masuk dan keluar | Formulir f103<br>KK asli                                                                                                          | dinas kependudukan dan catatan sipil | RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM                   | RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN | RAD.03.07.01 PEMBINAAN KEPENDUDUKAN REGIONAL | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |

|                |                             |                                                                             |                                                                |                                    |                                 |                                              |                                    |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| SIDRAP-DAD.97  | menata Administrasi         | Surat permohonan                                                            | dinas kependudukan dan catatan sipil                           | RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM         | RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN     | RAD.03.07.01 PEMBINAAN KEPENDUDUKAN REGIONAL | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.98  | Komisi irigasi              | Permasalahan mengenai pertanian, pelanggran, solusi, kendala, penanganannya | Dinas PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR                              | RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM         | RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP | RAD.03.01.05 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR     | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.99  | pengawasan Kelompok tani    | Ip3a<br>P3a<br>Gp3a                                                         | Dinas PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR                              | RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM         | RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP | RAD.03.01.05 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR     | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.100 | Komisi irigasi              | Data repitalisasi p3a                                                       | Dinas PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR                              | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP | RAD.03.01.05 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR     | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.101 | Komisi irigasi ke pusat     | Repilalisasi pusat                                                          | Dinas PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR                              | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP | RAD.03.01.05 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR     | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.102 | Bantuan Pasangan usia subur | Data fakir miskin nama kk nik alamat                                        | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM         | RAD.04.01 DATA KESEHATAN        | RAD.04.01.01 PEMBINAAN KESEHATAN REGIONAL    | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.103 | lnzting sulsel              | Kk                                                                          | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM         | RAD.04.01 DATA KESEHATAN        | RAD.04.01.01 PEMBINAAN KESEHATAN REGIONAL    | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.104 | P2k2                        | Gizi Modul Kesehatan                                                        | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM         | RAD.04.01 DATA KESEHATAN        | RAD.04.01.01 PEMBINAAN KESEHATAN REGIONAL    | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.105 | Kpm pkh                     | BANSOS BPNT DAN PKH                                                         | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM         | RAD.04.01 DATA KESEHATAN        | RAD.04.01.01 PEMBINAAN KESEHATAN REGIONAL    | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |

|                |                                         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                    |                                   |                                           |                                    |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| SIDRAP-DAD.106 | Pemantau INM                            | Hasil kegiatan Kebersihan Ketaatan Survi Kesehatan                                                                                                                                                                          | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM         | RAD.04.01 DATA KESEHATAN          | RAD.04.01.01 PEMBINAAN KESEHATAN REGIONAL | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.107 | Data riil Untuk stanting                | Puskesmas Pkd Pkh Tpk Pil KB                                                                                                                                                                                                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM         | RAD.04.01 DATA KESEHATAN          | RAD.04.01.01 PEMBINAAN KESEHATAN REGIONAL | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.108 | Pemantau INM (pusat)                    | Ketaatan Kebersihan Tangan, Ketaatan Penggunaan APD, Ketaatan Identifikasi Pasien, Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Sensitive Obat (SO), Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar dan Kepuasan Pasien | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM         | RAD.04.01 DATA KESEHATAN          | RAD.04.01.01 PEMBINAAN KESEHATAN REGIONAL | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.109 | Penyusunan sop                          | SOP setiap OPD                                                                                                                                                                                                              | Bagian organisasi                                              | RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM         | RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN | RAD.09.06.05 MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK   | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.110 | Penyusunan analisis jabatan             | data wewenang dan tanggung jawab data evaluasi kompetensi data penilaian kinerja                                                                                                                                            | Bagian organisasi                                              | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA    | RAD.09.06.04 MANAJEMEN ASN                | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.111 | Analisis beban kerja                    | data jumlah jam kerja data jumlah personalia data bobot/beban kerja                                                                                                                                                         | Bagian organisasi                                              | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA    | RAD.09.06.04 MANAJEMEN ASN                | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.112 | Pemantau dan evaluasi pelayanan publik  | data survei dan evaluasi terhadap kinerja dan kepuasan karyawan atau pelanggan.                                                                                                                                             | Bagian organisasi                                              | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA    | RAD.09.06.05 MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK   | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.113 | Penyusunan LAjlp                        | Data perencanaan opd                                                                                                                                                                                                        | Bagian organisasi                                              | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA    | RAD.09.07.04 PENGAWASAN PEMERINTAHAN      | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.114 | Pembentukan organisasi perangkat daerah | analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan                                                                                                                                        | Bagian organisasi                                              | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA    | RAD.09.06.04 MANAJEMEN ASN                | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |

|                |                                                  |                                                                                                                                                              |                                          |                                    |                                   |                                         |                                    |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| SIDRAP-DAD.115 | Koordinasi dan konsultasi                        | kelembagaan dan uraian tugas perangkat daerah; analisis jabatan dan analisis beban kerja; kelas jabatan; tata naskah dinas                                   | Bagian organisasi                        | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA    | RAD.09.06.04 MANAJEMEN ASN              | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.116 | Pemberian tambahan pengasilan                    | data monitoring pelaksanaan analisis jabatan, beban kerja, evaluasi jabatan, anggaran dan penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di pemerintah daerah. | Bagian organisasi                        | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA    | RAD.09.06.04 MANAJEMEN ASN              | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.117 | Permintaan data                                  | Masalah pertanian Peternakan Perekonomian Implasi perikanan                                                                                                  | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN        | RAD.02.02.02 PENGELOLAAN PERDAGANGAN    | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.118 | BBM                                              | Permasalahan kelangkaan Surat rekomendasi pembelian bbm subsidi untuk pertanian dan Lembaga sektor                                                           | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN        | RAD.02.02.02 PENGELOLAAN PERDAGANGAN    | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.119 | Implasi Harga kebutuhan pokok dan penanggulannya | Data harga kebutuhan pokok penyebab Implasi                                                                                                                  | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN        | RAD.02.02.02 PENGELOLAAN PERDAGANGAN    | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.120 | Permintaan data kouta gas dan sektor pertanian   | data kouta gas dan sektor pertanian                                                                                                                          | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN        | RAD.02.02.02 PENGELOLAAN PERDAGANGAN    | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.121 | Laporan progress kegiatan DAK                    | data DAK setiap OPD                                                                                                                                          | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT              | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.09.02 DATA KEUANGAN           | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH            | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.122 | Kegiatan PU DAN PSDA                             | data JASA KONSTRUKSI data pemberdayaan, dan pengawasan                                                                                                       | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT              | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH            | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.123 | laporaan hasil semua layanan                     | data laporan hasil layanan                                                                                                                                   | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT              | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN | RAD.09.06.05 MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.124 | EVALUASI PELAPORAN DARI DANA DAK                 | data DAK setiap OPD                                                                                                                                          | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT              | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.09.02 DATA KEUANGAN           | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH            | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |

|                |                                         |                                                       |              |                                    |                                     |                                                               |                                    |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| SIDRAP-DAD.125 | Asistensi sk perbuk perda               | data SK perbuk perda                                  | Bagian Hukum | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.10.01 DATA KEBIJAKAN PEMERINTAH | RAD.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN | RAD.09.06.03.02 TATA LAKSANA       |
| SIDRAP-DAD.126 | Instruksi darft                         | data instruksi darft                                  | Bagian Hukum | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.10.01 DATA KEBIJAKAN PEMERINTAH | RAD.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN | RAD.09.06.03.02 TATA LAKSANA       |
| SIDRAP-DAD.127 | Hasil harmonisasi                       | data hasil pengkajian perencanaan peraturan           | Bagian Hukum | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.10.01 DATA KEBIJAKAN PEMERINTAH | RAD.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN | RAD.09.06.03.02 TATA LAKSANA       |
| SIDRAP-DAD.128 | Hasil harmonisasi                       | data hasil pengkajian perencanaan peraturan           | Bagian Hukum | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.10.01 DATA KEBIJAKAN PEMERINTAH | RAD.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN | RAD.09.06.03.02 TATA LAKSANA       |
| SIDRAP-DAD.129 | Fasilitasi dan Konsultasi               |                                                       | Bagian Hukum | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.10.01 DATA KEBIJAKAN PEMERINTAH | RAD.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN | RAD.09.06.03.02 TATA LAKSANA       |
| SIDRAP-DAD.130 | harmonisasi                             | data pengajuan permohonan harmonisasi                 | Bagian Hukum | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.10.01 DATA KEBIJAKAN PEMERINTAH | RAD.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN | RAD.09.06.03.02 TATA LAKSANA       |
| SIDRAP-DAD.131 | Evaluasi perencanaan                    | Matriks evaluasi surat selesai evaluasi               | Bagian Hukum | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN   | RAD.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.132 | Temu keuangan setiap opd                |                                                       | INSPEKTORAT  | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN   | RAD.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN            | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.133 | Realisasi anggaran kinerja              | tujuan Sasaran -target dan capaian -analisis anggaran | INSPEKTORAT  | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.09.02 DATA KEUANGAN             | RAD.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN            | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.134 | Pemeriksaan dan laporan Temuan keuangan | Temu keuangan yang kurang disiplin                    | INSPEKTORAT  | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.09.02 DATA KEUANGAN             | RAD.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN            | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |

|                |                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |                                              |                                |                                                    |                                    |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| SIDRAP-DAD.135 | Informasi kepegawaian              |                                                                                                                                                | Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia            | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM           | RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA | RAD.09.06.04 MANAJEMEN ASN                         | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.136 | Data kinerja                       |                                                                                                                                                | Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia            | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM           | RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA | RAD.09.06.04 MANAJEMEN ASN                         | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.137 | Hasil Pendidikan dan pelatihan     |                                                                                                                                                | Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia            | RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA | RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA | RAD.09.06.04 MANAJEMEN ASN                         | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.138 | Seleksi terbuka jabatan            | "-nomenklatur Jabatan<br>-Data Pejabat definitif yang menduduki Jabatan<br>-data pengajuan rencana seleksi<br>-data pelaporan rencana seleksi" | Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia            | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM           | RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA | RAD.09.06.04 MANAJEMEN ASN                         | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.139 | Indicator system merit             |                                                                                                                                                | Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia            | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM           | RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA | RAD.09.06.04 MANAJEMEN ASN                         | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.140 | laporna kinerja                    | tujuan Sasaran<br>-target dan capaian<br>-analisis anggaran                                                                                    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM           | RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA | RAD.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.141 | laporan keuangan                   | tujuan Sasaran<br>-target dan capaian<br>-analisis anggaran                                                                                    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM           | RAD.09.02 DATA KEUANGAN        | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH                       | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.142 | Renja (perencanaan tingkat daerah) | tujuan Sasaran<br>-target dan capaian<br>-analisis anggaran                                                                                    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM           | RAD.09.02 DATA KEUANGAN        | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH                       | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |

|                |                                    |                                                                                   |                                                                   |                                    |                                   |                                                    |                                    |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| SIDRAP-DAD.143 | pengumpulan index penguaran daerah | -tujuan Sasaran<br>-target dan capaian<br>-analisis anggaran                      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.09.02 DATA KEUANGAN           | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH                       | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.144 | Survei money pendampingan inovasi  | Pendampingan dan dorongan kepada inovator<br>Hasil inovasi<br>Proses pengembangan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH                       | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.145 | - Laporan kinerja                  | tujuan Sasaram<br>-target dan capaian<br>-anilisasi anggaran                      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA    | RAD.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.146 | - Laporan keuangan                 | tujuan Sasaram<br>-target dan capaian<br>-anilisasi anggaran                      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.09.02 DATA KEUANGAN           | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH                       | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.147 | - DAK(Dana Alokasi Khusus)         | tujuan Sasaram<br>-target dan capaian<br>-anilisasi anggaran                      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH                       | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.148 | laporan index penguaran daerah     | tujuan Sasaram<br>-target dan capaian<br>-anilisasi anggaran                      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.09.02 DATA KEUANGAN           | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH                       | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |

|                |                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                    |                                   |                                                     |                                    |
|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| SIDRAP-DAD.149 | laporan Survei emonev pendampingan inovasi | Pendampingan dan dorongan kepada inovator Hasil inovasi Proses pengembangan                                                                                                                  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH                        | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.150 | laporan DAK fisik(setiap opd)              | Laporan kegiatan                                                                                                                                                                             | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.09.02 DATA KEUANGAN           | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH                        | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.151 | Laporan IPKD                               | Dokumen perencanaan dan penganggaran Elokasi penganggaran Transparansi pengolahan pengeluaran adaaerah Penyerapan anggaran Kondisi keuangan daerah Opini bbadan pemeriksa keuangan atas lkpd | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN | RAD.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN  | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.152 | Dokumen rkpd                               | data Dokumen rkpd                                                                                                                                                                            | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH                        | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.153 | paskibraka                                 | Data pemuda nama bakat pengalaman                                                                                                                                                            | DINAS KEPEMUDAAN, OLARAGA DAN PARIWISATA                          | RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA  | RAD.06.04 DATA PEMUDA             | RAD.02.11.03 SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.154 | DUTA WISATA                                | data kepariwisataan data pengembangan dan promosi                                                                                                                                            | DINAS KEPEMUDAAN, OLARAGA DAN PARIWISATA                          | RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA  | RAD.06.04 DATA PEMUDA             | RAD.02.11.03 SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.155 | PEMUDA PELOPOR                             | data pendidikan, agama, seni budaya, dan lingkungan hidup.                                                                                                                                   | DINAS KEPEMUDAAN, OLARAGA DAN PARIWISATA                          | RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA  | RAD.06.04 DATA PEMUDA             | RAD.02.11.03 SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |

|                |                             |                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                    |                                   |                                                     |                                    |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| SIDRAP-DAD.156 | PEMUDA<br>KEWIRAUUSAHAAN    | data potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.                                                                                                                             | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA  | RAD.06.04 DATA PEMUDA             | RAD.02.11.03 SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.157 | Laporan paskibraka          | "-Data Identitas peserta<br>-Riwayat pendidikan dan prestasi<br>-Seleksi dan penilaian<br>-Informasi kesehatan<br>-Pengelolaan administrasi dan logistik<br>-Kontak peserta dan kontak darurat"                             | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA  | RAD.06.04 DATA PEMUDA             | RAD.02.11.03 SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.158 | -Laporan keuangan kabupaten | -Pendapatan dan pengeluaran<br>-Anggaran<br>-Rincian proyek kerjasama<br>-Catatan transaksi<br>-Audit dan revisi<br>-Dokumen kontrak<br>-Pelaporan kepatuhan regulasi                                                       | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN            | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.09.02 DATA KEUANGAN           | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH                        | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.159 | Persuratan                  | -Data persuratan yang ingin di arsipkan                                                                                                                                                                                     | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN            | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN | RAD.08.02.06 PEMBINAAN ARSIP STATIS                 | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.160 | Laporan keuangan            | -Anggaran<br>-laporan Neraca<br>-Belanja<br>-Arus Kas<br>-Revisi anggaran                                                                                                                                                   | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN            | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.09.02 DATA KEUANGAN           | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH                        | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.161 | Realisasi Anggaran APBD     | -Realisasi pendapatan<br>-Realisasi belanja<br>-pencapaian proyek yang dibiayai APBD<br>-Perencanaan dan realisasi anggaran<br>-Dokumentasi transaksi<br>-Evaluasi dan analisis kinerja keuangan<br>-Laporan keuangan resmi | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN            | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.09.02 DATA KEUANGAN           | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH                        | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |

|                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                    |                                   |                                                    |                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| SIDRAP-DAD.162 | -Laporan keuangan kabupaten                         | -Pendapatan dan pengeluaran<br>-Anggaran<br>-Rincian proyek kerjasama<br>-Catatan transaksi<br>-Audit dan revisi<br>-Dokumen kontrak<br>-Pelaporan kepatuhan regulasi                                                  | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.09.02 DATA KEUANGAN           | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH                       | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.163 | Persuratan                                          | -Data persuratan yang ingin di arsipkan                                                                                                                                                                                | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN | RAD.08.02.06 PEMBINAAN ARSIP STATIS                | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.164 | Registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa LPSE | data pengadaan data pendaftaran Pelaku Usaha baru                                                                                                                                                                      | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH                       | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.165 | laporan keuangan                                    | tujuan Sasaran<br>-target dan capaian<br>-analisis anggaran                                                                                                                                                            | BADAN PENDAPATAN DAERAH          | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.09.02 DATA KEUANGAN           | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH                       | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.166 | pengumpulan index penguaran daerah                  | -tujuan Sasaran<br>-target dan capaian<br>-analisis anggaran                                                                                                                                                           | BADAN PENDAPATAN DAERAH          | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.09.02 DATA KEUANGAN           | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH                       | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.167 | Renja (perencanaan tingkat daerah                   | tujuan Sasaran<br>-target dan capaian<br>-analisis anggaran                                                                                                                                                            | BADAN PENDAPATAN DAERAH          | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH                       | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.168 | - Laporan kinerja                                   | tujuan Sasaram<br>-target dan capaian<br>-anilisasi anggaran                                                                                                                                                           | BADAN PENDAPATAN DAERAH          | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN | RAD.09.06.02 AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |
| SIDRAP-DAD.169 | Pengelolaan Anggaran daerah                         | -Rincian Anggaran<br>-Realisasi pendapatan dan belanja<br>-Capaian kinerja dan indikator kinerja utama (IKU)<br>-Laporan keuangan bulanan dan tahunan<br>-Revisi APBD<br>-Bukti pembayaran<br>-Bukti transfer keuangan | BADAN PENDAPATAN DAERAH          | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.09.02 DATA KEUANGAN           | RAD.09.01.06 KEUANGAN DAERAH                       | RAD.09.06.03.01 SISTEM KELEMBAGAAN |

|                |                                       |                                                                       |                          |                                    |                          |                                           |                                                     |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| SIDRAP-DAD.170 | laporan jumlah pasien yang di tangani | data kunjungan, rawat jalan dan rawat inap, data kunjungan igd        | RUMAH SAKIT NENE'MALLOMO | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.04.01 DATA KESEHATAN | RAD.04.01.01 PEMBINAAN KESEHATAN REGIONAL | RAD.09.07.05.03 PEMASYARAKATAN UUD 45 DAN PANCASILA |
| SIDRAP-DAD.171 | laporan 10 besar penyakit             | data penyakit yang sering masuk                                       | RUMAH SAKIT NENE'MALLOMO | RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM         | RAD.04.01 DATA KESEHATAN | RAD.04.01.01 PEMBINAAN KESEHATAN REGIONAL | RAD.06.02.04.02 KESEHATAN KERJA                     |
| SIDRAP-DAD.172 | laporan monitoring dan evaluasi       | data penyakit tibi, data penyakit rutin                               | RUMAH SAKIT NENE'MALLOMO | RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM         | RAD.04.01 DATA KESEHATAN | RAD.04.01.01 PEMBINAAN KESEHATAN REGIONAL | RAD.06.02.04.02 KESEHATAN KERJA                     |
| SIDRAP-DAD.173 | rekon persiadaan barang               | bahan habis pakai (bmhp), persedian ATK, barang cetak                 | RUMAH SAKIT NENE'MALLOMO | RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM | RAD.04.01 DATA KESEHATAN | RAD.04.01.01 PEMBINAAN KESEHATAN REGIONAL | RAD.06.02.04.02 KESEHATAN KERJA                     |
| SIDRAP-DAD.174 | data penggunaan obat pskiotropika     | data pengguna, data jumlah obat pengguna psikiotropika, data penyakit | RUMAH SAKIT NENE'MALLOMO | RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM         | RAD.04.01 DATA KESEHATAN | RAD.04.01.01 PEMBINAAN KESEHATAN REGIONAL | RAD.09.07.05.03 PEMASYARAKATAN UUD 45 DAN PANCASILA |
|                |                                       |                                                                       |                          |                                    |                          |                                           |                                                     |

### LAMPIRAN 3 METADATA ARSITEKTUR APLIKASI

| ID            | Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya) | Uraian Aplikasi (Uraikan definisi dari aplikasi)             | Basis Aplikasi | Tipe Lisensi Aplikasi | Unit Operasional Teknologi (Dependency) - Merupakan unit yang melakukan pengelolaan terhadap operasional teknologi layanan | RAA Level 1 (Dependency) | RAA Level 2 (Dependency)               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| SIDRAP-DAA.01 | Isikhnas                                                                 | Melakukan Vaksinasi kepada Hewan agar tercegah dari penyakit | Web Based      | Proprietary           | Dinas Peternakan dan Perikanan                                                                                             | RAA.01 APLIKASI UMUM     | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK |

|               |                                                |                                                                                                                                         |           |             |                                                                    |                        |                                                   |
|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| SIDRAP-DAA.02 | Identik PKH                                    | Pemasangan eartag pada hewan                                                                                                            | Mobile    | Proprietary | Dinas Peternakan dan Perikanan                                     | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.03 | Bima krisna                                    | Aplikasi Sarana dan Prasarana                                                                                                           | Web Based | Proprietary | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.04 | LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)     | Aplikasi pengaduan pengadaan barang dan jasa untuk petani                                                                               | Web Based | Proprietary | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.05 | SIRUP (Sistem Informasi Reformasi Birokrasi)   | aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP | Web Based | Proprietary | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.06 | ArcGIS                                         | aplikasi yang digunakan untuk mengolah dan menampilkan peta-peta ke dalam bentuk 3D                                                     | Web Based | Proprietary | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.07 | e-Reporting (Elektronik Reporting)             | Aplikasi Pelaporan dan Realisasi Kegiatan secara Elektronik (e-REPORTING)                                                               | Mobile    | Proprietary | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.08 | e-Proposal (Elektronik Proposal)               | sebuah aplikasi berbasis elektronik yang digunakan untuk mengajukan, mengelola, dan mengevaluasi proposal proyek atau program           | Web Based | Proprietary | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.09 | e-Monev (Electronic Monitoring and Evaluation) | aplikasi yang mendukung pelaksanaan PP nomor 39 tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.           | Web Based | Proprietary | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |

|               |                                                            |                                                                                                                                                                                   |           |             |                                                                    |                        |                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| SIDRAP-DAA.10 | MPO (Manajemen Pelaporan Organisasi)                       | Aplikasi pelaporan online yang menampung pelaporan pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah (banpem) lingkup Ditjen PSP                                                            | Web Based | Proprietary | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.11 | SIMULUHTANI (Sistem Informasi Manajemen Lahan Usaha Tani)  | aplikasi berisikan data Kelembagaan Penyuluhan, Ketenagaan Penyuluhan dan Kelembagaan Petani.                                                                                     | Mobile    | Proprietary | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.12 | e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)   | aplikasi yang digunakan kelompok dalam menyusun Rencana definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan pendampingan dari Penyuluh Pertanian di lokasi masing-masing                   | Web Based | Proprietary | Dinas Tanaman Pangan Hortikultural Perkebunan dan Ketahanan Pangan | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.13 | INLIS(Integrated Library System)                           | perangkat lunak aplikasi otomatisasi perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpustakaan sejak tahun 2011.                                                              | Web Based | Proprietary | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                   | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.14 | SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) | aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik                                                            | Web Based | Proprietary | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                   | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.15 | e-Kinerja                                                  | Mempermudah melakukan penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP) para ASN secara elektronik; Mempermudah melakukan penilaian prestasi kerja para ASN secara elektronik setiap tahun | Web Based | Proprietary | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                   | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.16 | Siroleg (Sistem Informasi Rokok Ilegal)                    | Aplikasi pendataan informasi tentang rokok ilegal                                                                                                                                 | Web Based | Proprietary | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran                   | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |

|               |                                                               |                                                                                                                                                                                               |           |             |                                                  |                        |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| SIDRAP-DAA.17 | SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi)    | aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik                                                                        | Web Based | Proprietary | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.18 | SP2N (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) | layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik              | Mobile    | Proprietary | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.19 | SIMDA (Sistem Informasi Manajemen barang milik daerah)        | sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya pengelolaan barang milik daerah termasuk masalah penggajian pegawai                                          | Web Based | Proprietary | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.20 | SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah)                    | merupakan salah satu tools penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan | Web Based | Proprietary | Dinas Perhubungan                                | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.21 | SIPBJ (Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa)            | Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa berbasis aplikasi yang dikelola oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah                                                           | Web Based | Proprietary | Dinas Perhubungan                                | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.22 | ARIP (Aplikasi Rekonsiliasi Iuran Pemda)                      | aplikasi bantu berbasis web untuk menghitung iuran JKN segmen Pekerja Penerima Upah Pegawai Negeri (PPU PN) Daerah                                                                            | Web Based | Proprietary | Dinas Perhubungan                                | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |

|               |                                                            |                                                                                                                                                                                                |           |             |                                     |                        |                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| SIDRAP-DAA.23 | SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) | aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik                                                                         | Web Based | Proprietary | Dinas Perhubungan                   | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.24 | Sistem Informasi Pemeriksaan kendaraan bermotor            | Merupakan Sistem yang dibangun untuk menangani pendataan pembayaran pengujian kendaraan bermotor dalam aplikasi tersebut dapat menghitung otomatis Estimasi Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor | Web Based | Proprietary | Dinas Perhubungan                   | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.25 | OSS(Online Single Submission)                              | sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                     | Web Based | Proprietary | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.26 | Si-Dagang                                                  | Merupakan sistem yang dibangun untuk menampilkan harga-harga di pasaran                                                                                                                        | Web Based | Proprietary | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.27 | SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional)                | mekanisme untuk mempermudah dan mempercepat proses penyampaian data yang berasal dari dunia usaha kepada pemerintah                                                                            | Web Based | Proprietary | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.28 | PTSP Halal (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)                  | memberikan layanan sertifikasi halal secara terintegrasi, efisien, dan terpadu kepada pelaku usaha yang menginginkan sertifikasi halal untuk produk atau jasanya                               | Web Based | Proprietary | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |

|               |                                                      |                                                                                                                                                                                               |           |             |                                                                      |                        |                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| SIDRAP-DAA.29 | DJIP HAKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) | memfasilitasi proses terkait dengan pengelolaan hak kekayaan intelektual, seperti paten, merek dagang, desain industri, hak cipta, dan perlindungan lainnya terhadap karya atau inovasi       | Web Based | Proprietary | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                                  | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.30 | OSS(Online Single Submission)                        | sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                    | Web Based | Proprietary | Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu               | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.31 | SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung)   | merupakan portal perizinan penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Layak Fungsi, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung.                                                   | Web Based | Proprietary | Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu               | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.32 | SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah)           | merupakan salah satu tools penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan | Web Based | Proprietary | Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu               | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.33 | SiSkudes (Sistem Keuangan Desa)                      | merupakan aplikasi sederhana yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.                               | Web Based | Proprietary | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.34 | Konsolidasi APBD Desa tingkat pusat                  | Merupakan sistem pelaporan mengenai APBD Desa                                                                                                                                                 | Web Based | Proprietary | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |

|               |                                        |                                                                                                                                                                         |           |             |                                                                      |                        |                                                   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| SIDRAP-DAA.35 | Teman Desa                             | aplikasi yang dikembangkan untuk dapat menerima dan menyajikan Informasi Keuangan Daerah yang dikirim dari aplikasi pengelolaan keuangan daerah ke Pusat.               | Web Based | Proprietary | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.36 | Sipades (Sistem Pengelolaan Aset Desa) | aplikasi perencanaan administrasi aset desa berbasis sistem informasi mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, penatausahaan sampai dengan penyajian laporan.           | Web Based | Proprietary | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.37 | SGDS                                   | berguna untuk melakukan pembaharuan data IDM (Indeks Desa Membangun) dalam skala mikro, sehingga mampu menyajikan informasi yang lebih detail dan menyeluruh            | Mobile    | Proprietary | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.38 | IDM (Indeks Desa Membangun)            | Menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.                                                            | Web Based | Proprietary | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.39 | Prodeskel (Program Desa Kelurahan)     | memudahkan mengetahui karakteristik desa/kelurahan, mengukur status kemajuan desa/kelurahan (swadaya, swakarya, dan swasembada) dapat digunakan sebagai bahan kebijakan | Web Based | Proprietary | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.40 | Siap Kerja                             | ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan, baik di pusat maupun di daerah.                          | Web Based | Proprietary | Dinas Koperasi, UKM, ketenagakerjaan dan transmigrasi                | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |

|               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |             |                                                                     |                        |                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| SIDRAP-DAA.41 | Karir Hub                                                       | salah satu Layanan ketenagakerjaan pada Portal kemnaker.go.id yang berhubungan dengan informasi lowongan pekerjaan. Layanan ini mempertemukan antara pemberi kerja perusahaan atau pemberi kerja individu dengan pencari kerja baik dalam negeri maupun luar negeri. | Web Based | Proprietary | Dinas Koperasi, UKM, ketenagakerjaan dan transmigrasi               | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.42 | ODS (Online Data Sistem)                                        | sistem untuk pendataan koperasi agar data koperasi lebih akurat. Sesuai dengan Juknis PPKL bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi PPKL adalah melaksanakan pendataan koperasi/updating data/melengkapi data ODS Koperasi.                                           | Web Based | Proprietary | Dinas Koperasi, UKM, ketenagakerjaan dan transmigrasi               | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.43 | SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah)                      | merupakan salah satu tools penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan                                                                        | Web Based | Proprietary | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata ruang, Pertanahan dan Perumahan | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.44 | Om-SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran ) | aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.                                                                                                         | Web Based | Proprietary | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata ruang, Pertanahan dan Perumahan | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.45 | KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran)  | merupakan aplikasi e-planning yang diinisiasi Kementerian PPN/Bappenas,                                                                                                                                                                                              | Web Based | Proprietary | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata ruang, Pertanahan dan Perumahan | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |

|               |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |             |                                                                              |                           |                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
|               |                                               | Kementerian Keuangan dan<br>Kementerian PAN RB                                                                                                                                                                                                                                    |           |             |                                                                              |                           |                                                         |
| SIDRAP-DAA.46 | PBG/SIMBG                                     | Aplikasi pelaporan izin<br>bangunan                                                                                                                                                                                                                                               | Web Based | Proprietary | Dinas Bina Marga,<br>Cipta Karya, Tata<br>ruang, Pertanahan<br>dan Perumahan | RAA.02 APLIKASI<br>KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI<br>UMUM ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.47 | SPAN LAPOR                                    | Aplikasi pengaduan dan<br>pelaporan masyarakat                                                                                                                                                                                                                                    | Web Based | Proprietary | Dinas Bina Marga,<br>Cipta Karya, Tata<br>ruang, Pertanahan<br>dan Perumahan | RAA.01 APLIKASI<br>UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI<br>UMUM LAYANAN<br>PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.48 | Si-Baru                                       | perwujudan Sistem<br>Pemerintahan Berbasis<br>Elektronik (SPBE) pada<br>Direktorat Jenderal<br>Perumahan yang dirancang<br>untuk menyediakan sistem<br>informasi tata kelola bantuan<br>perumahan yang terpadu<br>dan mendukung proses<br>bisnis pengelolaan bantuan<br>perumahan | Web Based | Proprietary | Dinas Bina Marga,<br>Cipta Karya, Tata<br>ruang, Pertanahan<br>dan Perumahan | RAA.01 APLIKASI<br>UMUM   | RAA.01.02 APLIKASI<br>UMUM ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.49 | e-RTLH                                        | Pendataan rumah tidak<br>layak huni yang akan<br>diberikan bantuan bedah<br>rumah                                                                                                                                                                                                 | Web Based | Proprietary | Dinas Bina Marga,<br>Cipta Karya, Tata<br>ruang, Pertanahan<br>dan Perumahan | RAA.01 APLIKASI<br>UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI<br>UMUM LAYANAN<br>PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.50 | SIPD (Sistem Informasi<br>Pembangunan Daerah) | merupakan salah satu tools<br>penting dalam mendukung<br>penyelenggaraan<br>pembangunan di daerah,<br>terutama dalam hal<br>ketersediaan data yang valid<br>untuk analisis perencanaan<br>pembangunan dan<br>pemetaan                                                             | Web Based | Proprietary | Badan Keuangan dan<br>Aset Daerah                                            | RAA.02 APLIKASI<br>KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI<br>UMUM ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.51 | Katupa (Aplikasi pengelolaan<br>utang)        | Aplikasi yang digunakan<br>dalam pengelolaan utang<br>daerah                                                                                                                                                                                                                      | Web Based | Proprietary | Badan Keuangan dan<br>Aset Daerah                                            | RAA.02 APLIKASI<br>KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI<br>UMUM ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN |

|               |                                                               |                                                                                                                                         |           |             |                                     |                        |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| SIDRAP-DAA.52 | SPPD                                                          | Aplikasi pengelolaan perjalanan dinas                                                                                                   | Web Based | Proprietary | Badan Keuangan dan Aset Daerah      | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.53 | Aplikasi BMD                                                  | sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya pengelolaan barang milik daerah.                       | Web Based | Proprietary | Badan Keuangan dan Aset Daerah      | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.54 | Aplikasi KASDA                                                | Aplikasi Pengelolaan kas daerah kabupaten sidrap                                                                                        | Web Based | Proprietary | Badan Keuangan dan Aset Daerah      | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.55 | INDRA (Indonesia Disaster Rapid Assessment)                   | melaporkan bencana yang terjadi di setiap wilayah secara cepat dan akurat.                                                              | Mobile    | Proprietary | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.56 | MAIPARK                                                       | Aplikasi yang digunakan untuk mendeteksi daerah yang beresiko dapat terjadi bencana alam                                                | Web Based | Proprietary | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.57 | Sistem Informasi Penanggulangan Bencana Terpadu (SINDU)       | Aplikasi yang digunakan untuk pemenuhan informasi terkait penaggulangan bencana secara terpadu                                          | Web Based | Proprietary | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.58 | e-Prologpal (Elektronik Proposal logistik dan pengadaan alat) | Aplikasi yang ditujukan untuk pengadaan logistik dan peralatan di lokasi bencana                                                        | Web Based | Proprietary | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.59 | e-Proposal (Elektronik Proposal)                              | Aplikasi yang digunakan untuk pengadaan bantuan                                                                                         | Web Based | Proprietary | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.60 | Siormas                                                       | Aplikasi pendataan terdaftar ormas                                                                                                      | Web Based | Proprietary | Badan Kesbang dan Politik           | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.61 | SIRUP (Sistem Informasi Reformasi Birokrasi)                  | aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP | Web Based | Proprietary | Badan Kesbang dan Politik           | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |

|               |                                                                |                                                                                                                                                                                               |           |             |                                 |                        |                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| SIDRAP-DAA.62 | Sipantau (Pemantauan Pilpres, Pileg)                           | Aplikasi pemantauan jalannya proses pilpres dan pileg                                                                                                                                         | Mobile    | Proprietary | Badan Kesbang dan Politik       | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.63 | SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah)                     | merupakan salah satu tools penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan | Mobile    | Proprietary | Bagian Kerjasama                | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.64 | SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah)                        | sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah                                                                                           | Web Based | Proprietary | Bagian Kerjasama                | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.65 | SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah)                     | merupakan salah satu tools penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan | Web Based | Proprietary | Bagian Perencanaan dan Keuangan | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.66 | SIRUP (Sistem Informasi Reformasi Birokrasi)                   | aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP                                                       | Web Based | Proprietary | Bagian Perencanaan dan Keuangan | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.67 | Sistem Informasi Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (SIERA) | Perencanaan pengelolaan program serta mengintegrasikan aspek keuangan                                                                                                                         | Web Based | Proprietary | Bagian Perencanaan dan Keuangan | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.68 | SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)                      | Aplikasi pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.                                                                             | Web Based | Proprietary | Bagian Umum dan Protokol        | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |

|               |                                                            |                                                                                                                                                                                               |           |             |                          |                        |                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| SIDRAP-DAA.69 | SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah)                 | merupakan salah satu tools penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan | Web Based | Proprietary | Bagian Umum dan Protokol | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.70 | e-Monev (Electronic Monitoring and Evaluation)             | aplikasi yang mendukung pelaksanaan PP nomor 39 tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.                                                                 | Web Based | Proprietary | Bagian Umum dan Protokol | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.71 | SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) | aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik                                                                        | Web Based | Proprietary | Bagian Umum dan Protokol | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.72 | SITARA (Sistem Informasi Kepegawaian Terpadu)              | aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup Sekretariat Daerah                                                                                              | Web Based | Proprietary | Bagian Umum dan Protokol | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.73 | Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)             | aplikasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan data ASN secara nasional meliputi seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.                                            | Web Based | Proprietary | Bagian Umum dan Protokol | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.74 | e-Kinerja                                                  | Mempermudah melakukan penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP) para ASN secara elektronik; Mempermudah melakukan penilaian prestasi kerja para ASN secara elektronik setiap tahun             | Web Based | Proprietary | Bagian Umum dan Protokol | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |

|               |                               |                                                                                                                                                     |           |             |                          |                        |                                                   |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| SIDRAP-DAA.75 | My SAPK                       | sistem aplikasi pelayanan kepegawaian BKN untuk memudahkan kegiatan administrasi para PNS seperti penginputan gaji, PNS, dan lain sebagainya.       | Web Based | Proprietary | Bagian Umum dan Protokol | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.76 | OSS(Online Single Submission) | sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko          | Web Based | Proprietary | Dinas Lingkungan Hidup   | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.77 | TAPERA                        | Aplikasi pengadaan Layanan bantuan Tabungan Perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil                                                                     | Web Based | Proprietary | Dinas Lingkungan Hidup   | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.78 | DJP Online                    | Layanan pelaporan pajak tahunan pegawai                                                                                                             | Web Based | Proprietary | Dinas Lingkungan Hidup   | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.79 | LHKPN                         | Aplikasi Layanan laporan mengenai harta kekayaan pejabat negara                                                                                     | Web Based | Proprietary | Dinas Lingkungan Hidup   | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.80 | My SAPK                       | sistem aplikasi pelayanan kepegawaian BKN untuk memudahkan kegiatan administrasi para PNS seperti penginputan gaji, PNS, dan lain sebagainya.       | Web Based | Proprietary | Dinas Lingkungan Hidup   | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.81 | SIPSN                         | sistem jejaring yang mengelola data yang bersumber dari beberapa data dasar yang terintegrasi menjadi sebuah kumpulan informasi Pengelolaan Sampah. | Web Based | Proprietary | Dinas Lingkungan Hidup   | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |

|               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |           |             |                                                                   |                        |                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| SIDRAP-DAA.82 | SRN                                                             | Aplikasi pendataan dan pelaporan mobilisasi dukungan dan atau aksi pengendalian perubahan iklim yang konsisten dengan unsur-unsur data aksi pengendalian perubahan iklim yang terukur.                                                   | Web Based | Proprietary | Dinas Lingkungan Hidup                                            | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.83 | SPECTRUM                                                        | Aplikasi Penghitungan data emisi gas rumah kaca                                                                                                                                                                                          | Web Based | Proprietary | Dinas Lingkungan Hidup                                            | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.84 | IKLH                                                            | Aplikasi Pendataan tentang indeks kualitas lingkungan hidup                                                                                                                                                                              | Web Based | Proprietary | Dinas Lingkungan Hidup                                            | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.85 | Om-SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran ) | aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.                                                                             | Web Based | Proprietary | Dinas Lingkungan Hidup                                            | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.86 | emonev                                                          | ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja dalam kurun waktu tiga bulan yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). | Web Based | Proprietary | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.87 | KRISNA(KOLABORASI PERENCANAAN DAN INFORMASI KINERJA ANGGARAN)   | dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.                               | Web Based | Proprietary | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |

|               |                                                                            |                                                                                                                                             |           |             |                                                                   |                        |                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| SIDRAP-DAA.88 | SIPD(Sistem Informasi Pembangunan Daerah)                                  | penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan. | Web Based | Proprietary | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.89 | Litbang                                                                    |                                                                                                                                             | Mobile    | Proprietary | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.90 | Siks/ng                                                                    | Pengelolaan bantuan warga miskin                                                                                                            | Mobile    | Proprietary | DINAS SOSIAL                                                      | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.91 | edabu                                                                      | Bantuan pembayaran bpjs                                                                                                                     | Mobile    | Proprietary | DINAS SOSIAL                                                      | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.92 | SPAN LAPOR                                                                 | Layanan pengaduan masyarakat                                                                                                                | Mobile    | Proprietary | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                  | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.93 | SIAPP                                                                      | Layanan aspirasi DAERAH                                                                                                                     | Mobile    | Proprietary | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                  | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.94 | PPID                                                                       | PEJABATAN PENGELOLAAN APLIKASI PUBLIK                                                                                                       | Mobile    | Proprietary | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                  | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.95 | <a href="mailto:ADUAN.SPBE.SIDRAPKAB.CO.ID">ADUAN.SPBE.SIDRAPKAB.CO.ID</a> | LAYANAN ADUAN SPBE                                                                                                                          | Mobile    | Proprietary | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                  | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.96 | SATU DATA                                                                  | LAYANAN DATA KAB SIDRAP                                                                                                                     | Web Based | Proprietary | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                  | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.97 | SIDRAPKAB                                                                  | LAYANAN INFORMASI                                                                                                                           | Web Based | Proprietary | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                  | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |

|                |               |                                                                                                                                                 |           |  |                                 |                        |                                                   |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| SIDRAP-DAA.98  | Premi         | presensi guru menunjukkan waktu guru clock in (absen masuk) dan clock out (absen pulang) serta informasi detail seperti lokasi dan foto selfie. | Mobile    |  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.99  | Pasti beraksi | untuk mengatasi anak putus sekolah di Sulawesi Selatan                                                                                          | Mobile    |  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.100 | Simtun        | aplikasi pengajuan tunjangan profesi guru                                                                                                       | Web Based |  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.101 | simbar        | aplikasi pembayaran tunjangan profesi guru                                                                                                      | Web Based |  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.102 | sim antun     | aplikasi aneka tunjangan profesi guru                                                                                                           | Web Based |  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.103 | sim tendik    | aplikasi data tenaga kependidikan sebagai dasar SK                                                                                              | Web Based |  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.104 | verval SP     | aplikasi verifikasi dan validasi data satuan Pendidikan                                                                                         | Web Based |  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.105 | verval ijazah | aplikasi verifikasi dan validasi data ijazah                                                                                                    | Web Based |  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.106 | verval PD     | aplikasi verifikasi dan validasi data peserta didik                                                                                             | Web Based |  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.107 | verval PTK    | aplikasi verifikasi dan validasi data pendidik dan tenaga kependidikan                                                                          | Web Based |  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.108 | Omspan        | memonitoring transaksi dalam SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web                          | Web Based |  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |

|                |                 |                                                                                                                                                              |           |  |                                      |                        |                                                   |
|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| SIDRAP-DAA.109 | krisna          | aplikasi sinergi perencanaan anggaran kependidikan                                                                                                           | Web Based |  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan      | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.110 | simdak          | aplikasi dana alokasi khusus kependidikan                                                                                                                    | Web Based |  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan      | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.111 | SIPD            | aplikasi data analisi perencanaan pembangunan dan pemetaan daerah                                                                                            | Web Based |  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan      | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.112 | PBJ/LPSE        | aplikasi pembelian barang dan jasa                                                                                                                           | Web Based |  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan      | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.113 | SIPBJ/Sipengaja | aplikasi pembelian barang dan jasa yang dikelola UKPBJ                                                                                                       | Web Based |  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan      | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.114 | SIMPKB          | pemantauan dan evaluasi kinerja pegawai di berbagai instansi pemerintah di Indonesia                                                                         | Mobile    |  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan      | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.115 | dapodik         | memantau dan mengelola data pendidikan secara komprehensif, termasuk data siswa, data sekolah, data tenaga pendidik, dan berbagai informasi terkait lainnya. | Web Based |  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan      | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.116 | SIMPELAKU       |                                                                                                                                                              | Web Based |  | dinas kependudukan dan catatan sipil | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.117 | E office        | mentransformasikan sistem korespondensi yang awalnya berbasis kertas menjadi berbasis elektronik.                                                            | Web Based |  | dinas kependudukan dan catatan sipil | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.118 | SIK TERPUSAT    | menata Administrasi Kependudukan agar lebih tertib, dan database yang sebelumnya berada di daerah,                                                           | Web Based |  | dinas kependudukan dan catatan sipil | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |

|                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |  |                                                                |                      |                                        |
|----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| SIDRAP-DAA.119 | PALEKKO                         | Layanan ini spesial untuk pencari keadilan yang berusia enam puluh enam tahun (Manula) keatas dan atau yang memakai kursi roda (difabel), diharapkan dengan adanya layanan ini dapat memudahkan pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang | Web Based |  | dinas kependudukan dan catatan sipil                           | RAA.01 APLIKASI UMUM | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK |
| SIDRAP-DAA.120 | Inzting sulsel                  | aplikasi yang dibuat Pemkab Takalar, yang kemudian akan dimanfaatkan oleh seluruh kabupaten kota se Sulsel dalam pendataan dan penanganan kasus stunting                                                                                                                           | Web Based |  | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RAA.01 APLIKASI UMUM | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK |
| SIDRAP-DAA.121 | INM (INTIDKATOR NASIONAL MUTU)  | untuk mengukur kepatuhan pemberi layanan kesehatan dalam kebersihan tangan, sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhannya agar dapat menjamin keselamatan pasien dengan cara mengurangi risiko infeksi yang terkait pelayanan kesehatan.                           | Web Based |  | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RAA.01 APLIKASI UMUM | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK |
| SIDRAP-DAA.122 | SPM(Standar pelayanan minial)   | ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.                                                                                                                                                                               | Web Based |  | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RAA.01 APLIKASI UMUM | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK |
| SIDRAP-DAA.123 | KOMDAT (komunikasi data) kesmas | big data yang menampung data kesehatan masyarakat secara nyata dan akurat.                                                                                                                                                                                                         | Web Based |  | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RAA.01 APLIKASI UMUM | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK |

|                |                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |           |  |                                                                |                        |                                                   |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| SIDRAP-DAA.124 | KS(keluarga sehat)                   | aplikasi sistem informasi kesehatan daerah yang berlaku secara nasional yang menghubungkan- an secara online dan terintegrasi seluruh Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Di- nas Kesehatan Provinsi, dan Kementerian Kesehatan. | Web Based |  | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.125 | Kansa                                |                                                                                                                                                                                                                                         | Web Based |  | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.126 | eppgbm                               | sistem elektronik pencatatan Dan pelaporan Gizi berbasis masyarakat yang memuat data hasil pengukuran dan pelaporan gizi yang dientri setiap bulan oleh Pengelola Gizi di tiap-tiap Puskesmas.                                          | Web Based |  | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.127 | Mpdn (maternal date pern notifikasi) | sistem pencatatan secara digital data kematian Maternal dan Perinatal                                                                                                                                                                   | Web Based |  | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.128 | SITKO                                | setiap tingkat administrasi menghubungkan data dan informasi melalui sistem informasi ke program lain.                                                                                                                                  | Web Based |  | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.129 | E monev tfu                          | CAPAIAN TFU YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR (IKL)                                                                                                                                                                              | Web Based |  | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |

|                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |           |  |                                                                |                        |                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| SIDRAP-DAA.130 | E monev Hsp                                                       | executor dalam memverifikasi TPP yang sudah berstatus MS dari hasil IKL yang dilakukan oleh puskesmas/wilker KKP, sebagai tindak lanjut dalam proses penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi pangan / sertifikat laik sehat (SLS). | Web Based |  | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.131 | E monev stbm                                                      | pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.                                                                                                                         | Web Based |  | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.132 | (SIPEKAM)<br>e-Monev PKAM                                         | Upaya peningkatan pengawasan kualitas air minum aman berkelanjutan, untuk mendapatkan air minum yang aman sampai dengan tingkat Rumah Tangga,                                                                                          | Web Based |  | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.133 | sikelim                                                           | pengawasan dan pelaporan pengelolaan Limbah Medis dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SIKELIM                                                                                                                             | Web Based |  | DINAS KESEHATAN, PENGENDALISAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.134 | <a href="https://evaluasi.menpan.go.id">Evaluasi.menpan.go.id</a> | sebuah platform yang dibuat untuk membantu organisasi dalam melakukan survei dan evaluasi terhadap kinerja dan kepuasan karyawan atau pelanggan.                                                                                       | Web Based |  | Bagian organisasi                                              | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |

|                |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |           |  |                                          |                        |                                                   |
|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| SIDRAP-DAA.135 | SIMONA           | aplikasi dari Kementrian dalam Negeri untuk melakukan monitoring pelaksanaan analisis jabatan, beban kerja, evaluasi jabatan, anggaran dan penerapan tambahan penghasilan pegawai di pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Paser, | Web Based |  | Bagian organisasi                        | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.136 | SIPD Perencanaan | Perencanaan penyusunan Renstra dan Renja                                                                                                                                                                                                    | Web Based |  | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.137 | SIPD Keuangan    | Perencanaan laporan keuangan                                                                                                                                                                                                                | Web Based |  | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.138 | SIMDA            | pengelolaan segala kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah.                                                                                                         | Web Based |  | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.139 | EMONEV           | ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja dalam kurun waktu tiga bulan yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).    | Web Based |  | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.140 | sismondak        | Sistem Monitoring Dana Alokasi Khusus Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan                                                                                                                                                                  | Web Based |  | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT              | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |

|                |          |                                                                                                                                                                                                 |           |  |                             |                        |                                                   |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| SIDRAP-DAA.141 | sipjaki  | dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.                                     | Web Based |  |                             | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.142 | simda    | Membantu pemerintah daerah untuk membangun dan menggunakan sistem informasi keuangan dan kinerja untuk tata kelola yang baik termasuk pengendalian transaksi dan informasi yang memadai.        | Web Based |  | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.143 | SIPD     | merupakan salah satu tools penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan   | Web Based |  | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.144 | TEPRA    | kelanjutan Tim Evaluasi Penyerapan Anggaran (TEPA) yang dibentuk oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) pada pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II. | Web Based |  | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.145 | Sispensi | Peraturan daerah terkait keuangan dan perencanaan                                                                                                                                               | Web Based |  | Bagian Hukum                | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.146 | IPERDA   | Fasilitasi dan Konsultasi                                                                                                                                                                       | Web Based |  | Bagian Hukum                | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |

|                |          |                                                                                                                                                                                                                                          |           |  |                                                        |                        |                                                   |
|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| SIDRAP-DAA.147 | sipamase | aplikasi pemenuhan indikator penilaian SPBE.                                                                                                                                                                                             | Web Based |  | Bagian Hukum                                           | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.148 | Jdih     | suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum yang mudah, murah, cepat dan akurat.  | Web Based |  | Bagian Hukum                                           | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.149 | Emonev   | ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja dalam kurun waktu tiga bulan yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). | Web Based |  | INSPEKTORAT                                            | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.150 | SIPD     | merupakan salah satu tools penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan                                            | Web Based |  |                                                        | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.151 | Sijapti  | uatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan instansi pemerintah, mulai dari konsultasi, penyampaian dokumen rencana seleksi | Web Based |  | Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |

|                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |  |                                                        |                        |                                                   |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| SIDRAP-DAA.152 | sipintar     | Sistem Informasi Program Indonesia Pintar dalam bentuk aplikasi mobile.                                                                                                                                                                                                       | Web Based |  | Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.153 | sipandu      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Web Based |  | Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.154 | Isrmempan    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Web Based |  | Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.155 | Sakip review | sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. | Web Based |  | Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.156 | Srikandi     | aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik                                                                                                                                                        | Web Based |  | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                        | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.157 | SIPD         | merupakan salah satu tools penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan                                                                                 | Web Based |  | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                        | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.158 | TEPRA        | Aplikasi pengadaan Layanan bantuan Tabungan Perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil                                                                                                                                                                                               | Web Based |  | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                        | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |

|                |          |                                                                                                                                                                                                                                          |           |  |                                  |                        |                                                   |
|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| SIDRAP-DAA.159 | LPSE     | unit kerja yang dibentuk untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia/Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik.                                                                                | Web Based |  | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.160 | Srikandi | aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik                                                                                                                   | Web Based |  | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.161 | SIPD     | merupakan salah satu tools penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan                                            | Web Based |  | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.162 | SIRUP    | Adalah sebuah layanan untuk pengadaan barang dan jasa                                                                                                                                                                                    | Web Based |  | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.163 | emonev   | ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja dalam kurun waktu tiga bulan yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). | Web Based |  | BADAN PENDAPATAN DAERAH          | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.164 | SIRUP    | Adalah sebuah layanan untuk pengadaan barang dan jasa                                                                                                                                                                                    | Web Based |  | BADAN PENDAPATAN DAERAH          | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |

|                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |  |                          |                        |                                                   |
|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| SIDRAP-DAA.165 | Sakip reviu | sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. | Web Based |  | BADAN PENDAPATAN DAERAH  | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.166 | SIPD        | merupakan salah satu tools penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan                                                                                 | Web Based |  | BADAN PENDAPATAN DAERAH  | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.167 | SISDMK      | adalah sistem terkait SDM kesehatan. SIDMK digunakan untuk mengetahui jumlah tenaga kesehatan di suatu wilayah.                                                                                                                                                               | Web Based |  | RUMAH SAKIT NENE'MALLOMO | RAA.02 APLIKASI KHUSUS | RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| SIDRAP-DAA.168 | RS online   | RS online atau rumah sakit online merupakan konsep di mana layanan kesehatan disampaikan atau diakses melalui internet                                                                                                                                                        | Web Based |  | RUMAH SAKIT NENE'MALLOMO | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |
| SIDRAP-DAA.169 | siranap     | memuat informasi berkaitan dengan informasi data, ketersediaan tempat tidur isolasi, dan tempat tidur ICU Covid-19 di rumah sakit.                                                                                                                                            | Web Based |  | RUMAH SAKIT NENE'MALLOMO | RAA.01 APLIKASI UMUM   | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK            |

|                |                                                                         |                                                                                                                                                                                              |           |  |                          |                      |                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| SIDRAP-DAA.170 | sisrute                                                                 | Aplikasi SISROUTE merupakan sarana komunikasi proses rujukan yang dapat memberikan informasi rujukan pelayanan kesehatan perorangan                                                          | Web Based |  | RUMAH SAKIT NENE'MALLOMO | RAA.01 APLIKASI UMUM | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK |
| SIDRAP-DAA.171 | <a href="https://rsudnenemallomo.com/">https://rsudnenemallomo.com/</a> |                                                                                                                                                                                              | Web Based |  | RUMAH SAKIT NENE'MALLOMO | RAA.01 APLIKASI UMUM | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK |
| SIDRAP-DAA.172 | KESSAN                                                                  | proses evaluasi pelayanan FKRTL yang dilaksanakan melalui mekanisme survei untuk memperoleh umpan balik atau kesan pengalaman peserta JKN setelah menerima layanan dari fasilitas kesehatan. | Web Based |  | RUMAH SAKIT NENE'MALLOMO | RAA.01 APLIKASI UMUM | RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK |

#### LAMPIRAN 4 – METADATA ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR TIK

##### Platform

| ID        | Nama Perangkat Lunak | Deskripsi Perangkat Lunak                                | Tipe Perangkat Lunak | Jenis Sistem Operasi | Jenis Sistem Utilitas | Jenis Sistem Database | Jenis lisensi        | Nama Pemilik Lisensi    | Validitas Lisensi Perangkat Lunak               | ID metadata terkait |
|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| SIDRAP.01 | Debian               | Sistem operasi server                                    | sistem Operasi       | unix                 |                       |                       | Kode Sumber Terbuka  | Pemda Sidenreng Rappang | Lisensi open source didapatkan secara otomatis. |                     |
| SIDRAP.02 | Aimetis Symphony     | VMS (Video Management Software) Software Management CCTV | Sistem Utilitas      |                      | Lainnya               |                       | Lisensi seumur hidup | Pemda Sidenreng Rappang | Lisensi dibeli dari Penyedia                    |                     |
| SIDRAP.03 | Proxmox              | sistem operasi server                                    | sistem Operasi       | unix                 |                       |                       | Kode Sumber Terbuka  | Pemda Sidenreng Rappang | Lisensi open source didapatkan secara otomatis. |                     |
| SIDRAP.04 | Window Server 2013   | sistem operasi server                                    | sistem Operasi       | Windowss             |                       |                       | Lisensi seumur hidup | Pemda Sidenreng Rappang | Lisensi dibeli dari Penyedia                    |                     |
| SIDRAP.05 | VMware Esxi          | sistem operasi server                                    | sistem Operasi       | Lainnya              |                       | Lainnya               | Lisensi seumur hidup | Pemda Sidenreng Rappang | Lisensi termasuk dalam pembelian server         |                     |

### Perangkat Keras Server

| ID        | Nama Server                              | Deskripsi Server                                       | Jenis Penggunaan Server | Status Kepemilikan | Nama Pemilik | Unit Pengelola Server | Lokasi Perangkat Keras Server | Perangkat Lunak yang Digunakan | Kapasitas Memori | Jenis Teknologi Prosesor | Jumlah Kapasitas Penyimpanan | Teknik Penyimpanan | ID metadata terkait |
|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|
| SIDRAP.06 | Sangfor HCI (Hyper Cloud Infrastructure) | Server yang digunakan untuk menyediakan Virtual Server | VM Server               | Milik Sendiri      |              | Dinas Kominfo         | Datacenter Dinas Kominfo      |                                |                  | High End                 |                              |                    |                     |

### Perangkat Media Penyimpanan

| ID        | Nama Data Storage  | Deskripsi Data Storage                                     | Data yang Digunakan                                | Status Kepemilikan | Nama Pemilik | Unit Pengelola Data Storage | Lokasi Data Storage      | Perangkat Lunak yang Digunakan | Kapasitas Penyimpanan | Metode Akses Data Sharing | ID metadata terkait |
|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| SIDRAP.07 | HPE MSA 2040 SAS   | Storage untuk menyimpan berkas digital dari Virtual Server | Data aplikasi, Database Aplikasi                   | Milik Sendiri      |              | Dinas Kominfo               | Datacenter Dinas Kominfo |                                |                       | SAS                       |                     |
| SIDRAP.08 | Synology RS1221RP+ | Storage untuk menyimpan berka digital dari virtual server  | Data aplikasi, Database Aplikasi, dan Rekaman CCTV | Milik Sendiri      |              | Dinas Kominfo               | Datacenter Dinas Kominfo | DSM                            | 16 TB                 | NAS                       |                     |

| ID        | Nama Data Storage                            | Deskripsi Data Storage                                    | Data yang Digunakan                                | Status Kepemilikan | Nama Pemilik | Unit Pengelola Data Storage | Lokasi Data Storage      | Perangkat Lunak yang Digunakan | Kapasitas Penyimpanan | Metode Akses Data Sharing | ID metadata terkait |
|-----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| SIDRAP.09 | Sangfor HCI (Hyper Converged Infrastructure) | Perangkat server VM serta Server Penyimpanan data Virtual | Data aplikasi, Database Aplikasi, dan Rekaman CCTV | Milik Sendiri      |              | Dinas Kominfo               | Datacenter Dinas Kominfo |                                |                       | DAS                       |                     |

#### Perangkat Keras Jaringan

| ID        | Nama Network/ Communication Device | Deskripsi Network/ Communication Device                         | Tipe Network/ Communication Device | Status Kepemilikan | Nama Pemilik | Unit Pengelola Network/ Communication Device | ID metadata terkait |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
| SIDRAP.10 | cisco catalyst 48 Port             | Switch yang digunakan sebagai core switch                       | Switch L3                          | Milik Sendiri      |              | Dinas Kominfo                                |                     |
| SIDRAP.11 | OLT (Optical Line Terminal)        | Perangkat Untuk Menejemen jaringan FTTP (Fiber To The Premises) | Router, Transmission Equipment     | Milik Sendiri      |              | Dinas Kominfo                                |                     |

| ID        | Nama Network/<br>Communication<br>Device | Deskripsi<br>Network/<br>Communication<br>Device                                            | Tipe Network/<br>Communication<br>Device | Status<br>Kepemilikan | Nama<br>Pemilik | Unit Pengelola<br>Network/<br>Communication<br>Device | ID metadata<br>terkait |
|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| SIDRAP.12 | Fibre channel<br>Switch                  | Switch yang<br>digunakan<br>untuk koneksi<br>VM Server (HCI)<br>dan Storage<br>Server (SAS) | Switch                                   | Milik Sendiri         |                 | Dinas Kominfo                                         |                        |
| SIDRAP.13 | Ubiquity Rocket<br>+ Dish                | Perangkat radio<br>untuk p2p antar<br>BTS                                                   | Transmission<br>Equipment                | Milik Sendiri         |                 | Dinas Kominfo                                         |                        |
| SIDRAP.14 | Ubiquity Rocket<br>+ Sectoral            | perangkat radio<br>untuk ptmp Ke<br>endpoint atau<br>SKPD                                   | Transmission<br>Equipment                | Milik Sendiri         |                 | Dinas Kominfo                                         |                        |
| SIDRAP.15 | Ubiquity<br>Powerbeam                    | Perangkat radio<br>untuk menerima<br>sinyal pada<br>endpoint atau<br>SKPD                   | Transmission<br>Equipment                | Milik Sendiri         |                 | Dinas Kominfo                                         |                        |
| SIDRAP.16 | Ubiquity<br>Litbeam                      | perangkat radio<br>untuk menerima<br>sinyal pada<br>endpoint atau<br>SKPD                   | Transmission<br>Equipment                | Milik Sendiri         |                 | Dinas Kominfo                                         |                        |

| ID        | Nama Network/<br>Communication<br>Device | Deskripsi<br>Network/<br>Communication<br>Device                          | Tipe Network/<br>Communication<br>Device | Status<br>Kepemilikan | Nama<br>Pemilik | Unit Pengelola<br>Network/<br>Communication<br>Device | ID metadata<br>terkait |
|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| SIDRAP.17 | Ubiquity<br>Nanostation                  | perangkat radio<br>untuk menerima<br>sinyal pada<br>endpoint atau<br>SKPD | transmission<br>Equipment                | Milik Sendiri         |                 | Dinas Kominfo                                         |                        |
| SIDRAP.18 | Ubiquity Unifi<br>Ap AC Mesh             | Wireless Access<br>Point                                                  | Router, wireless<br>equipment            | Milik Sendiri         |                 | Dinas Kominfo                                         |                        |
| SIDRAP.19 | Ubiquiti UniFi<br>AP-AC-PRO              | Wireless Access<br>Point                                                  | router, wireless<br>equipment            | Milik Sendiri         |                 | Dinas Kominfo                                         |                        |
| SIDRAP.20 | ZTE F609                                 | Wireless Access<br>Point                                                  | router, wireless<br>equipment            | Milik Sendiri         |                 | Dinas Kominfo                                         |                        |
| SIDRAP.21 | Netgear Switch<br>Manageble              | Switch yang<br>digunakan<br>untuk<br>management<br>vlan                   | switch L3                                | Milik Sendiri         |                 | Dinas Kominfo                                         |                        |
| SIDRAP.22 | Allied Telesis<br>Manageble<br>Switch    | switch yang<br>digunakan<br>untuk<br>management<br>vlan                   | switch L3                                | Milik Sendiri         |                 | Dinas Kominfo                                         |                        |
| SIDRAP.23 | F5                                       | Firewall<br>(perangkat<br>Keamanan)                                       | Firewall                                 | Milik Sendiri         |                 | Dinas Kominfo                                         |                        |

| ID        | Nama Network/<br>Communication<br>Device | Deskripsi<br>Network/<br>Communication<br>Device            | Tipe Network/<br>Communication<br>Device | Status<br>Kepemilikan | Nama<br>Pemilik | Unit Pengelola<br>Network/<br>Communication<br>Device | ID metadata<br>terkait |
|-----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| SIDRAP.24 | Sangfor NGAF                             | Firewall<br>(perangkat<br>Keamanan)                         | Firewall                                 | Milik Sendiri         |                 | Dinas Kominfo                                         |                        |
| SIDRAP.25 | Mikrotik CCR                             | Router                                                      | Router                                   | Milik Sendiri         |                 | Dinas Kominfo                                         |                        |
| SIDRAP.26 | Sangfor IAM                              | Perangkat untuk<br>monitoring dan<br>management<br>jaringan | Network<br>Management<br>and Monitoring  | Milik Sendiri         |                 | Dinas Kominfo                                         |                        |